

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI TA 2011 *Audited*



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT



BAGIAN ANGGARAN 015



LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 *AUDITED*

Jalan Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Kementerian Keuangan adalah salah satu Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

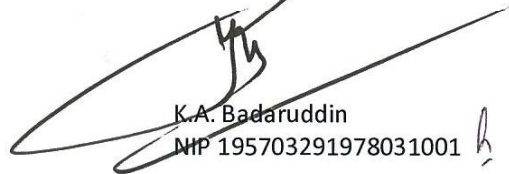
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2011 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2011 adalah sebesar **Rp875.490.823.295.438,00** atau **99,56** persen dari estimasi pendapatan TA 2011 sebesar **Rp879.328.211.203.898,00**. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar **Rp16.100.333.220.289,00** atau **92,81** persen dari pagu yang dianggarkan dalam DIPA TA 2011 sebesar **Rp17.346.872.669.000,00**.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011. Adapun nilai Aset Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 adalah sebesar **Rp101.349.409.297.605,00** dan Kewajiban sebesar **Rp806.982.593.139,00**, sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 adalah sebesar **Rp100.542.426.704.466,00**.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
4. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011 ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan tahunan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, Mei 2012
Sekretaris Jenderal,



K.A. Badaruddin
NIP 195703291978031001

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan serta untuk mempermudah penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

Sistematika penyajian Laporan Keuangan Kementerian Keuangan

1. Sampul Luar

Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Kementerian Negara/Lembaga dan periode penyampaian laporan keuangan.

2. Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Kementerian Negara/Lembaga dan periode penyampaian laporan keuangan.

3. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

4. Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. Daftar Tabel

Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

6. Daftar Grafik

Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

7. Daftar Lampiran

Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

8. Daftar Singkatan

Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan keuangan.

9. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut :

- pernyataan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan;
- pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan;
- pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

10. Pernyataan Telah Direviu

Merupakan pernyataan dari aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga atas hasil reviu terhadap LKKL sebelum dipertanggungjawabkan oleh menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan.

11. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

12. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran dihasilkan berdasarkan cetakan dari SAI, untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan TA 2011. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dengan tahun anggaran berjalan.

13. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

Neraca dihasilkan melalui SAI. Neraca Semester I menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni TA berjalan. Untuk Neraca Tahunan menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember TA berjalan. Neraca disajikan secara komparatif dengan posisi keuangan pada TAYL.

14. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pendapatan dan belanja selama tahun anggaran. Laporan yang disampaikan dapat dilihat pada lembar muka laporan keuangan. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan TA 2011. Untuk periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif, dengan membandingkan anggaran dan realisasi TAYL dengan tahun anggaran berjalan.

15. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengungkapkan penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

CaLK merupakan unsur pokok, wajib, dan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

16. Lampiran Laporan Keuangan

- a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran
 - i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
 - ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
 - iii) Neraca Percobaan
- b. Laporan barang pengguna
 - i) Laporan Barang Pengguna Tahunan
 - Laporan Barang Pengguna Tahunan Intrakomptabel
 - Laporan Barang Pengguna Tahunan Ekstrakomptabel
 - Laporan Barang Pengguna Tahunan Gabungan
 - ii) Laporan Posisi BMN di Neraca
- c. Laporan Keuangan BLU:
 - i) Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
 - ii) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
- d. Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural :
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
- e. Laporan Rekening Pemerintah
- f. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

17. Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan

- a. Berita Acara Rekonsiliasi LRA
- b. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
- c. Laporan Barang Pengguna Barang Persediaan
- d. Laporan Barang Tegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- e. Laporan Barang Sitaan Direktorat Jenderal Pajak

	Halaman
Kata Pengantar	i
Sistematika Penyajian Laporan Keuangan	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	xii
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	xiii
Daftar Lampiran	xvi
Daftar Singkatan	xvii
Pernyataan Tanggung Jawab	xix
Pernyataan Telah Direviu	xx
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	4
III. Neraca	5
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Keuangan	10
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	18
A.4. Kebijakan Akuntansi	20
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	30
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	30
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	30
B.3. Catatan Penting Lainnya	66
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	85
C.1. Penjelasan Umum Neraca	85
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	86
C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	153
D. Pengungkapan Penting Lainnya	174
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	174
D.2. Rekening Pemerintah	174
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua	174
D.4. Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan	176
D.5. Aset Tetap Bermasalah	176
D.6. Barang Tegahan	176
D.7. Barang Sitaan	176

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER- 65 /PB/2010

- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca Percobaan

Laporan Barang Pengguna

- Laporan Barang Pengguna Tahunan
- Laporan Posisi BMN di Neraca

Lampiran-Lampiran Lain :

1. Laporan Keuangan BLU:
 - i) Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
 - ii) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
2. Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural :
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)
3. Laporan Rekening Pemerintah
4. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK
5. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan
6. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
7. Berita Acara Rekonsiliasi TP/TGR
8. Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan
9. Aset tetap Bermasalah
10. Laporan Barang Pengguna Barang Persediaan
11. Laporan Barang Tegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
12. Daftar Barang Sitaan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)
13. Rincian Piutang Pajak
14. Rincian Piutang PNBP BAPEPAM LK
15. Rincian Penyisihan Piutang PNBP
16. Rincian SP3DRI
17. Informasi Akrua

	Halaman
Tabel 1	Rekapitulasi Satker yang Menyampaikan Laporan Keuangan menurut Eselon I 19
Tabel 2	Rekapitulasi Satker yang Menyampaikan Laporan Barang menurut Eselon I 20
Tabel 3	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2011 30
Tabel 4	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 30
Tabel 5	Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 dan 2010 31
Tabel 6	Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I TA 2011 32
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I TA 2011 dan 2010 33
Tabel 8	Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan TA 2011 33
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan TA 2011 dan 2010 34
Tabel 10	Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan TA 2011 34
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan TA 2011 dan 2010 35
Tabel 12	Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2011 37
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2011 dan 2010 37
Tabel 14	Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2011 dan 2010 40
Tabel 15	Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 40
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 dan 2010 41
Tabel 17	Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 dan 2010 42
Tabel 18	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 43
Tabel 19	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2010 43
Tabel 20	Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2011 45
Tabel 21	Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2011 dan 2010 45
Tabel 22	Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan PNBP Lainnya TA 2011 dan 2010 46
Tabel 23	Realisasi Pendapatan BLU TA 2011 46
Tabel 24	Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU TA 2011 dan 2010 47
Tabel 25	Realisasi Pendapatan BLU TA 2011 Berdasarkan Satuan Kerja 48
Tabel 26	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2011 50
Tabel 27	Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2011 dan 2010 51
Tabel 28	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I TA 2011 52
Tabel 29	Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I TA 2011 dan 2010 53
Tabel 30	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Fungsi TA 2011 53
Tabel 31	Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Fungsi TA 2011 dan 2010 54
Tabel 32	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2011 55
Tabel 33	Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2011 dan TA 2010 56
Tabel 34	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2011 57
Tabel 35	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2011 dan 2010 58
Tabel 36	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon I TA 2011 58
Tabel 37	Perbandingan Belanja Pegawai TA 2011 dan TA 2010 59
Tabel 38	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang TA 2011 60
Tabel 39	Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2011 dan 2010 61
Tabel 40	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I TA 2011 61
Tabel 41	Perbandingan Belanja Barang Per Eselon I TA 2011 dan TA 2010 62
Tabel 42	Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Modal TA 2011 63
Tabel 43	Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2011 dan 2010 64
Tabel 44	Realisasi Belanja Modal Per Eselon I TA 2011 64
Tabel 45	Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2011 dan 2010 65
Tabel 46	Realisasi Pembayaran Kewajiban Utang TA 2011 dan 2010 65
Tabel 47	Komposisi Neraca Per 31 Desember 2011 dan 2010 85
Tabel 48	Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010 86
Tabel 49	Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 87
Tabel 50	Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010 87
Tabel 51	Kas pada Badan Layanan Umum Per Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010 88

Tabel 52	Rincian Kas	88
Tabel 53	Rincian Kas Berdasarkan Kode Akun	89
Tabel 54	Piutang Pajak Neto Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	89
Tabel 55	Piutang Pajak Bruto Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	90
Tabel 56	Rincian Piutang Pajak Per Jenis Pajak Per 31 Desember 2011 dan 2010	90
Tabel 57	Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang Per 31 Desember 2011	91
Tabel 58	Rincian Penyisihan Piutang Pajak Per Jenis Pajak Per 31 Desember 2011	94
Tabel 59	Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang Per 31 Desember 2011	95
Tabel 60	Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2011	95
Tabel 61	Piutang PNBPNeto Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	96
Tabel 62	Piutang PNBPNeto Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	96
Tabel 63	Rincian Penyisihan Piutang PNBPNeto Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	97
Tabel 64	Rincian Piutang Bukan Pajak di BPPK Per 31 Desember 2011	102
Tabel 65	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Neto Per Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	103
Tabel 66	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per Eselon I Per 31 Desember 2011	104
Tabel 67	Uang Muka Belanja Per Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	104
Tabel 68	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Neto Per Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	105
Tabel 69	Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Eselon I Per 31 Desember 2011	105
Tabel 70	Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Setjen-PIP Per 31 Desember 2011	106
Tabel 71	Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU BPPK-STAN Per 31 Desember 2011	106
Tabel 72	Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU Neto Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010	107
Tabel 73	Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Per Eselon I Per 31 Desember 2011	107
Tabel 74	Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU-PIP Per Eselon I Per 31 Desember 2011	108
Tabel 75	Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU-PIP selain Bunga Akrua Deposito Per 31 Desember 2011	108
Tabel 76	Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU-STAN Per 31 Desember 2011	109
Tabel 77	Persediaan Per Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	109
Tabel 78	Persediaan Per Jenis Per 31 Desember 2011	110
Tabel 79	Persediaan BLU Per Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	110
Tabel 80	Komposisi Aset Tetap per Jenis Aset per 31 Desember 2011 dan 2010	111
Tabel 81	Mutasi/Perubahan Aset Tetap	112
Tabel 82	Rincian Mutasi Aset terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2011	113
Tabel 83	Perbandingan Saldo Awal Aset Tetap Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2010	114
Tabel 84	Perbandingan Posisi Aset Tetap Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2011	115
Tabel 85	Aset Tetap Tanah Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	117
Tabel 86	Mutasi/Perubahan Tanah	117
Tabel 87	Rincian Mutasi Tanah terkait Belanja Modal per 31 Desember 2011	118
Tabel 88	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	119
Tabel 89	Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin	119
Tabel 90	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2011	120
Tabel 91	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	121
Tabel 92	Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan	121
Tabel 93	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2011	122

Tabel 94	Aset Tetap Jalan dan Jembatan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	123
Tabel 95	Mutasi/Perubahan Jalan dan Jembatan	123
Tabel 96	Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2011	124
Tabel 97	Aset Tetap Irigasi Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	125
Tabel 98	Mutasi/Perubahan Irigasi	125
Tabel 99	Rincian Mutasi Irigasi terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2011	126
Tabel 100	Jaringan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	127
Tabel 101	Mutasi/Perubahan Jaringan	127
Tabel 102	Rincian mutasi Jaringan terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2011	128
Tabel 103	Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	129
Tabel 104	Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya	129
Tabel 105	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2011	130
Tabel 106	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	131
Tabel 107	Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan	131
Tabel 108	Aset Tetap Tanah BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	132
Tabel 109	Mutasi/Perubahan Tanah BLU	132
Tabel 110	Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	132
Tabel 111	Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin BLU	133
Tabel 112	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin BLU terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2011	133
Tabel 113	Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	133
Tabel 114	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan BLU terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2011	134
Tabel 115	Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan BLU	134
Tabel 116	Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	134
Tabel 117	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Bangunan BLU terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2011	135
Tabel 118	Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU	135
Tabel 119	Aset Tetap Lainnya BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	135
Tabel 120	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya BLU terkait Belanja Modal Per 31 Desember 2011	136
Tabel 121	Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya BLU	136
Tabel 122	Aset Tetap KDP BLU Per Unit Eselon I per 31 Desember 2011 dan 2010	137
Tabel 123	Mutasi/Perubahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU	137
Tabel 124	Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset Per 31 Desember 2011 dan 2010	138
Tabel 125	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	139
Tabel 126	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	139
Tabel 127	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011	140
Tabel 128	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	140
Tabel 129	Aset Tak Berwujud Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	141
Tabel 130	Mutasi/Perubahan Aset Tak Berwujud	141
Tabel 131	Aset Tak Berwujud BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	142
Tabel 132	Mutasi/Perubahan Aset Tak Berwujud BLU	142
Tabel 133	Aset Tak Berwujud BLU Per Jenis	142
Tabel 134	Aset Lain-lain Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	143
Tabel 135	Perbedaan Saldo Akhir Akun Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan Pada Neraca SAK dengan Laporan Posisi BMN di Neraca	144
Tabel 136	Aset Lain-lain BLU Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	145
Tabel 137	Mutasi/Perubahan Aset Lain-lain BLU STAN	146
Tabel 138	Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2011 dan 2010	146

Tabel 139	Utang Kepada Pihak Ketiga Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	147
Tabel 140	Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun Per 31 Desember 2011	147
Tabel 141	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	148
Tabel 142	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Akun Per 31 Desember 2011	148
Tabel 143	Pendapatan Diterima di Muka Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	148
Tabel 144	Uang Muka Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	149
Tabel 145	Uang Muka dari KPPN Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	149
Tabel 146	Pendapatan Yang Ditangguhkan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 2010	150
Tabel 147	Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Per 31 Desember 2011 dan 2010	150
Tabel 148	Rincian Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2011 dan 2010	151
Tabel 149	Rincian Cadangan Piutang Per 31 Desember 2011	151
Tabel 150	Rincian Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Per 31 Desember 2011	152
Tabel 151	Rekening Pemerintah Lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 dan 2010	174
Tabel 152	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2011	175

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011	31
Grafik 2 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011	32
Grafik 3 Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan TA 2011	35
Grafik 4 Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2011	37
Grafik 5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2011 dan 2010	38
Grafik 6 Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2011	38
Grafik 7 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dan 2010	44
Grafik 8 Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011	44
Grafik 9 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2011 dan 2010	49
Grafik 10 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2011	51
Grafik 11 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Fungsi TA 2011	54
Grafik 12 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2011	55
Grafik 13 Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2011	56
Grafik 14 Komposisi Realisasi Belanja Pegawai TA 2011	57
Grafik 15 Komposisi Realisasi Belanja Barang TA 2011	60
Grafik 16 Komposisi Realisasi Belanja Modal TA 2011	63
Grafik 17 Komposisi Neraca Per 31 Desember 2011 dan 2010	85
Grafik 18 Komposisi Piutang Pajak Per Jenis Pajak Per 31 Desember 2011	91
Grafik 19 Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset Per 31 Desember 2011	111
Grafik 20 Perkembangan Aset Tetap per Jenis Aset Tetap	112
Grafik 21 Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset Per 31 Desember 2011	138

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Halaman

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

Catatan	B.	Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	30
Catatan	B.1.	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (Netto)	30
Catatan	B.2.	Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran (Bruto)	30
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	30
Catatan	B.2.1.1	Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Unit Eselon I	30
Catatan	B.2.1.2	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Jenis Penerimaan	33
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Perpajakan	34
Catatan	B.2.1.2.1.1	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	36
Catatan	B.2.1.2.1.2	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	40
Catatan	B.2.1.2.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	43
Catatan	B.2.1.2.2.1	Pendapatan PNBPN Lainnya	45
Catatan	B.2.1.2.2.2	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	46
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Hibah	48

Belanja Negara

Catatan	B.2.2	Belanja Negara	49
Catatan	B.2.2.1	Belanja Kementerian Keuangan Menurut Sumber Dana	50
Catatan	B.2.2.2	Belanja Kementerian Keuangan Menurut Unit Eselon I	52
Catatan	B.2.2.3	Belanja Kementerian Keuangan Menurut Fungsi	53
Catatan	B.2.2.4	Belanja Kementerian Keuangan Menurut Jenis Belanja	55
Catatan	B.2.2.4.1	Belanja Pegawai	56
Catatan	B.2.2.4.2	Belanja Barang	59
Catatan	B.2.2.4.3	Belanja Modal	62
Catatan	B.2.2.4.4	Pembayaran Kewajiban Utang	65
Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	66

NERACA

ASET

Aset Lancar

Catatan	C	Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	85
Catatan	C.1	Penjelasan Umum Neraca	85
Catatan	C.2	Penjelasan Per Pos Neraca	86
Catatan	C.2.1	Aset Lancar	86
Catatan	C.2.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	86
Catatan	C.2.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	86
Catatan	C.2.1.3	Kas Lainnya dan Setara Kas	87
Catatan	C.2.1.4	Kas pada BLU	88
Catatan	C.2.1.5	Piutang Pajak	89

Catatan	C.2.1.6	Piutang Bukan Pajak	96
Catatan	C.2.1.7	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	103
Catatan	C.2.1.8	Uang muka belanja	104
Catatan	C.2.1.9	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	105
Catatan	C.2.1.10	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	106
Catatan	C.2.1.11	Persediaan	109
Catatan	C.2.1.12	Persediaan Badan Layanan Umum	110

Aset Tetap

Catatan	C.2.3	Aset Tetap	111
Catatan	C.2.3.1	Tanah	117
Catatan	C.2.3.2	Peralatan dan Mesin	119
Catatan	C.2.3.3	Gedung dan Bangunan	121
Catatan	C.2.3.4	Jalan dan Jembatan	123
Catatan	C.2.3.5	Irigasi	125
Catatan	C.2.3.6	Jaringan	127
Catatan	C.2.3.7	Aset Tetap Lainnya	129
Catatan	C.2.3.8	Konstruksi dalam Pengerjaan	131
Catatan	C.2.3.9	Tanah BLU	132
Catatan	C.2.3.10	Peralatan dan Mesin BLU	132
Catatan	C.2.3.11	Gedung dan Bangunan BLU	133
Catatan	C.2.3.12	Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	134
Catatan	C.2.3.13	Aset Tetap Lainnya BLU	135
Catatan	C.2.3.14	Konstruksi dalam Pengerjaan BLU	136

Aset Lainnya

Catatan	C.2.4	Aset Lainnya	138
Catatan	C.2.4.1	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	138
Catatan	C.2.4.2	Aset Tak Berwujud	140
Catatan	C.2.4.3	Aset Tak Berwujud BLU	141
Catatan	C.2.4.4	Aset Lain-Lain	142
Catatan	C.2.4.5	Aset Lain-Lain BLU	145

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Catatan	C.2.5	Kewajiban Jangka Pendek	146
Catatan	C.2.5.1	Utang kepada Pihak Ketiga	146
Catatan	C.2.5.2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	147
Catatan	C.2.5.3	Pendapatan Diterima Dimuka	148
Catatan	C.2.5.4	Uang Muka	149
Catatan	C.2.5.5	Uang Muka dari KPPN	149
Catatan	C.2.5.6	Pendapatan yang Ditangguhkan	150

		Kewajiban Jangka Panjang	
Catatan	C.2.6	Kewajiban Jangka Panjang	150
Catatan	C.2.6.1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	150

EKUITAS

		Ekuitas Dana Lancar	
Catatan	C.2.7	Ekuitas Dana Lancar	151
Catatan	C.2.7.1	Cadangan Piutang	151
Catatan	C.2.7.2	Cadangan Persediaan	151
Catatan	C.2.7.3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	151
Catatan	C.2.7.4	Dana Lancar BLU	152
Catatan	C.2.7.5	Barang/Jasa yang harus diterima	152
Catatan	C.2.7.6	Barang/Jasa yang harus diserahkan	152
		Ekuitas Dana Investasi	
Catatan	C.2.8	Ekuitas Dana Investasi	152
Catatan	C.2.8.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	153
Catatan	C.2.8.2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	153
Catatan	C.2.8.3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	153
Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	153

		Pengungkapan Penting Lainnya	
Catatan	D	Pengungkapan Penting Lainnya	174
Catatan	D.1	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	174
Catatan	D.2	Rekening Pemerintah	174
Catatan	D.3	Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua	174
Catatan	D.4	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan	176
Catatan	D.5	Daftar Aset Bermasalah	176
Catatan	D.6	Barang Tegahan	176
Catatan	D.7	Barang Sitaan	176

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Neraca Percobaan
	LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
	LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan
	Laporan Kuasa Pengguna Barang
	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap
	Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan
	Berita Acara Rekonsiliasi TP/TGR
	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan
	Aset Tetap Bermasalah
Lampiran II	Rincian Piutang Pajak
	Rincian Piutang Piutang PNBPA BAPEPAM LK
	Rincian Penyisihan Piutang PNBPA
	Rincian SP3DRI
	Informasi Akrua
	Matriks Tindak Lanjut Temuan BPK RI
Lampiran III	Laporan Keuangan KSAP
	Laporan Keuangan PIP
	Laporan Rekening Pemerintah
Lampiran IV	Daftar Barang Tegahan DJBC

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	:	Badan Layanan Umum
BMDTP	:	Bea masuk Ditanggung Pemerintah
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DPPN	:	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MA	:	Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
UP	:	Uang Persediaan
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan
TNP	:	<i>Treasury Notional Pooling</i>
SETJEN	:	Sekretariat Jenderal
ITJEN	:	Inspektorat Jenderal

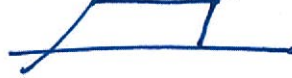
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJPK	:	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPU	:	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DJPB	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
BAPEPAM-LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BPPK	:	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
BKF	:	Badan Kebijakan Fiskal
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
STAN	:	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 (BA 015) Kementerian Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2012
Menteri Keuangan,



Agus DW Martowardojo



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 3132
TELEPON (021) 3456546; FAKSIMILE (021) 3847442; SITUS www.itjen.depkeu.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN BA 015
TAHUN ANGGARAN 2011 (AUDITED)**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 TA 2011 (*Audited*) berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin, bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 7 Mei 2012

Inspektur Jenderal
Kementerian Keuangan



Sonny
Sonny Loho
NIP 195706011979111001

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2011 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2011 ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan disusun secara berjenjang.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 sebesar **Rp875.490.823.295.438,00** atau **99,56** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2011 sebesar **Rp879.328.211.203.898,00**. Jumlah tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar **Rp873.721.483.886.873,00** atau mencapai **99,44** persen dari estimasi pagu anggarannya dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp1.769.339.408.565,00** atau mencapai **275,17** persen dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Realisasi Belanja Negara termasuk imbalan bunga pada TA 2011 sebesar **Rp16.100.333.220.289,00** atau mencapai **92,81** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp15.986.719.279.081,00** (termasuk didalamnya realisasi belanja imbalan bunga yang tidak tersedia pagu anggarannya dalam DIPA sebesar **Rp1.247.399.871.387,00**) atau **93,03** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar **Rp109.577.465.751,00** atau **67,15** persen dari anggarannya dan Belanja Barang Non Kas sebesar **Rp4.036.475.457,00**. Adapun realisasi Belanja Negara tanpa imbalan bunga pada TA 2011 adalah sebesar **Rp14.852.933.348.902,00** atau mencapai **85,62** persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar **Rp14.739.319.407.694,00** atau **85,78** persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebesar **Rp109.557.465.751,00** atau **67,15** persen dari anggarannya dan Belanja Barang Non Kas sebesar **Rp4.036.475.457,00**.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2011 dan TA 2010 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)				
	TA 2011		TA 2010	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH KAS	879.328.211.203.898	875.490.823.295.438	741.914.748.104.240	708.714.294.939.832
Penerimaan Perpajakan	878.685.216.762.000	873.721.483.886.873	741.325.906.000.000	707.727.023.639.983
PNBP	642.994.441.898	1.769.339.408.565	588.842.104.240	987.271.299.849
Hibah	-	-	-	-
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	-	-	2.000.000.000.000	14.817.135.656.211
Penerimaan Perpajakan	-	-	2.000.000.000.000	14.817.135.656.211
PNBP	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	879.328.211.203.898	875.490.823.295.438	743.914.748.104.240	723.531.430.596.043
BELANJA TRANSAKSI KAS	17.346.872.669.000	16.096.296.744.832	15.391.864.198.000	14.276.465.681.945
Belanja Rupiah Murni	17.183.692.670.000	15.986.719.279.081	14.878.568.057.000	14.137.374.903.142
Belanja PHLN	163.179.999.000	109.577.465.751	513.296.141.000	139.090.778.803
BELANJA TRANSAKSI NON KAS	-	4.036.475.457	-	-
Belanja Barang Non Kas	-	4.036.475.457	-	-
JUMLAH BELANJA	17.346.872.669.000	16.100.333.220.289	15.391.864.198.000	14.276.465.681.945

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Nilai Aset adalah sebesar **Rp101.349.409.297.605,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp62.816.187.789.195,00**, Investasi Jangka Panjang sebesar **Rp0,00**, Aset Tetap sebesar **Rp37.731.845.000.870,00** dan Aset Lainnya sebesar **Rp801.376.507.540,00**.

Nilai Kewajiban adalah sebesar **Rp806.982.593.139,00** yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp806.982.593.139,00** dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp0,00**.

Sementara itu, nilai Ekuitas Dana adalah sebesar **Rp100.542.426.704.466,00** yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar **Rp62.084.362.174.070,00** dan Ekuitas Dana Investasi sebesar **Rp38.458.064.530.396,00**.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Nilai kenaikan (penurunan)	%
	31 Des 2011	31 Des 2010		
Aset	101.349.409.297.605	109.432.138.938.078	(8.082.729.640.473)	(7,39)
Aset Lancar	62.816.187.789.195	72.387.991.856.046	(9.571.804.066.851)	(13,22)
Investasi Jangka Panjang	0	0	0	
Aset Tetap	37.731.845.000.870	36.058.407.872.153	1.673.437.128.717	4,64
Aset Lainnya	801.376.507.540	985.739.209.879	(184.362.702.339)	(18,70)
Kewajiban	806.982.593.139	761.816.067.975	45.166.525.164	5,93
Kewajiban Jangka Pendek	806.982.593.139	611.878.292.975	195.104.300.164	31,89
Kewajiban Jangka Panjang	0	149.937.775.000	(149.937.775.000)	(100,00)
Ekuitas Dana	100.542.426.704.466	108.670.322.870.103	(8.127.896.165.637)	(7,48)
Ekuitas Dana Lancar	62.084.362.174.070	71.846.529.727.455	(9.762.167.553.385)	(13,59)
Ekuitas Dana Investasi	38.458.064.530.396	36.823.793.142.648	1.634.271.387.748	4,44

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, CaLK menyajikan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana di neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	I PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	879,328,211,203,898	875,480,823,285,438	(3,837,387,908,460)	99.56
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	879,328,211,203,898	875,480,823,285,438	(3,837,387,908,460)	99.56
	a. Penerimaan Perpajakan	878,685,216,762,000	873,721,483,888,873	(4,963,732,875,127)	99.44
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	842,994,441,898	1,769,339,408,565	1,126,344,966,667	275.17
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI NON KAS	0	0	0	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan Non Kas	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00
	2. HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A I + A II)	879,328,211,203,898	875,480,823,285,438	(3,837,387,908,460)	99.56
B	BELANJA				
	I BELANJA TRANSAKSI KAS	17,346,872,669,000	16,086,286,744,832	(1,250,575,924,168)	92.78
	Belanja Pegawai	8,161,582,433,000	7,490,514,041,094	(671,068,391,906)	91.78
	Belanja Barang	6,316,762,685,000	5,273,800,802,790	(1,041,961,882,210)	83.50
	Belanja Modal	2,869,527,551,000	2,084,682,028,561	(784,845,521,439)	72.85
	Pembayaran Bunga Utang	0	1,247,399,871,387	1,247,399,871,387	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	II BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	4,036,475,457	4,036,475,457	0.00
	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00
	Belanja Barang Non Kas	0	4,036,475,457	4,036,475,457	0.00
	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0.00
	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00
	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00
	Hibah Non Kas	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	17,346,872,669,000	16,100,333,220,289	(1,246,539,448,711)	92.81
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C 1 + C 2)	0	0	0	0.00

Jakarta, Mei
Sekretaris Jenderal,

K.A. Badaruddin
NIP. 195703291978031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : 05 Mei 2012
Halaman : 1
Prog.Id : lu_pauait

No	URAIAN	2011				2010			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	879,328,211,203,898	875,490,823,295,438	(3,837,387,908,460)	99.56	741,914,748,104,240	708,714,294,939,841	(33,200,453,164,399)	95.53
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	879,328,211,203,898	875,490,823,295,438	(3,837,387,908,460)	99.56	741,914,748,104,240	708,714,294,939,841	(33,200,453,164,399)	95.53
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	878,685,216,762,000	873,721,483,886,873	(4,963,732,875,127)	99.44	741,325,906,000,000	707,727,023,639,992	(33,598,882,360,008)	95.47
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	642,994,441,898	1,769,339,408,565	1,126,344,966,667	275.17	588,842,104,240	987,271,299,849	398,429,195,609	167.66
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	2,000,000,000,000	14,817,135,656,211	12,817,135,656,211	740.86
A.II.1	PENERIMAAN NEGARA NON KAS	0	0	0	0.00	2,000,000,000,000	14,817,135,656,211	12,817,135,656,211	740.86
A.II.1.a	Penerimaan Perpajakan Non Kas	0	0	0	0.00	2,000,000,000,000	14,817,135,656,211	12,817,135,656,211	740.86
A.II.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.2	HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)	879,328,211,203,898	875,490,823,295,438	(3,837,387,908,460)	99.56	743,914,748,104,240	723,531,430,596,052	(20,383,317,508,188)	97.26
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI KAS	17,346,872,669,000	16,096,296,744,832	(1,250,575,924,168)	92.79	15,391,864,198,000	14,276,465,681,945	(1,115,398,516,055)	92.75
B.I.1	Rupiah Murni	17,183,692,670,000	15,986,719,279,081	(1,196,973,390,919)	93.03	14,889,567,737,000	14,139,098,194,409	(750,469,542,591)	94.96
B.I.1.a	Belanja Pegawai	8,161,582,433,000	7,490,514,041,094	(671,068,391,906)	91.78	7,626,567,848,000	7,177,469,494,589	(449,098,353,411)	94.11
B.I.1.b	Belanja Barang	6,209,251,588,000	5,214,425,020,769	(994,826,567,231)	83.98	4,959,584,320,000	3,841,312,464,257	(1,118,271,855,743)	77.45
B.I.1.c	Belanja Modal	2,812,858,649,000	2,034,380,345,831	(778,478,303,169)	72.32	2,303,415,569,000	1,798,829,023,586	(504,586,545,414)	78.09
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	1,247,399,871,387	1,247,399,871,387	0.00	0	1,321,487,211,977	1,321,487,211,977	0.00
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	163,179,999,000	109,577,465,751	(53,602,533,249)	67.15	502,296,461,000	137,367,487,536	(364,928,973,464)	27.35
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.b	Belanja Barang	106,511,097,000	59,375,782,021	(47,135,314,979)	55.75	202,409,239,000	86,243,612,425	(116,165,626,575)	42.61
B.I.2.c	Belanja Modal	56,668,902,000	50,201,683,730	(6,467,218,270)	88.59	299,887,222,000	51,123,875,111	(248,763,346,889)	17.05
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	4,036,475,457	4,036,475,457	0.00	0	0	0	0.00

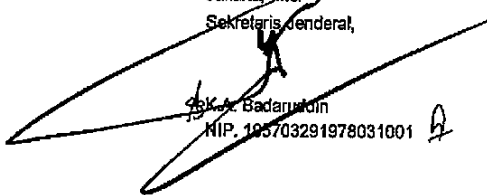
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 016 KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : 05 Mei 2012
Halaman : 2
Prog.Id : lu_pausit

No	URAIAN	2011				2010			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.II.1	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.II.2	Belanja Barang Non Kas	0	4,036,475,457	4,036,475,457	0,00	0	0	0	0,00
B.II.3	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.II.4	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.II.5	Subsidi Non Kas	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.II.6	Hibah Non Kas	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.II.7	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
B.II.8	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
JUMLAH BELANJA (B.II.1-8)		0	4,036,475,457	4,036,475,457	0,00	0	0	0	0,00
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.I.1-2)		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Jakarta, Mei
Sekretaris Jenderal,


Sek. Jend. Badarudin
NIP. 195703291978031001

III.NERACA

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: LSAIKB
Tanggal : 05/05/12
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,439,660,756
Kas di Bendahara Penerimaan	3,060,880,248
Kas Lainnya dan Setara Kas	8,115,195,871
Kas pada Badan Layanan Umum	2,168,961,124,597
Piutang Pajak	108,063,462,383,641
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak	(47,817,309,090,339)
Piutang Pajak (Netto)	60,246,153,293,302
Piutang Bukan Pajak	85,849,145,052
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(44,869,379,520)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	40,979,765,532
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	9,874,029,786
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(9,478,786,128)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	395,243,658
Uang muka belanja	26,926,848,502
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	14,938,119,944
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(95,448,100)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	14,842,671,844
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	22,027,746,408
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(553,181,649)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	21,474,564,759
Persediaan	282,731,013,941
Persediaan Badan Layanan Umum	1,107,526,185
JUMLAH ASET LANCAR	62,816,187,789,195
ASET TETAP	
Tanah	17,210,633,268,536
Peralatan dan Mesin	8,021,195,465,644
Gedung dan Bangunan	10,635,543,677,167
Jalan, Irigasi dan Jaringan	332,477,687,395
Aset Tetap Lainnya	21,169,879,443
Konstruksi Dalam Pengerjaan	698,283,768,910
Tanah Badan Layanan Umum	545,192,062,827
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	43,188,928,397
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	194,255,849,179
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	18,437,121,332
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	11,467,292,040
JUMLAH ASET TETAP	37,731,845,000,870
ASET LAINNYA	
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	26,443,698
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(132,218)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: LSAIKB
Tanggal : 05/05/12
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
<i>Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	26,311,480
Aset Tak Berwujud	474,893,975,396
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum	2,898,446,790
Aset Lain-lain	248,393,281,860
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	75,164,492,014
JUMLAH ASET LAINNYA	801,376,507,540
JUMLAH ASET	101,349,409,297,605
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga	17,174,929,541
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	704,320,653,776
Pendapatan Diterima di Muka	1,583,445,635
Uang Muka	4,155,000
Uang Muka dari KPPN	1,435,505,758
Pendapatan Yang Ditangguhkan	82,463,903,431
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	806,982,593,139
JUMLAH KEWAJIBAN	806,982,593,139
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Piutang	60,326,557,849,853
Cadangan Persediaan	283,838,540,126
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(717,825,069,672)
Dana Lancar BLU	2,168,961,124,597
Barang/Jasa Yang Harus Diterima	24,214,537,744
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(1,384,808,578)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	62,084,362,174,070
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	37,731,845,000,870
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	726,219,529,526
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	38,458,064,530,396
JUMLAH EKUITAS DANA	100,542,426,704,466
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	101,349,409,297,605

Jakarta, Mei
Sekretaris Jenderal,

K.A. Badarudin
NIP. 195703291978031001

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIKL
Tanggal : 05/05/12
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2011	2010	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,439,660,756	2,253,757,563	(814,096,807)	(36.12)
Kas di Bendahara Penerimaan	3,060,880,248	4,068,349,035	(1,007,468,787)	(24.76)
Kas Lainnya dan Setara Kas	8,115,195,871	2,149,709,248	5,965,486,623	277.50
Kas pada Badan Layanan Umum	2,168,961,124,597	1,085,722,227,076	1,083,238,897,521	99.77
Piutang Pajak	108,063,462,383,641	70,945,271,446,620	37,118,190,937,021	52.31
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak	(47,817,309,090,339)	0	(47,817,309,090,339)	0.00
<i>Piutang Pajak (Netto)</i>	<i>60,246,153,293,302</i>	<i>70,945,271,446,620</i>	<i>(10,699,118,153,318)</i>	<i>(15.08)</i>
Piutang Bukan Pajak	85,849,145,052	59,128,826,922	26,720,318,130	45.19
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(44,869,379,520)	0	(44,869,379,520)	0.00
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>40,979,765,532</i>	<i>59,128,826,922</i>	<i>(18,149,061,390)</i>	<i>(30.69)</i>
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	9,874,029,786	327,204,855	9,546,824,931	2,917.69
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(9,478,786,128)	0	(9,478,786,128)	0.00
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	<i>395,243,658</i>	<i>327,204,855</i>	<i>68,038,803</i>	<i>20.79</i>
Uang muka belanja	26,926,848,502	30,201,365,733	(3,274,517,231)	(10.84)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	14,938,119,944	1,800,000	14,936,319,944	**, ***, **
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(95,448,100)	0	(95,448,100)	0.00
<i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i>	<i>14,842,671,844</i>	<i>1,800,000</i>	<i>14,840,871,844</i>	<i>**, ***, **</i>
Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	22,027,746,408	6,146,237,068	15,881,509,340	258.39
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(553,181,649)	0	(553,181,649)	0.00
<i>Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)</i>	<i>21,474,564,759</i>	<i>6,146,237,068</i>	<i>15,328,327,691</i>	<i>249.39</i>
Persediaan	282,731,013,941	251,167,008,102	31,564,005,839	12.56
Persediaan Badan Layanan Umum	1,107,526,185	1,553,923,824	(446,397,639)	(28.72)
JUMLAH ASET LANCAR	62,816,187,789,195	72,387,991,856,046	(9,571,804,066,851)	(13.22)
ASET TETAP				
Tanah	17,210,633,268,536	17,154,828,794,908	55,804,473,628	0.32
Peralatan dan Mesin	8,021,195,465,644	7,306,062,037,508	715,133,428,136	9.78
Gedung dan Bangunan	10,635,543,677,167	9,880,476,902,813	755,066,774,354	7.64
Jalan, Irigasi dan Jaringan	332,477,687,395	316,775,657,845	15,702,029,550	4.95
Aset Tetap Lainnya	21,169,879,443	20,496,576,201	673,303,242	3.28
Konstruksi Dalam Pengerjaan	698,283,768,910	615,651,377,375	82,632,391,535	13.42
Tanah Badan Layanan Umum	545,192,062,827	545,192,062,827	0	0.00
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	43,188,928,397	31,697,703,142	11,491,225,255	36.25

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
Tanggal: 05/05/12
Halaman: 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2011	2010	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	194,255,849,179	144,672,506,225	49,583,342,954	34.27
Jalan,Irigasi, dan Jaringan Badan Layanan Umum	18,437,121,332	16,745,701,264	1,691,420,068	10.10
Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum	11,467,292,040	7,486,585,860	3,980,706,180	53.17
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	0	18,321,966,185	(18,321,966,185)	(100.00)
JUMLAH ASET TETAP	37,731,845,000,870	36,058,407,872,153	1,673,437,128,717	4.64
ASET LAINNYA				
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	26,443,698	5,402,005,376	(5,375,561,678)	(99.51)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(132,218)	0	(132,218)	0.00
<i>Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	<i>26,311,480</i>	<i>5,402,005,376</i>	<i>(5,375,693,896)</i>	<i>(99.51)</i>
Aset Tak Berwujud	474,893,975,396	360,495,002,682	114,398,972,714	31.73
Aset Tak Berwujud- Badan Layanan Umum	2,898,446,790	808,658,790	2,089,788,000	258.42
Aset Lain-lain	248,393,281,860	548,617,378,647	(300,224,096,787)	(54.72)
Aset Lain-lain-Badan Layanan Umum	75,164,492,014	70,416,164,384	4,748,327,630	6.74
JUMLAH ASET LAINNYA	801,376,507,540	985,739,209,879	(184,362,702,339)	(18.70)
JUMLAH ASET	101,349,409,297,605	109,432,138,938,078	(8,082,729,640,473)	(7.38)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	17,174,929,541	202,520,284,203	(185,345,354,662)	(91.51)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	704,320,653,776	329,105,858,431	375,214,795,345	114.01
Pendapatan Diterima di Muka	1,583,445,635	1,657,970,182	(74,524,547)	(4.49)
Uang Muka	4,155,000	4,155,000	0	0.00
Uang Muka dari KPPN	1,435,505,756	2,249,602,563	(814,096,807)	(36.18)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	82,463,903,431	76,340,422,596	6,123,480,835	8.02
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	806,982,593,139	611,878,292,975	195,104,300,164	31.88
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	0	149,937,775,000	(149,937,775,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	149,937,775,000	(149,937,775,000)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	806,982,593,139	761,816,067,975	45,166,525,164	5.92
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	60,326,557,849,853	71,010,875,515,466	(10,684,317,665,613)	(15.04)
Cadangan Persediaan	283,838,540,126	252,720,931,926	31,117,608,200	12.31
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(717,825,069,672)	(531,332,342,563)	(186,492,727,109)	35.09
Dana Lancar BLU	2,168,961,124,597	1,085,722,227,076	1,083,238,897,521	99.77
Barang/Jasa Yang Harus Diterima	24,214,537,744	30,201,365,732	(5,986,827,988)	(19.82)
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(1,384,808,578)	(1,657,970,182)	273,161,604	(16.47)

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
Tanggal : 05/05/12
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenalkan (Penurunan)	
	2011	2010	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	62,084,362,174,070	71,846,529,727,455	(9,762,167,553,385)	(13.58)
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	37,731,845,000,870	36,058,407,872,153	1,673,437,128,717	4.64
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	726,219,529,526	915,323,045,495	(189,103,515,969)	(20.65)
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0	(149,937,775,000)	149,937,775,000	(100.00)
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	38,458,064,530,396	36,823,793,142,648	1,634,271,387,748	4.43
JUMLAH EKUITAS DANA	100,542,426,704,466	108,670,322,870,103	(8,127,896,165,637)	(7.47)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	101,349,409,297,605	109,432,138,938,078	(8,082,729,640,473)	(7.38)

Jakarta, Mei
Sekretaris Jenderal,

K.A. Badaruddin
NIP. 495703291978031001

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (*Audited*) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-Pungutan Lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan

Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Instruksi Presiden RI No. 12 tahun 1975 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Karya, Kontrak *Production Sharing* dan kegiatan Pertamina sendiri;
17. Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali PPN dan PPnBM Atas Perolehan BKP dan atau JKP yang Digunakan Oleh BU atau BUT Dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007 tentang Modul Penerimaan Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/KM.05/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.011/2008 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang berasal dari Pengenaan Denda

Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
38. Keputusan Menteri Keuangan No.766/KMK.04/1992 tentang Tatacara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Bagian Pemerintah, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pungutan-Pungutan Lainnya atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
39. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-07/PB/2005 tentang Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran;
40. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-38/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
41. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
42. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-48/PB/2006 tentang SP3;
43. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-67/PB/2006 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengesahan atas Realisasi Hibah Luar Negeri Pemerintah yang Dilaksanakan Secara Langsung;
44. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-69/PB/2006 tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan;
45. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara;
46. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-02/PB/2007 tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
47. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan

Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;

48. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan BAS;
49. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-62/PB/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
50. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-65/PB.05/2010 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
51. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga;
52. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-90/PB/2011 tentang Rekonsilias Data Transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
53. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-58/BC/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
54. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN KEUANGAN

A.2.1. Visi Kementerian Keuangan

Visi Kementerian Keuangan adalah **menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara yang dipercaya dan akuntabel untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.**

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan **pengelola keuangan dan kekayaan negara** adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan kekayaan negara. **Dipercaya** adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. **Akuntabel** adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktik terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.

A.2.2. Misi Kementerian Keuangan

Untuk merealisasikan **visi** yang telah ditetapkan, maka Kementerian Keuangan memiliki **misi**:

1. **Misi fiskal** adalah mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (*prudent*), dan bertanggung jawab;
2. **Misi kekayaan negara** adalah mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggung jawab;
3. **Misi pasar modal dan lembaga keuangan** adalah mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non-bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global;
4. **Misi penguatan kelembagaan** adalah:
 - i. Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - ii. Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab;
 - iii. Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya.

A.2.3. Tujuan Kementerian Keuangan

Guna mengaktualisasikan visi dan misi tersebut, maka Kementerian Keuangan menetapkan tujuan pencapaian organisasi sebagai berikut:

1.	Tujuan 1	: Meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat;
2.	Tujuan 2	: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja negara untuk mendukung penyelenggaraan tugas K/L dan pelaksanaan desentralisasi fiskal;

3.	Tujuan 3	: Mewujudkan kapasitas pembiayaan yang mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal;
4.	Tujuan 4	: Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan negara;
5.	Tujuan 5	: Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;
6.	Tujuan 6	: Membangun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

A.2.4. Sasaran Strategis

a. Sasaran strategis dalam **tema pendapatan negara** adalah:

1. Tingkat pendapatan yang optimal;

Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN- P.

2. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal;

Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi diukur berdasarkan hasil survey kepuasan *stakeholder* oleh lembaga independen. Hasil survey yang positif akan meningkatkan citra Kementerian Keuangan di mata *stakeholder*.

3. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi.

Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai terhadap peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya menunjukkan potensi pendapatan pajak, kepabeanan, dan cukai.

b. Sasaran strategis dalam **tema belanja negara**:

1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel;

- Alokasi belanja negara yang tepat sasaran adalah alokasi anggaran yang dapat mencapai kinerja program dan kegiatan kementerian negara/lembaga yang telah ditetapkan dalam APBN;

- Alokasi belanja negara yang tepat waktu adalah pengesahan DIPA yang dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan;

- Alokasi belanja negara yang efisien adalah penugasan anggaran pada DIPA yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan;

- Alokasi belanja negara yang akuntabel adalah alokasi belanja negara yang proporsional sesuai dengan prioritas rencana kerja pemerintah dan dapat

dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

2. Tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara;

- Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan belanja negara sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah pengelolaan belanja Negara yang dilakukan secara terbuka sehingga proses pengelolaannya dapat diketahui oleh stakeholder dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Perimbangan keuangan adalah pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan Pusat dan daerah yang dapat menjamin keseimbangan keuangan terkait dengan besarnya beban, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki oleh pusat maupun daerah sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Tata kelola yang tertib adalah pengelolaan transfer ke daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Transparan adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*;
- Akuntabel adalah pelaksanaan kebijakan transfer ke daerah dapat dipertanggungjawabkan.

c. Sasaran strategis dalam **tema pembiayaan APBN** adalah:

1. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien;

Memenuhi target pembiayaan APBN melalui utang yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri, dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan Pinjaman, dengan mempertimbangkan biaya dan risiko untuk mendukung kesinambungan fiskal.

2. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel;

Tersedianya informasi terkait pengelolaan utang kepada publik secara transparan dan akurat, dan terjaganya kredibilitas pengelolaan utang dengan melakukan pembayaran kewajiban secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

3. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal;

Mengoptimalkan struktur jatuh tempo SBN dengan memperhatikan jenis,

tingkat bunga dan tenor, serta kondisi pasar keuangan.

4. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

Mengembangkan pasar SBN dengan menyediakan alternatif instrumen SBN yang variatif serta meningkatkan sebaran investor.

d. Sasaran strategis dalam **tema perbendaharaan negara** adalah:

1. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara;

Penyaluran belanja negara untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan secara akurat dan tepat waktu berarti pelaksanaan penyaluran belanja dilakukan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan.

2. Optimalisasi pengelolaan kas;

Optimalisasi pengelolaan kas negara meliputi perencanaan kas, pengendalian kas, dan pemanfaatan *idle* kas yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup.

Optimalisasi pengelolaan kas negara adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi pengelolaan kas dengan mengedepankan prinsip "meminimumkan biaya" dan "memaksimalkan manfaat" bila terjadi kekurangan kas (*cash mismatch*) atau pemanfaatan kelebihan kas (*idle cash*).

3. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya;

Salah satu bagian dari pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya adalah pengembalian penerusan pinjaman. Dana penerusan pinjaman tersebut harus dioptimalkan pengembalian dan penyetorannya kembali ke APBN sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pengembalian dana tersebut mempunyai kontribusi dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri dan penerimaan defisit APBN.

4. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU;

Melalui penyempurnaan regulasi terkait dengan pengelolaan BLU, peningkatan penilaian kinerja satker BLU serta pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU akan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja keuangan pada satker BLU, sehingga selanjutnya akan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;

Salah satu kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah melalui penerapan akuntansi pemerintah modern sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sampai dengan saat ini LKPP yang telah disusun masih berdasarkan basis Kas Menuju Akrua. Selanjutnya, secara bertahap LKPP akan disusun berdasarkan akrua basis sehingga diharapkan akan terwujud peningkatan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta peningkatan opini BPK (dari Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian) melalui LKPP yang lebih berkualitas.

6. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal, dan terpadu.

Untuk menciptakan sistem perbendaharaan negara yang modern, handal, dan terpadu mulai tahun anggaran 2009 telah dilaksanakan proyek penyempurnaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang dikenal dengan Proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

- e. Sasaran strategis dalam **tema kekayaan negara** adalah:

1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal;

Mengkoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan *asset idle* kementerian dan lembaga dalam rangka perencanaan pengadaan belanja modal dari kementerian dan lembaga serta penghematan penggunaan anggaran dengan mengoptimalkan BMN *idle* yang ada di kementerian dan lembaga.

2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel;

Penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di kementerian dan lembaga sebagai pengguna dan di Kementerian Keuangan sebagai pengelola.

3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip *the highest and best use*;

Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal seluruh BMN untuk mendukung penyelenggaraan tupoksi penyelenggaraan negara.

4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara;

Pelayanan pengelolaan kekayaan negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

5. Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel.

Mendapatkan, mengumpulkan, dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan bagi pimpinan Kementerian Keuangan.

- f. Sasaran strategis dalam **tema pasar modal dan lembaga keuangan non bank** adalah:

1. Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional;

2. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien, dan kompetitif;

3. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana

- investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal;
4. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, *resilience*, dan *liquid*;
 5. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (*fairness and transparency*);
 6. Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan, dan berstandar internasional.
- g. Sasaran strategis pembelajaran dan pertumbuhan dalam menunjang pencapaian tujuan strategis 6 tema pokok adalah:
1. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi;
Sistem rekrutmen yang kredibel dan pengembangan SDM yang tertata dan berkelanjutan diharapkan menghasilkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi dalam mengelola keuangan negara.
 2. Terwujudnya organisasi yang handal dan modern;
Pengembangan organisasi dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing unit organisasi dan SOP yang dimiliki, yaitu:
 - Fungsi unit organisasi merupakan fungsi yang telah disusun berdasarkan keputusan menteri keuangan;
 - SOP (*Standar Operating Procedure*) adalah standar yang dijadikan panduan bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan sehingga akan memberikan kepastian mengenai apa yang harus dilaksanakan, waktu penyelesaian, dan biaya (bila ada biaya). SOP yang disusun harus memenuhi prinsip efisiensi.
 3. Terwujudnya *good governance*;
Good governance adalah terciptanya tata kelola pemerintahan dalam menerapkan prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, *responsiveness*, responsibilitas, efektivitas, dan efisien).
 4. Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi;
Sistem informasi/aplikasi yang ada di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan diupayakan terintegrasi didukung dengan kualitas layanan infrastruktur yang prima.
 5. Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan.
Sasaran strategis ini terkait dengan *product/service* yang dihasilkan oleh Inspektorat Jenderal yang difokuskan pada hasil pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Kementerian Keuangan melalui asistensi, monitoring, dan *review* penyusunan laporan keuangan pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

A.2.5. Program dan Kegiatan Kementerian Keuangan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJM Nasional 2010–2014, Kementerian Keuangan menetapkan 12 (dua belas) program.

REALISASI DIPA PER PROGRAM KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011

KODE	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
101	Program Dukungan dan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	6,910,441,708,000	5,944,779,991,119	86.03
103	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	102,690,573,000	93,378,485,326	90.93
104	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan	440,143,341,000	395,611,883,212	89.88
106	Program Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank	199,236,145,000	144,015,521,035	72.28
107	Program Pengelolaan Anggaran Negara	123,126,257,000	114,440,377,131	92.95
108	Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	139,950,000,000	114,841,707,160	82.06
109	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	1,484,566,434,000	1,384,608,667,754	93.27
110	Program Pengelolaan Kekayaan Negara Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	653,148,000,000	543,435,757,547	83.20
111	Program Perumusan Kebijakan Fiskal	185,396,997,000	137,324,066,313	74.07
112	Program Pengamanan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	4,921,494,700,000	5,395,460,592,226	109.63
113	Program Pengawasan Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabean dan Cukai	2,074,536,058,000	1,725,440,804,848	83.17
114	Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang	112,142,456,000	106,995,366,618	95.41
Jumlah		17,346,872,669,000	16,100,333,220,289	92.81

Capaian Kinerja

Kementerian Keuangan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja pada Tahun Anggaran 2011 antara Menteri Keuangan dengan Presiden. Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (*strategy map*) dengan 16 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU Kementerian Keuangan pada tahun 2011 untuk semua SS berjumlah 36 IKU.

Peta strategi merupakan suatu *dashboard (panel instrument)* yang memetakan SS ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi Kementerian Keuangan. Peta strategi memudahkan Kementerian Keuangan untuk mengomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Keuangan.

Peta strategi Kementerian Keuangan memetakan setiap SS yang disusun dalam

rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *Balanced Scorecard*, setiap SS dikelompokkan ke dalam empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customers perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari perspektif stakeholder, terdapat 7 SS Kementerian Keuangan yang disusun untuk mewujudkan pendapatan negara, pelaksanaan belanja, utilisasi kekayaan negara, hubungan keuangan pusat-daerah yang optimal, pembiayaan dalam jumlah yang cukup, aman dan efisien bagi kesinambungan fiskal, pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, dan industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang stabil, tahan uji, dan likuid. Dari perspektif *customer* terdapat 1 (satu) SS Kementerian Keuangan yaitu tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi.

Dari perspektif proses internal Kementerian Keuangan, untuk mendukung pencapaian SS Kementerian Keuangan pada dua *layer stakeholders perspective* dan *customers perspective* tersebut diperlukan adanya tiga faktor penting berupa perumusan, pengelolaan dan pengembangan, serta pengawasan dan pengembangan hukum terhadap *core business* Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, proses internal yang dimaksud terkait dengan kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas, pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang efektif dan efisien, peningkatan edukasi masyarakat dan pelaku ekonomi, serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Sedangkan dari perspektif *learning and growth*, terdapat empat faktor penting yang harus dikelola dengan baik guna menciptakan modal utama untuk mencapai tujuan organisasi yaitu faktor pengembangan sumber daya manusia, organisasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan pengelolaan anggaran.

Sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2011, dari 36 IKU Depkeu-Wide terdapat 31 IKU berstatus hijau, 5 IKU berstatus kuning, dan tidak ada IKU berstatus merah. Adapun 3 IKU yang berstatus kuning tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (non belanja pegawai); Realisasi sebesar 78,46 persen dari target yang diharapkan sebesar 80,00 persen. Terdapat 4 unit eselon I yang tidak mencapai target, yaitu Setjen, DJP, DJKN, dan BKF. Beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut adalah:
 - a. Keterlambatan penyelesaian anggaran blokir;
 - b. Kegagalan pengadaan barang dan jasa.
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan. Realisasi sebesar 3,87 (angka terbobot) dari target 3,92 merupakan rata-rata indeks kepuasan atas 9 unit eselon I yang memberikan layanan kepada pihak eksternal Kemenkeu, yaitu:

Unit	Target	Realisasi
Setjen	3.92	3.79
DJA	3.87	3.81
DJP	3.9	3.8
DJBC	3.8	3.65
DJPU	3.87	4.02
DJPK	4	4.01
DJPB	4.1	4.03
DJKN	4.04	3.95
BAPEPAM	3.73	3.8

Laporan capaian kinerja Kementerian Keuangan secara lengkap terlampir.

*Pendapatan***PENDAPATAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

Realisasi Pendapatan Kementerian Keuangan TA 2011 adalah sebesar **Rp875.490.823.295.438,00** atau 99,56 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2011 sebesar **Rp879.328.211.203.898,00**. Dibandingkan dengan TA 2010, Realisasi Pendapatan TA 2011 mengalami kenaikan sebesar **Rp151.959.392.699.395,00** atau 21,0 persen.

*Belanja***BELANJA KEMENTERIAN KEUANGAN**

Realisasi Belanja Kementerian Keuangan pada TA 2011 adalah sebesar **Rp16.100.333.220.289,00** (termasuk didalamnya realisasi belanja imbalan bunga yang tidak tersedia pagu anggarannya dalam DIPA sebesar **Rp1.247.399.871.387,00**) atau 92,81 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar **Rp17.346.872.669.000,00**.

Sedangkan realisasi belanja tanpa imbalan bunga sebesar **Rp14.739.319.407.694,00** atau 85,78 persen dari anggarannya. Realisasi Belanja TA 2011 mengalami kenaikan sebesar **Rp1.823.867.538.344,00** atau 12,78 persen dari realisasi belanja TA 2010 sebesar **Rp14.276.465.681.945,00**.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Keuangan, termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah Kementerian Keuangan seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Kementerian Keuangan disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan TA 2011 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar **Rp17.346.872.669.000,00** meliputi:

- Satuan kerja kantor pusat (KP) termasuk 1 satker BLU PIP sebesar **Rp11.697.335.183.000,00** dan melaksanakan pengelolaan *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan sebesar Rp1 Triliun.
- Satuan kerja kantor daerah (KD) termasuk 1 satker BLU STAN sebesar **Rp5.649.537.486.000,00**.

Dari total anggaran di atas, rincian anggaran satuan kerja BLU adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Jumlah Satker	Jenis Sumber Dana	
		APBN	BLU
2010	2	70.698.528.000	44.799.935.000
2011	2	83.471.637.000	53.222.987.000

Jumlah satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan adalah 1.070 satker. Dari jumlah tersebut terdapat 2 satker pada DJP yang tidak mengelola DIPA yaitu KP2KP Sumber Cirebon dan KP2KP Majalengka sehingga tidak menyampaikan laporan keuangan. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Rekapitulasi Satker yang Menyampaikan Laporan Keuangan Menurut Eselon 1

Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
		KP		KD		DK		TP		
		M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
01	Sekretariat Jenderal	9	-	22	-	-	-	-	-	31
02	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	-	-	-	-	1
03	Ditjen Anggaran	1	-	-	-	-	-	-	-	1
04	Ditjen Pajak	1	-	568	2	-	-	-	-	571
05	Ditjen Bea dan Cukai	5	-	138	-	-	-	-	-	143
06	Ditjen Perimbangan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1
07	Ditjen Pengelolaan Utang	1	-	-	-	-	-	-	-	1
08	Ditjen Perbendaharaan	3	-	208	-	-	-	-	-	211
09	Ditjen Kekayaan Negara	1	-	87	-	-	-	-	-	88
10	Bapepam-LK	1	-	-	-	-	-	-	-	1
11	BPPK	1	-	19	-	-	-	-	-	20
12	BKF	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	26	-	1042	2	-	-	-	-	1070

Keterangan:

M = Menyampaikan LK

TM = Tidak menyampaikan LK

Selain memperoleh dana dari DIPA BA 015 Kementerian Keuangan juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.07 (Belanja Subsidi) sebesar [Rp263.454.227.314.000,00](#) dan dari BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar [Rp57.974.380.000,00](#).

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan penggabungan laporan realisasi anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca;

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci, atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan di neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Jumlah satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan adalah 1.070 satker. Dari jumlah tersebut terdapat 2 satker pada DJP yang tidak mengelola DIPA yaitu KP2KP Sumber Cirebon dan KP2KP Majalengka, sehingga tidak menyampaikan laporan barang. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Rekapitulasi Satker yang Menyampaikan Laporan Barang Menurut Eselon 1

Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
		KP		KD		DK		TP		
		M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
01	Sekretariat Jenderal	9	-	22	-	-	-	-	-	31
02	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	-	-	-	-	1
03	Ditjen Anggaran	1	-	-	-	-	-	-	-	1
04	Ditjen Pajak	1	-	568	2	-	-	-	-	571
05	Ditjen Bea dan Cukai	5	-	138	-	-	-	-	-	143
06	Ditjen Perimbangan Keuangan	1	-	-	-	-	-	-	-	1
07	Ditjen Pengelolaan Utang	1	-	-	-	-	-	-	-	1
08	Ditjen Perbendaharaan	3	-	208	-	-	-	-	-	211
09	Ditjen Kekayaan Negara	1	-	87	-	-	-	-	-	88
10	Bapepam-LK	1	-	-	-	-	-	-	-	1
11	BPPK	1	-	19	-	-	-	-	-	20
12	BKF	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	26	-	1042	2	-	-	-	-	1070

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Barang

TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK TA 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKTL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kementerian Keuangan adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan;

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar

dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja;

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, adapun di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar;

Aset lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih piutang setelah dikurangi cadangan penyisihan piutang.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak, Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet.

Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas lancar apabila:

- a. belum jatuh tempo;
- b. telah jatuh tempo tetapi belum diberitahukan Surat Paksa; atau
- c. telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.

Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila:

- a. telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut;
- b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
- c. telah diberitahukan Surat Paksa; atau
- d. telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:

- a. telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- b. sedang diajukan keberatan atau banding;
- c. Wajib Pajak Non Efektif (NE);
- d. hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan belum diusulkan untuk dihapuskan.

Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas macet apabila:

- a. hak penagihannya telah daluwarsa; atau
- b. hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah diusulkan untuk dihapuskan.

Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 5‰ (lima permil) dari piutang pajak dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan;
- c. 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan; dan
- d. 100% (seratus persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-58/BC/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Direktorat

Jenderal Bea Dan Cukai pasal 11 ayat (3), penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Jatuh tempo piutang; dan
- b. Upaya penagihan.

Penilai kualitas piutang dilakukan dengan cara mengelompokkan piutang berdasarkan:

- a. Umur piutang;
- b. Status debitur;
- c. Status proses pelimpahan penagihan piutang.

sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

Kualitas piutang ditetapkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Lancar, ditetapkan apabila umur piutang belum lebih dari 1 tahun;
2. Kurang lancar, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
3. Diragukan, ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
4. Macet, ditetapkan apabila:
 - a. umur piutang lebih dari 3 tahun;
 - b. proses penagihan telah dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan/atau
 - c. kondisi debitur:
 - i. orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
 - ii. bubar, likuidasi, atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan; dan
 - iii. tidak memiliki harta kekayaan lagi.

Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Berdasarkan PMK 201/PMK.06/2010, Piutang PNBPN dikelompokkan menjadi kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. Kualitas lancar apabila sejak tanggal terjadinya transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo (diterbitkannya Surat Tagihan Pertama)

belum dibayar, piutang lancar disisihkan lima permil dari total piutang. Piutang kurang lancar apabila satu bulan sejak Surat Tagihan Pertama diterbitkan belum dibayar, piutang kurang lancar disisihkan sepuluh persen dari total piutang. Piutang diragukan apabila satu bulan sejak Surat Tagihan Kedua diterbitkan belum dibayar, piutang diragukan disisihkan lima puluh persen dari total piutang. Piutang macet apabila satu bulan sejak Surat Tagihan Ketiga diterbitkan belum dibayar atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN, piutang macet disisihkan seratus persen dari total piutang.

Berdasarkan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang menyatakan bahwa Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh melalui pembelian,
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang, ditujukan dalam rangka manajemen kas, dan berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak

termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya, investasi dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dana pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk surat berharga pada BUMN terjadi dalam rangka penyelamatan perekonomian.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada

tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Kementerian Keuangan per 31 Desember 2010 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.

Berdasarkan Buletin Teknis 09 tentang akuntansi aset tetap menyatakan bahwa pengakuan aset tetap renovasi yang telah selesai pada akhir periode pelaporan harus segera diserahkan kepada satker kuasa pengguna barang. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan atau aset renovasi belum diserahkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan Kementerian Keuangan selaku entitas pelaporan akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Aset Tetap Renovasi yang belum selesai pada akhir periode pelaporan maka Aset Tetap Renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan Kementerian Keuangan selaku entitas pelaporan akan mencatat dan menambahkannya sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap terkait.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Kelolaan BLU, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset

pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Selain itu kebijakan mengenai aset lain diatur dalam PMK Nomor: 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang pada Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih, antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (1) poin d. Angka 2 menyatakan bahwa Piutang yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara digolongkan dalam kualitas macet.
- b. Pasal 6 ayat (3) poin c. PMK tersebut menyatakan bahwa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas piutang macet dibentuk "Penyisihan Piutang Tidak Tertagih" sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan Piutang PNBPN pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Dana Kelolaan BLU adalah bagian dari dana yang disediakan pada PIP, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum direalisasikan sebagai pinjaman kepada pihak lain atau belum diinvestasikan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (NETTO)**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Keuangan pada TA 2011 adalah sebesar **Rp875.490.823.295.438,00** atau **99,56** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2011 sebesar **Rp879.328.211.203.898,00**.

Realisasi Belanja Negara Kementerian Keuangan pada TA 2011 adalah sebesar **Rp16.100.333.220.289,00** atau **92,81** persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN TA 2011 sebesar **Rp17.346.872.669.000,00**.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2011

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	879.328.211.203.898	875.490.823.295.438	99,56
	Penerimaan Perpajakan	878.685.216.762.000	873.721.483.886.873	99,44
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	642.994.441.898	1.769.339.408.565	275,17
2	Realisasi Belanja Negara	17.346.872.669.000	16.100.333.220.289	92,81
	Belanja Rupiah Murni	17.183.692.670.000	15.989.004.397.277	93,05
	Belanja Pinjaman dan Hibah LN	163.179.999.000	111.328.823.012	68,22

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (BRUTO)**B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah**

*Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah Bruto
TA 2011 Rp
921.305.040.398.56
6,00*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Keuangan Bruto pada TA 2011 adalah sebesar **Rp921.305.040.398.566,00** atau **104,77** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2011 sebesar **Rp879.328.211.203.898,00**. Dibandingkan dengan TA 2010, realisasi pendapatan TA 2011 mengalami kenaikan sebesar **Rp157.067.210.640.125,00** atau **20,55** persen. Adapun kenaikan ini berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar **Rp156.284.968.859.198,00** yang terdiri dari kenaikan Pendapatan Pajak Dalam Negeri **Rp131.079.082.342.708,00** dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional **Rp25.205.886.516.490,00**.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 4 dan Grafik 1 berikut.

Tabel 4
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto TA 2011

(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Penerimaan Perpajakan	878.685.216.762.000	919.535.334.390.961	104,65
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	831.745.348.636.000	864.852.313.423.677	103,98
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	46.939.868.126.000	54.683.020.967.284	116,50
Penerimaan Negara Bukan Pajak	642.994.441.898	1.769.706.007.605	275,23
Jumlah	879.328.211.203.898	921.305.040.398.566	104,77

Grafik 1
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto TA 2011
(dalam jutaan rupiah)



Perbandingan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 dan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto TA 2011 dan 2010

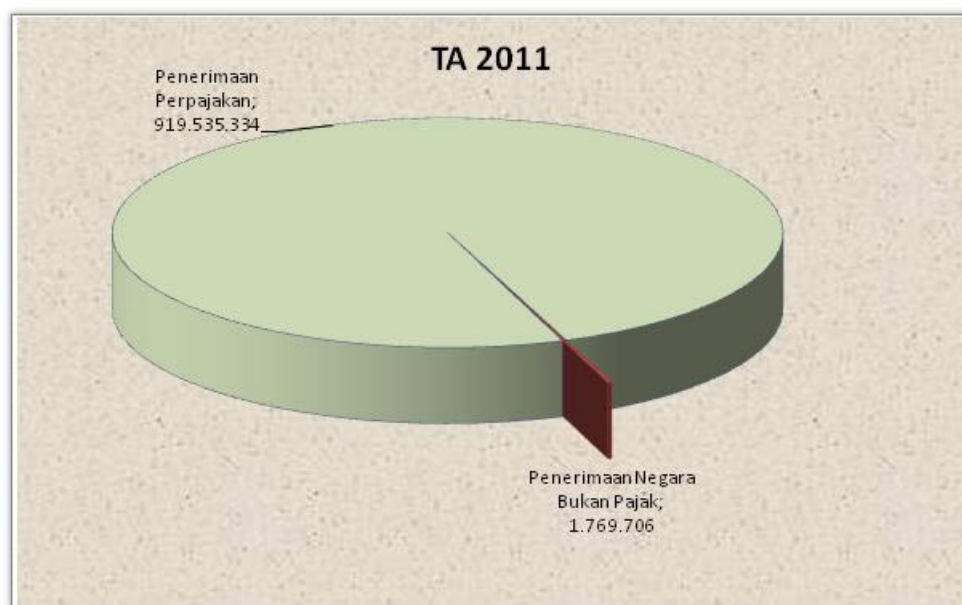
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Penerimaan Perpajakan	919.535.334.390.961	763.250.365.531.763	156.284.968.859.198	20,48
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	864.852.313.423.677	733.773.231.080.969	131.079.082.342.708	17,86
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	54.683.020.967.284	29.477.134.450.794	25.205.886.516.490	85,51
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.769.706.007.605	987.464.226.678	782.241.780.927	79,22
Jumlah	921.305.040.398.566	764.237.829.758.441	157.067.210.640.125	20,55

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 2 berikut.

Grafik 2
Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Bruto TA 2011

(dalam jutaan rupiah)



B.2.1.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Unit Eselon I Bruto

Realisasi pendapatan per unit eselon I bruto lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6
Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I Bruto TA 2011
(dalam rupiah)

No.	Eselon I	Estimasi	Realisasi	%
1	SETJEN	315.801.420.000	1.117.542.025.073	353,87
2	ITJEN	68.000.000	689.682.757	1.014,24
3	DJA	0	1.590.391.042	0,00
4	DJP	763.675.661.804.933	787.850.521.116.699	103,17
5	DJBC	115.221.087.899.000	132.018.505.593.198	114,58
6	DJPK	0	396.576.933	0,00
7	DJPU	0	52.632.970	0,00
8	DJPB	1.906.319.965	6.077.092.117	318,79
9	DJKN	94.575.760.000	198.829.805.704	210,23
10	BAPEPAM-LK	0	95.072.195.602	0,00
11	BPPK	19.110.000.000	14.545.418.124	76,11
12	BKF	0	1.217.868.347	0,00
	JUMLAH	879.328.211.203.898	921.305.040.398.566	104,77

Perbandingan realisasi pendapatan per unit eselon I bruto TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Unit Eselon I Bruto TA 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

NO.	ESELON I	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
1	SETJEN	1.117.542.025.073	415.752.233.550	701.789.791.523	168,80
2	ITJEN	689.682.757	161.981.008	527.701.749	325,78
3	DJA	1.590.391.042	133.530.975	1.456.860.067	1.091,03
4	DJP	787.850.521.116.699	667.612.639.469.364	120.237.881.647.335	18,01
5	DJBC	132.018.505.593.198	95.920.277.966.861	36.098.227.626.337	37,63
6	DJPK	396.576.933	366.345.425	30.231.508	8,25
7	DJPU	52.632.970	30.394.135	22.238.835	73,17
8	DJPB	6.077.092.117	6.113.004.047	(35.911.930)	(0,59)
9	DJKN	198.829.805.704	183.291.874.933	15.537.930.771	8,48
10	BAPEPAM-LK	95.072.195.602	74.178.888.729	20.893.306.873	28,17
11	BPPK	14.545.418.124	24.552.718.377	(10.007.300.253)	(40,76)
12	BKF	1.217.868.347	331.351.037	886.517.310	267,55
	JUMLAH	921.305.040.398.566	764.237.829.758.441	157.067.210.640.125	20,55

B.2.1.2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per Jenis Penerimaan Bruto

Pendapatan Kementerian Keuangan terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan; dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Komposisi realisasi pendapatan bruto TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8
Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan Bruto TA 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi Bruto	%
Penerimaan Perpajakan	878.685.216.762.000	915.535.334.390.961	104,19
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	831.745.348.636.000	864.852.313.423.677	103,98
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	46.939.868.126.000	54.683.020.967.284	116,50
Penerimaan Negara Bukan Pajak	642.994.441.898	1.769.706.007.605	275,23
Jumlah	879.328.211.203.898	921.305.040.398.566	104,77

Perbandingan realisasi pendapatan per jenis penerimaan TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Pendapatan Per Jenis Penerimaan Bruto TA 2011 dan 2010
 (dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Penerimaan Perpajakan	919.535.334.390.961	763.250.365.531.763	156.284.968.859.198	20,48
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	864.852.313.423.677	733.773.231.080.969	131.079.082.342.708	17,86
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	54.683.020.967.284	29.477.134.450.794	25.205.886.516.490	85,51
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.769.706.007.605	987.464.226.678	782.241.780.927	79,22
Jumlah	921.305.040.398.566	764.237.829.758.441	157.067.210.640.125	20,55

Realisasi
 Penerimaan
 Perpajakan Bruto
 Rp
 919.535.334.390.961,00

B.2.1.2.1. Penerimaan Perpajakan Bruto

Penerimaan Perpajakan berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Realisasi Penerimaan Perpajakan Bruto TA 2011 adalah sebesar Rp919.535.334.390.961,00 atau 104,19 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2011 sebesar Rp878.685.216.762.000,00. Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp156.284.968.859.198,00 atau 20,48 persen dari realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2010. Kenaikan Penerimaan Perpajakan terutama terjadi pada Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp73.618.245.238.290,00, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp53.430.202.363.360,00, Pendapatan Cukai sebesar Rp10.841.851.748.383,00, dan Pendapatan Bea Keluar sebesar Rp20.018.182.255.277,00.

Realisasi Penerimaan Perpajakan per jenis penerimaan bruto TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10
Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Bruto TA 2011
 (dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	%
Penerimaan Perpajakan	878.685.216.762.000	919.535.334.390.961	45.813.850.504.088	873.721.483.886.873	104,65
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	831.745.348.636.000	864.852.313.423.677	45.125.929.017.883	819.726.384.405.794	103,98
Pendapatan PPh	431.977.019.922.000	443.889.249.274.293	12.780.598.096.532	431.108.651.177.761	102,76
Pendapatan PPN	298.441.393.727.000	310.055.796.794.287	32.263.710.525.245,00	277.792.086.269.042	103,89
Pendapatan PBB	29.057.780.000.000	29.900.911.038.417	9.218.833.354,00	29.891.692.205.063	102,90
Pendapatan BPHTB	0	0	730.151.679,00	(730.151.679)	-
Pendapatan Cukai	68.075.339.103.000	77.010.348.958.180	3.820.585.340,00	77.006.528.372.840	113,13
Pendapatan Pajak Lainnya	4.193.815.884.000	3.996.007.358.500	67.850.825.733,00	3.928.156.532.767	95,28
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	46.939.868.126.000	54.683.020.967.284	687.921.486.205	53.995.099.481.079	116,50
Pendapatan Bea Masuk	21.500.792.207.000	25.729.831.343.200	586.812.093.834,00	25.143.019.249.366	119,67
Pendapatan Bea Keluar	25.439.075.919.000	28.953.189.624.084	101.109.392.371,00	28.852.080.231.713	113,81

Perbandingan realisasi Penerimaan Perpajakan Bruto TA 2011 dan 2010 per Jenis Penerimaan dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Bruto
TA 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

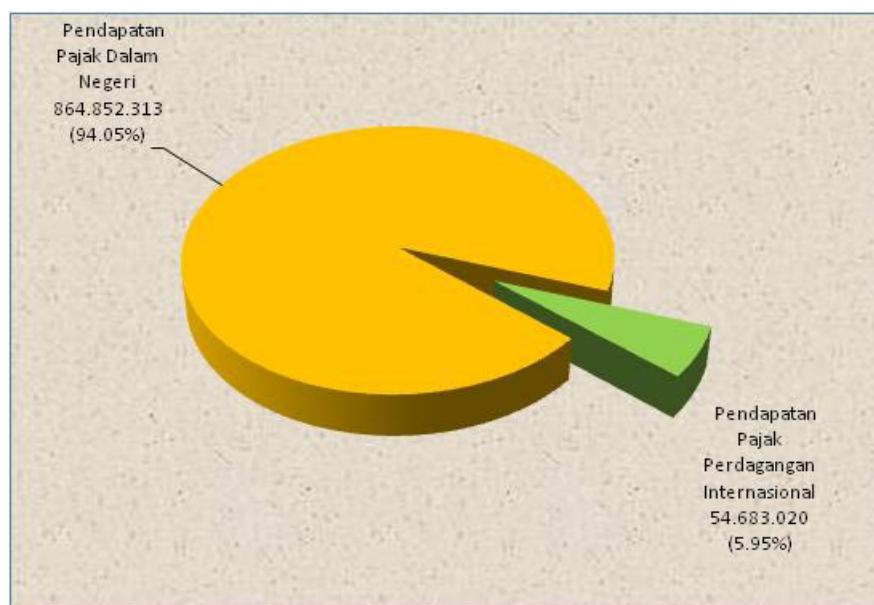
Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Penerimaan Perpajakan	919.535.334.390.961	763.250.365.531.763	156.284.968.859.198	20,48
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	864.852.313.423.677	733.773.231.080.969	131.079.082.342.708	17,86
Pendapatan PPh	443.889.249.274.293	370.271.004.036.003	73.618.245.238.290	19,88
Pendapatan PPN	310.055.796.794.287	256.625.594.430.927	53.430.202.363.360	20,82
Pendapatan PBB	29.900.911.038.417	28.596.227.374.901	1.304.683.663.516	4,56
Pendapatan BPHTB	0	8.051.639.534.905	(8.051.639.534.905)	(100,00)
Pendapatan Cukai	77.010.348.958.180	66.168.497.209.797	10.841.851.748.383	16,39
Pendapatan Pajak Lainnya	3.996.007.358.500	4.060.268.494.436	(64.261.135.936)	(1,58)
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	54.683.020.967.284	29.477.134.450.794	25.205.886.516.490	85,51
Pendapatan Bea Masuk	25.729.831.343.200	20.542.127.081.987	5.187.704.261.213	25,25
Pendapatan Bea Keluar	28.953.189.624.084	8.935.007.368.807	20.018.182.255.277	224,04

Komposisi realisasi Penerimaan Perpajakan Bruto TA 2011 per jenis penerimaan dapat dilihat pada Grafik 3 berikut.

Grafik 3

Komposisi Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Jenis Penerimaan Bruto TA 2011

(dalam jutaan rupiah)



Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2011 adalah sebesar **Rp864.852.313.423.677,00** yang berarti mengalami kenaikan sebesar **Rp131.079.082.342.708,00** atau **17,86** persen dibanding realisasi TA 2010 yang besarnya **Rp733.773.231.080.978,00**.

Sedangkan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 adalah sebesar **Rp54.683.020.967.284,00**. Dibandingkan dengan TA 2010, realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 mengalami kenaikan sebesar **Rp25.205.886.516.490,00** atau **85,51** persen.

*Pemindahbukuan
(Pbk) Penerimaan
Pajak*

Untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang menghendaki pembayaran pajaknya melalui perhitungan dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau bunga yang diterima dan/atau melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain, Kementerian Keuangan mengatur tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan, Pemindahbukuan meliputi:

- Pemindahbukuan karena adanya kelebihan pembayaran pajak atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak atau surat keputusan lainnya yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- Pemindahbukuan karena adanya pemberian bunga kepada Wajib Pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Pemindahbukuan karena diperolehnya kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) yang semula diadministrasikan dalam Berbagai-macam Penerimaan Pajak (BPP).
- Pemindahbukuan karena salah mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain.
- Pemindahbukuan karena adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari Surat Setoran Pajak.
- Pemindahbukuan karena adanya pelimpahan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/ 1990 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden.

Pemindahbukuan yang terjadi selama TA 2011 adalah sebesar Rp1.863.389.245.204,00. Nilai tersebut merupakan pemindahbukuan yang disebabkan oleh perubahan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) dan bukan merupakan pelunasan tunggakan pajak. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud belum terakomodasi dalam nilai penerimaan perpajakan dalam laporan keuangan dikarenakan belum ada Peraturan dalam Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak (TUPRP) yang mengatur pemindahbukuan berdasarkan data MPN. Perubahan terhadap TUPRP (saat ini masih mengacu pada KEP-11/PJ./1994) masih dalam proses pembahasan.

B.2.1.2.1.1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto

*Realisasi
Pendapatan Pajak
Dalam Negeri
Bruto
Rp
864.852.313.423.67
7,00*

Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2011 adalah sebesar Rp864.852.313.423.677,00 atau 103,98 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2011 sebesar Rp831.745.348.636.000,00. Hal ini berarti Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp131.079.082.342.708,00 atau naik 17,86 persen dari realisasi TA 2010.

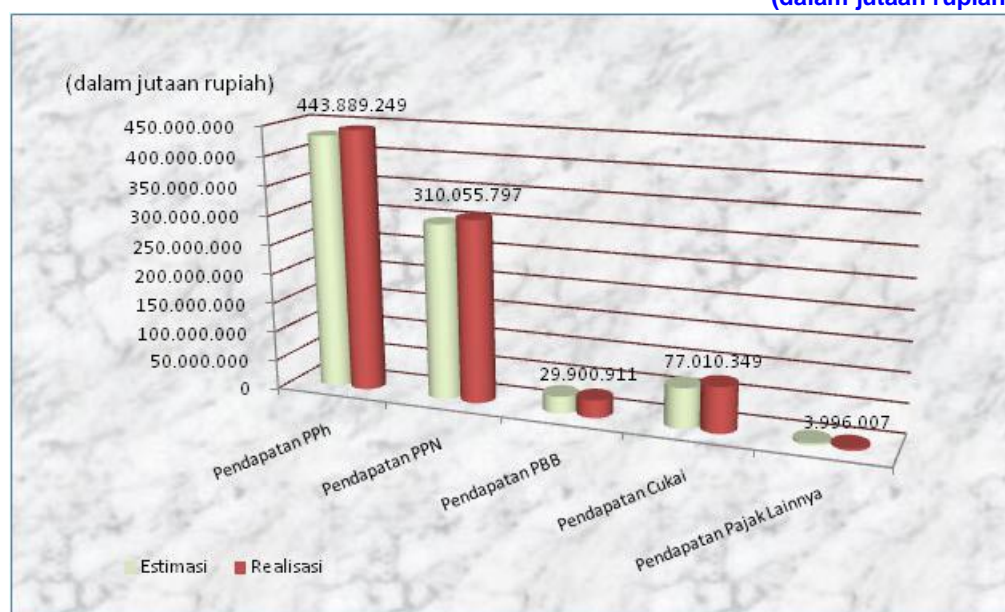
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 12 dan Grafik 4 berikut.

Tabel 12
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2011
 (dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	831.745.348.636.000	864.852.313.423.677	103,98
Pendapatan PPh	431.977.019.922.000	443.889.249.274.293	102,76
Pendapatan PPN	298.441.393.727.000	310.055.796.794.287	103,89
Pendapatan PBB	29.057.780.000.000	29.900.911.038.417	102,90
Pendapatan Cukai	68.075.339.103.000	77.010.348.958.180	113,13
Pendapatan Pajak Lainnya	4.193.815.884.000	3.996.007.358.500	95,28

Grafik 4
Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2011

(dalam jutaan rupiah)

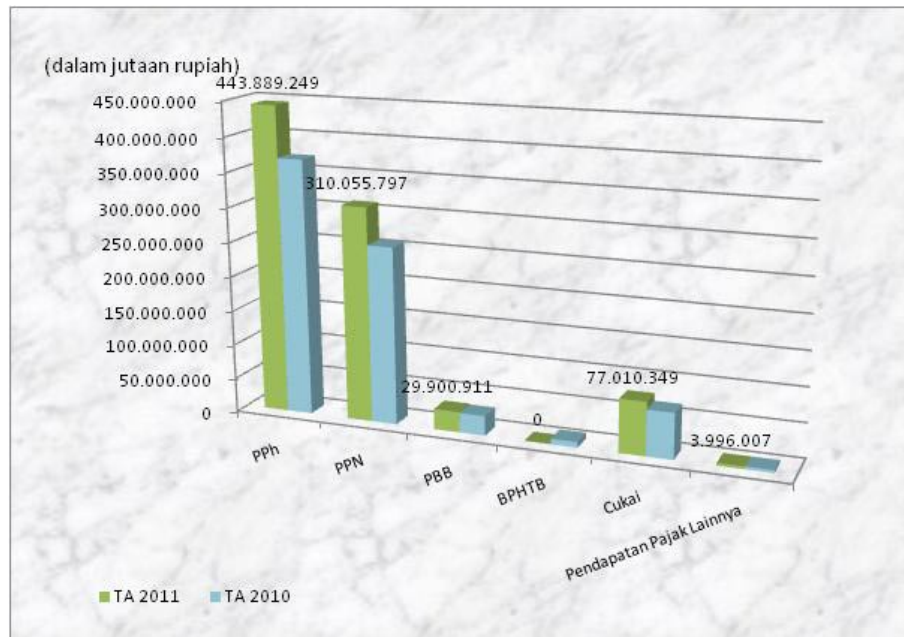


Perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 13 dan Grafik 5 berikut.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto
TA 2011 dan 2010
 (dalam rupiah)

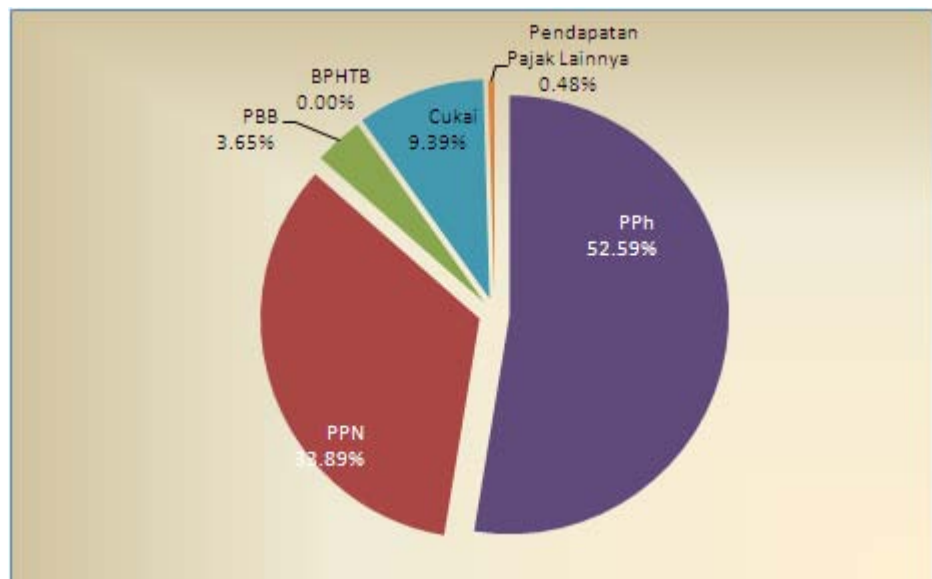
Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	864.852.313.423.677	733.773.231.080.969	131.079.082.342.708	17,86
PPh	443.889.249.274.293	370.271.004.036.003	73.618.245.238.290	19,88
PPN	310.055.796.794.287	256.625.594.430.927	53.430.202.363.360	20,82
PBB	29.900.911.038.417	28.596.227.374.901	1.304.683.663.516	4,56
BPHTB	0	8.051.639.534.905	(8.051.639.534.905)	(100,00)
Cukai	77.010.348.958.180	66.168.497.209.797	10.841.851.748.383	16,39
Pendapatan Pajak Lainnya	3.996.007.358.500	4.060.268.494.436	(64.261.135.936)	(1,58)

Grafik 5
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2011 dan 2010
 (dalam jutaan rupiah)



Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 6 berikut.

Grafik 6
Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri Bruto TA 2011



Jika dibandingkan dengan TA 2010, Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami kenaikan, diantaranya disebabkan oleh kenaikan Pendapatan PPh sebesar Rp73.618.245.238.290,00 atau 19,88 persen, kenaikan Pendapatan PPN sebesar Rp53.430.202.363.360, atau 20,82 persen dan Pendapatan Bea Keluar Rp20.018.182.255.277 atau 224,04 persen. Kenaikan PPh terdapat pada PPh Migas

dikarenakan adanya pertumbuhan positif pada penerimaan yang berasal dari penerimaan PPh Minyak Bumi dan Gas Alam berupa kenaikan harga minyak dunia. Untuk Penerimaan PPN dan PPnBM terdapat pertumbuhan positif walaupun terjadi kenaikan dalam nilai restitusi selama Tahun Anggaran 2011. Untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan *mapping, profiling, benchmarking* dan *feeding* terhadap Wajib Pajak;
2. Pengawasan terhadap 1000 Wajib Pajak penentu penerimaan di masing-masing KPP Pratama;
3. Pengawasan terhadap seluruh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;
4. Pengawasan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT);
5. Penambahan jumlah Wajib Pajak;
6. Reformasi di bidang administrasi, reformasi di bidang perundang-undangan dan reformasi di bidang penggalan potensi;
7. Upaya *extra effort* yang dilakukan berupa: himbauan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan dan penyidikan.

Adapun Penerimaan BPHTB mengalami penurunan karena BPHTB telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah setempat pada TA 2011 sesuai dengan PER-47/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah. Sesuai PER-47/PJ/2010 tersebut kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011 dengan persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

Realisasi Pendapatan Cukai TA 2011 sebesar Rp77.010.348.958.180,00 juga mengalami kenaikan sebesar Rp10.841.851.748.383,00 atau 16,39 persen dari realisasi TA 2010. Kenaikan Pendapatan Cukai disebabkan karena peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai 1 Januari 2011 sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/011/2009 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Selain itu juga karena kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau dan efektivitas pengawasan peredaran MMEA melalui pelekatan pita cukai.

Realisasi
Pengembalian
Pendapatan Pajak
Dalam Negeri
Rp45.125.372.025.1
90,00

Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Dalam Negeri TA 2011 adalah sebesar Rp45.125.929.017.883,00. Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Dalam Negeri TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14
Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Dalam Negeri
TA 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	45.125.929.017.883	40.143.890.012.173	4.982.039.005.710	12,41
PPH	12.780.598.096.532	13.436.235.101.134	(655.637.004.602)	(4,88)
PPN	32.263.710.525.245	26.573.530.758.781	5.690.179.766.464	21,41
PBB	9.218.833.354	15.261.194.396	(6.042.361.042)	(39,59)
BPHTB	730.151.679	24.871.140.517	(24.140.988.838)	(97,06)
Cukai	3.820.585.340	2.579.470.205	1.241.115.135	48,12
Pendapatan Pajak Lainnya	67.850.825.733	91.412.347.140	(23.561.521.407)	(25,77)

B.2.1.2.1.2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto

Realisasi
Pendapatan Pajak
Perdagangan
Internasional Bruto
Rp54.683.020.967.284,00

Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto TA 2011 adalah sebesar Rp54.683.020.967.284,00 atau 116,50 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2011 sebesar Rp46.939.868.126.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Bea Masuk Rp25.729.831.343.200,00 atau 119,67 persen dari target yang ditetapkan dan Pendapatan Bea Keluar sebesar Rp28.953.189.624.084,00 atau 113,81 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini berarti Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp25.205.886.516.490,00 atau 85,51 persen dari realisasi TA 2010. Besarnya realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional dapat dilihat pada Tabel 15 berikut.

Tabel 15
Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto TA 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	46.939.868.126.000	54.683.020.967.284	116,50
Pendapatan Bea Masuk	21.500.792.207.000	25.729.831.343.200	119,67
Pendapatan Bea Keluar	25.439.075.919.000	28.953.189.624.084	113,81

Perbandingan realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 16 berikut.

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Bruto
TA 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	54.683.020.967.284	29.477.134.450.794	25.205.886.516.490	85,51
Pendapatan Bea Masuk	25.729.831.343.200	20.542.127.081.987	5.187.704.261.213	25,25
Pendapatan Bea Keluar	28.953.189.624.084	8.935.007.368.807	20.018.182.255.277	224,04

Pendapatan Bea Masuk ditentukan oleh beberapa variabel antara lain: **Nilai Devisa Bayar**, **Tarif Efektif Rata-rata** dan **Nilai Tukar Rupiah atau Kurs**. Ketiga variabel tersebut berbanding lurus terhadap peningkatan nilai pendapatan Bea Masuk. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan meningkatkan Devisa Bayar yang akan berdampak positif bagi peningkatan pendapatan Bea Masuk. Namun demikian terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan dampak penurunan terhadap penerimaan, yaitu antara lain: adanya komitmen perdagangan internasional, dimana Indonesia terikat perjanjian dengan negara-negara lain di bidang liberalisasi perdagangan. Kesepakatan seperti: ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), IJEPA dengan Jepang dan ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA), berdampak pada penurunan tarif, demikian pula adanya berbagai fasilitas perdagangan dan industri yang diberikan pemerintah dalam rangka mendorong peningkatan daya saing.

Variabel lain yang mempengaruhi penerimaan Bea Masuk adalah Nilai tukar Rupiah/kurs terhadap US\$, yang menjadi salah satu variabel Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM). Faktor nilai tukar rupiah akan berpengaruh terhadap penerimaan Bea Masuk, dimana nilai tukar rupiah yang tinggi cenderung meningkatkan Bea Masuk, namun disisi lain dapat mempengaruhi tingkat importasi, yang berdampak negatif terhadap tingkat penerimaan Bea Masuk. Terjadinya penurunan Tarif Efektif rata-rata dan nilai tukar Rupiah akan sangat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan Bea Masuk.

Realisasi Pendapatan Bea Masuk selama TA 2011 tercatat sebesar **Rp25.729.831.343.200,00** atau **119,67** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2011 sebesar **Rp21.500.792.207.000,00**. Hal ini berarti Pendapatan Bea Masuk TA 2011 mengalami kenaikan sebesar **Rp5.187.704.261.213,00** atau **25,25** persen dari realisasi TA 2010.

Kenaikan Pendapatan Bea Masuk pada TA 2011 tersebut disebabkan oleh meningkatnya importasi yang ditunjukkan dengan naiknya *Dutiable impor* sebesar US\$30,46 Miliar atau 27.6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dimana nilai *Dutiable Import* tahun 2011 sebesar US\$140,83 Miliar sedangkan Tahun 2010 sebesar US\$110,37 Miliar. Meningkatnya *Dutiable Impor* menunjukkan perekonomian nasional yang cukup kondusif, ditunjukkan dengan menguatnya nilai tukar rupiah pada Tahun 2011 sebesar Rp8.775,21 per US\$1, dibandingkan pada Tahun 2010 sebesar Rp9.099,85 per US\$1. Disamping itu tingkat pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2011 sebesar 6,5 persen yang cukup tinggi serta tingkat Inflasi yang terkendali sebesar 5,6 persen lebih rendah dari asumsi makro sebesar 6 persen turut memberi kontribusi meningkatnya importasi.

Tujuan pengenaan Bea Keluar sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 antara lain adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional atau menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Pengenaan Bea Keluar terhadap beberapa komoditi ekspor tidak semata-mata ditujukan untuk menghimpun penerimaan negara tetapi ada tujuan lain sebagaimana disebutkan di atas. Saat ini komoditi ekspor yang dikenakan Bea Keluar adalah ekspor komoditi CPO dan turunannya, kayu, kulit, rotan, dan biji kakao.

Realisasi Pendapatan Bea Keluar selama TA 2011 tercatat sebesar **Rp28.953.189.624.084,00** atau **113,81** persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2011 sebesar **Rp25.439.075.919.000,00**. Tingginya tingkat pencapaian Bea Keluar disebabkan tarif Bea Keluar atas ekspor CPO dan turunannya selama periode TA 2011 sangat tinggi berkisar 17,5-25 persen, demikian juga harga patokan ekspornya (HPE) cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar US\$1.122/ton, angka ini lebih tinggi dari asumsi pada saat penyusunan APBN 2011 yang mana tarifnya diperkirakan rata-rata 4,5 persen dan HPE-nya, rata-rata US\$830/ton.

Dibandingkan dengan TA 2010, Pendapatan Bea Keluar TA 2011 mengalami kenaikan sebesar **Rp20.018.182.255.277,00** atau **224,04** persen dari realisasi TA 2010. Kenaikan Pendapatan Bea Keluar pada Tahun 2011 antara lain disebabkan:

- Terdapat kenaikan tarif Bea Keluar CPO pada Tahun 2011, dimana pada Tahun 2011 tarif CPO rata-rata sebesar 18 persen, sedangkan pada Tahun 2010 hanya sebesar 4,5 persen;
- Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO dan Turunannya relatif mengalami kenaikan, hal ini sebagai dampak meningkatnya harga CPO di pasar Internasional, dimana HPE CPO tahun 2010 rata-rata US \$ 779 per ton dan HPE CPO tahun 2011 rata-rata US \$ 1.070.50 per ton (terjadi kenaikan sebesar 37,42 persen);
- Volume Ekspor CPO dan Turunannya pada Tahun 2011 mengalami kenaikan, dimana pada Tahun 2011 rata-rata Ekspor bulanan sebesar 1.889 juta ton sedangkan pada Tahun 2010 sebesar 1.543 Juta ton (terjadi kenaikan sebesar 22,42 persen).

Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 adalah sebesar **Rp687.921.486.205,00**. Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 17 berikut.

Realisasi
Pengembalian
Pendapatan Pajak
Perdagangan
Internasional
Rp687.921.486.205,
00

Tabel 17
Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
TA 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	687.921.486.205	562.316.223.396	125.605.262.809	22,34
Pendapatan Bea Masuk	586.812.093.834	525.357.337.486	61.454.756.348	11,70
Pendapatan Bea Keluar	101.109.392.371	36.958.885.910	64.150.506.461	173,57

Realisasi
Penerimaan Negara
Bukan Pajak Bruto
Rp1.769.706.007.605,00

B.2.1.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bruto)

Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari (i) Pendapatan PNBPN Lainnya; dan (ii) Pendapatan Badan Layanan Umum. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bruto TA 2011 adalah sebesar Rp1.769.706.007.605,00 atau 275,23 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2011 sebesar Rp642.994.441.898,00. Besarnya realisasi PNBPN TA 2011 dapat dilihat dalam Tabel 18 berikut.

Tabel 18
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto TA 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan PNBPN Lainnya	308.114.621.898	648.141.204.416	210,36
Pendapatan BLU	334.879.820.000	1.121.564.803.189	334,92
Jumlah	642.994.441.898	1.769.706.007.605	275,23

Apabila dibandingkan dengan TA 2010, PNBPN TA 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp782.241.780.927,00 atau 79,22 persen dari realisasi TA 2010. Kenaikan PNBPN ini terjadi pada pos-pos PNBPN yaitu PNBPN Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp87.423.213.208,00 atau 15,59 persen dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mengalami kenaikan sebesar Rp694.818.567.719,00 atau 162,82 persen.

Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 19 dan Grafik 7 berikut.

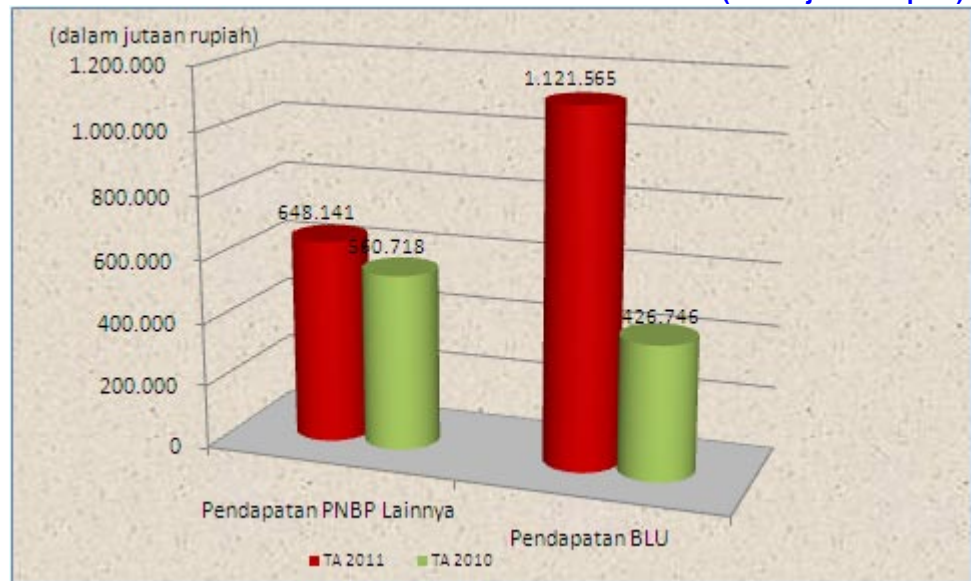
Tabel 19
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto
TA 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan PNBPN Lainnya	648.141.204.416	560.717.991.208	87.423.213.208	15,59
Pendapatan BLU	1.121.564.803.189	426.746.235.470	694.818.567.719	162,82
Jumlah	1.769.706.007.605	987.464.226.678	782.241.780.927	79,22

Grafik 7
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto
TA 2011 dan 2010

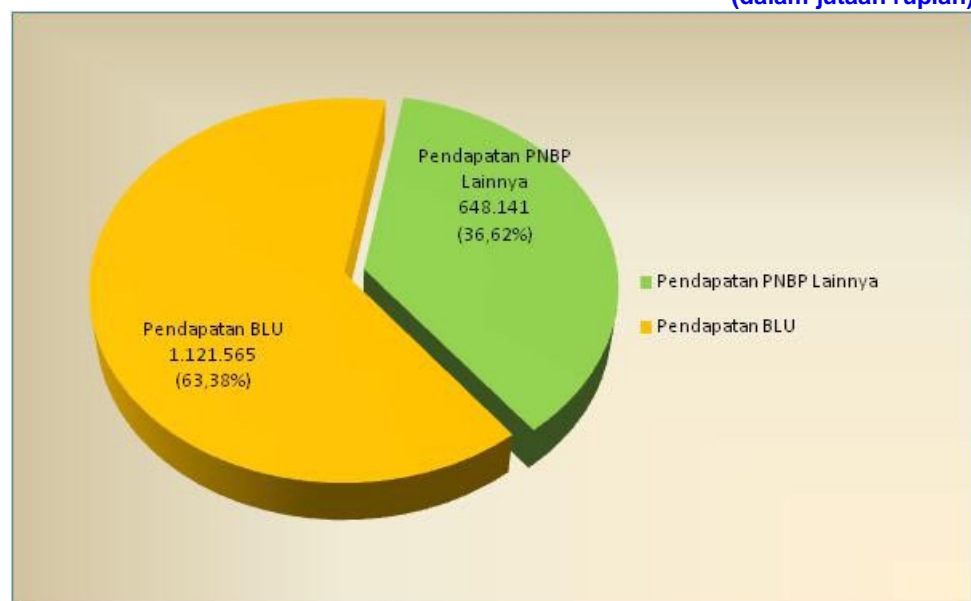
(dalam jutaan rupiah)



Komposisi realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 8 berikut.

Grafik 8
Komposisi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bruto TA 2011

(dalam jutaan rupiah)



Realisasi
Pendapatan PNB
Lainnya
Bruto Rp648.141.20
4.416,00

B.2.1.2.2.1. Pendapatan PNB Lainnya Bruto

Realisasi Pendapatan PNB Lainnya Bruto TA 2011 adalah sebesar Rp648.141.204.416,00 atau 210,36 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN TA 2011, yaitu sebesar Rp308.114.621.898,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2010, Pendapatan PNB Lainnya TA 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp87.423.213.208,00 atau 15,59 persen dari realisasi TA 2010. Besarnya realisasi Pendapatan PNB Lainnya dapat dilihat pada Tabel 20 berikut.

Tabel 20
Realisasi Pendapatan PNB Lainnya Bruto TA 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Penjualan dan Sewa	2.145.970.762	37.537.226.245	1.749,20
Pendapatan Jasa	303.540.183.400	486.164.070.905	160,16
Pendapatan Bunga	0	16.021.292	0,00
Pendapatan Hasil Denda	0	506.880	0,00
Pendapatan Pendidikan	0	227.918.000	0,00
Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	0	8.600.000	0,00
Pendapatan Iuran dan Denda	5.314.683	105.887.365.290	1.992.355,24
Pendapatan Lain-lain	2.423.153.053	18.299.495.804	755,19
Jumlah	308.114.621.898	648.141.204.416	210,36

Perbandingan realisasi Pendapatan PNB Lainnya Bruto TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 21 berikut.

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Pendapatan PNB Lainnya Bruto
TA 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Penjualan dan Sewa	37.537.226.245	38.885.635.772	(1.348.409.527)	(3,47)
Pendapatan Jasa	486.164.070.905	416.383.040.771	69.781.030.134	16,76
Pendapatan Bunga	16.021.292	72.592.848	(56.571.556)	(77,93)
Pendapatan Hasil Denda	506.880	0	506.880	0,00
Pendapatan Pendidikan	227.918.000	194.991.000	32.927.000	16,89
Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	8.600.000	59.035.000	(50.435.000)	(85,43)
Pendapatan Iuran dan Denda	105.887.365.290	80.427.887.461	25.459.477.829	31,66
Pendapatan Lain-lain	18.299.495.804	24.694.808.356	(6.395.312.552)	(25,90)
Jumlah	648.141.204.416	560.717.991.208	87.423.213.208	15,59

Jika dibandingkan dengan TA 2010, terjadi kenaikan realisasi Pendapatan PNB Lainnya sebesar Rp87.423.213.208,00 atau 15,59 persen. Kenaikan yang signifikan terutama terjadi pada Pendapatan Jasa sebesar Rp69.781.030.134,00 atau 16,76 persen terutama disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Bea Lelang sebesar Rp17.166.739.830,00. Selain itu terdapat kenaikan Pendapatan Iuran dan Denda sebesar Rp25.459.477.829,00 atau 31,66 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

(423713) sebesar Rp17.477.031.621,00. Kenaikan tersebut akibat adanya kenaikan pendapatan usaha Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta kenaikan pendapatan denda pelanggaran di bidang pasar modal.

Realisasi
Pengembalian
Pendapatan PNPB
Lainnya
Rp366.599.040,00

Realisasi Pengembalian Pendapatan PNPB Lainnya TA 2011 adalah sebesar Rp366.599.040,00. Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan PNPB Lainnya TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Pengembalian Pendapatan PNPB Lainnya
TA 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Penjualan dan Sewa	158.674.456	3.838.000	154.836.456	4.034,30
Pendapatan Jasa	205.683.239	184.417.089	21.266.150	11,53
Pendapatan Iuran dan Denda	0	4.426.000	(4.426.000)	(100,00)
Pendapatan Lain-lain	2.241.345	245.740	1.995.605	812,08
Jumlah	366.599.040	192.926.829	173.672.211	90,02

Realisasi
Pendapatan BLU
Bruto
Rp1.121.564.803.189,00

B.2.1.2.2.2. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Bruto

Realisasi Pendapatan BLU Bruto TA 2011 adalah sebesar Rp1.121.564.803.189,00 atau 334,92 persen dari target yang ditetapkan dalam DIPA TA 2011 yaitu sebesar Rp334.879.820.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2010, Pendapatan BLU TA 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp694.818.567.719,00 atau 162,82 persen dari realisasi TA 2010.

Rincian Realisasi Pendapatan BLU yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 23 berikut.

Tabel 23
Realisasi Pendapatan BLU Bruto TA 2011

(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	199.439.675.000	60.856.130.119	30,51
Pendapatan Hibah BLU	85.000.000	0	0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	2.500.000.000	4.107.070.000	164,28
Pendapatan BLU Lainnya	132.855.145.000	1.056.601.603.070	795,30
Jumlah	334.879.820.000	1.121.564.803.189	334,92

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU Bruto TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 24 berikut.

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU Bruto TA 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	60.856.130.119	107.672.070.738	(46.815.940.619)	(43,48)
Pendapatan Hibah BLU	0	1.825.000	(1.825.000)	(100,00)
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	4.107.070.000	2.794.642.023	1.312.427.977	46,96
Pendapatan BLU Lainnya	1.056.601.603.070	316.277.697.709	740.323.905.361	234,07
Jumlah	1.121.564.803.189	426.746.235.470	694.818.567.719	162,82

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011 mencakup 2 (dua) unit satker Badan Layanan Umum (BLU), yaitu Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan TA 2010, Realisasi Pendapatan BLU TA 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp694.818.567.719,00 atau 162,82 persen. Namun terdapat penurunan Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp46.815.940.619,00 atau 43,48 persen. Penurunan ini disebabkan:

1. Penerimaan USM STAN Tahun 2011 hanya membuka program Diploma I untuk jurusan Akuntansi Perpajakan dan Kepabeanan dan Cukai sedangkan penerimaan USM STAN 2010 membuka program Diploma III untuk jurusan yang lebih beragam.
2. Jadwal pelaksanaan USM STAN Tahun 2011 yang mundur sehingga banyak lulusan SMA/SMK sudah melanjutkan pendidikan di universitas lainnya.
3. Adanya penurunan jumlah peserta USM STAN, yaitu pada Tahun 2010 sebanyak 113.857 peserta sementara pada Tahun 2011 hanya 42.515 peserta.
4. Penerimaan mahasiswa baru untuk Tahun 2011 hanya 1.586 mahasiswa sementara penerimaan mahasiswa Tahun 2010 sebanyak 3.295 mahasiswa.

Adapun kenaikan Pendapatan BLU Lainnya sebesar Rp740.323.905.361,00 atau 234,07 persen disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 mengenai Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan dinyatakan bahwa Pusat Investasi Pemerintah melaksanakan pengelolaan *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan sampai dengan BLU yang bersangkutan terbentuk. Pencairan *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan sebesar Rp1 triliun telah dilaksanakan per 30 Desember 2010. Dana tersebut ditransfer ke Rekening Pokok DPPN di Bank BRI Nomor 0329-01-002840-30-0 dan langsung disimpan dalam bentuk deposito pada Bank Rakyat Indonesia dengan bunga di muka sebesar Rp70 miliar. Bunga yang telah diterima disimpan kembali dalam bentuk deposito dengan bunga dan jasa giro sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp5.156.978.015,00 yang ditampung dalam Rekening Giro Pendapatan DPPN pada Bank BRI Nomor Rekening 0329-01-002840-30-1. Total jasa giro dari Dana Pendidikan sebesar Rp1 triliun adalah Rp75.156.978.015,00 masih merupakan Pendapatan yang Ditangguhkan, dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2011 belum terdapat pengesahan dari KPPN.

Berdasarkan PMK No. 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan telah dibentuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. Mulai TA 2012, seluruh Dana Pendidikan yang dikelola Pusat Investasi Pemerintah dialihkan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Realisasi Pendapatan BLU Bruto berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Tabel 25 berikut.

Tabel 25
Realisasi Pendapatan BLU Bruto TA 2011 Berdasarkan Satuan Kerja
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	0	1.108.581.372.364	0,00
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	19.104.000.000	12.983.430.825	67,96
Jumlah	19.104.000.000	1.121.564.803.189	5.870,84

*Realisasi
Pengembalian
Pendapatan BLU
Rp0,00*

Tidak terdapat Realisasi Pengembalian Pendapatan BLU TA 2011 dan 2010.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

*Realisasi
Penerimaan Hibah
Rp0,00*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah, yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mewakili Pemerintah dalam pencatatan Penerimaan Hibah adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, oleh karena itu di dalam Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 ini tidak ada Penerimaan Hibah.

B.2.2. BELANJA

*Realisasi Belanja Bruto
Rp16.125.999.666.457,00*

Realisasi Belanja Kementerian Keuangan Bruto pada TA 2011 adalah sebesar **Rp16.125.999.666.457,00** atau **92,96** persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar **Rp17.346.872.669.000,00**. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja transaksi kas sebesar **Rp16.121.963.191.000,00** dan belanja transaksi non kas sebesar **Rp4.036.475.457,00**, yang berasal dari belanja hibah langsung jasa luar negeri. Realisasi belanja TA 2011 mengalami kenaikan sebesar **Rp1.827.857.371.956,00** atau **12,78** persen dari realisasi belanja bruto TA 2010 sebesar **Rp14.298.142.294.501,00**. Realisasi belanja tersebut termasuk belanja pembayaran imbalan bunga sebesar **Rp1.247.399.871.387,00**. Apabila angka ini dikeluarkan maka realisasi belanja Kementerian Keuangan (tidak memperhitungkan pengembalian belanja) adalah sebesar **Rp14.878.599.795.070,00** atau **85,77** persen dari pagu.

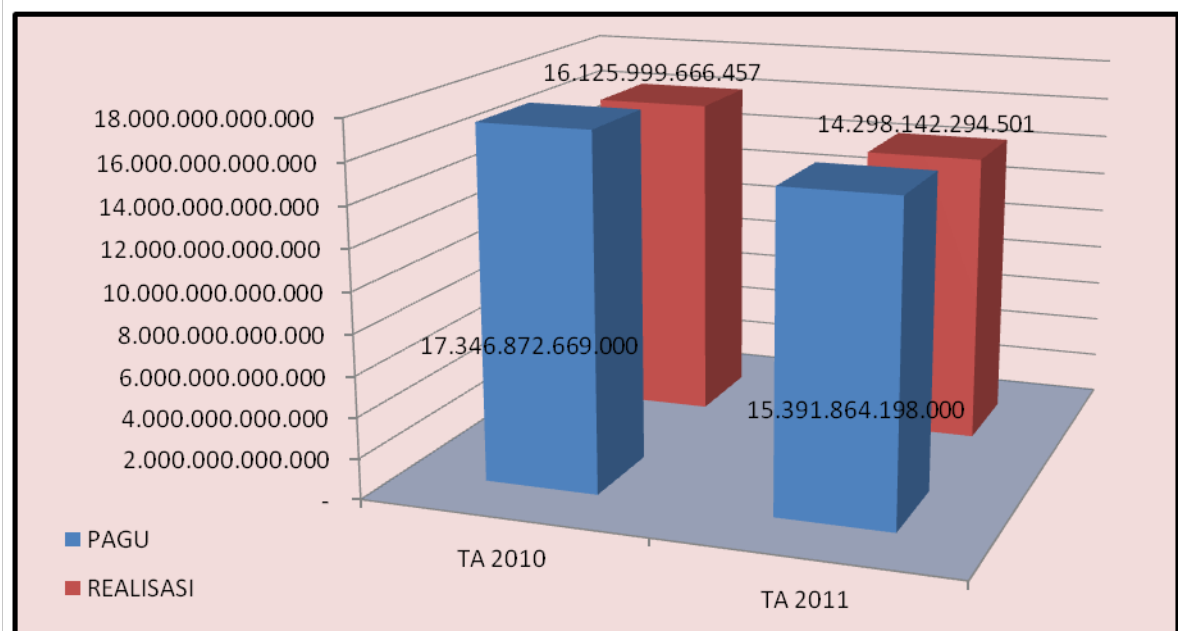
Dalam Tahun Anggaran 2011 jumlah pengembalian belanja Kementerian Keuangan adalah sebesar **Rp25.666.446.168,00** sehingga jumlah realisasi belanja Kementerian Keuangan Neto adalah sebesar **Rp16.100.333.220.289,00** atau **92,81** persen dari pagu.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Bruto TA 2011 dan 2010*

Perbandingan antara realisasi belanja bruto TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Grafik 9 berikut.

Grafik 9
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Keuangan
TA 2011 dan 2010

(dalam rupiah)



URAIAN	TA 2011	TA 2010
PAGU	17.346.872.669.000	15.391.864.198.000
REALISASI BRUTO	16.125.999.666.457	14.298.142.294.501

Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Keuangan.

Belanja Kementerian Keuangan diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, unit eselon I, fungsi, dan jenis belanja.

B.2.2.1. Belanja Kementerian Keuangan Bruto Menurut Sumber Dana

*Realisasi Belanja Bruto
TA 2011 Menurut Sumber Dana*

Realisasi Belanja Kementerian Bruto TA 2011 sebesar Rp16.125.999.666.457,00, terdiri dari Belanja Rupiah Murni sebesar Rp15.969.969.008.138,00, Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp101.364.595.447,00, Rupiah Murni Pendamping sebesar Rp4.090.811.443,00, Badan Layanan Umum sebesar Rp38.325.905.668,00, Hibah Luar Negeri sebesar Rp6.375.929.639,00, Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp1.836.940.665,00, dan Hibah Non Kas yang berasal dari realisasi belanja hibah langsung berupa Barang/Jasa sebesar Rp4.036.475.457,00. Realisasi tersebut dapat dirinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 26 dan Grafik 10 berikut.

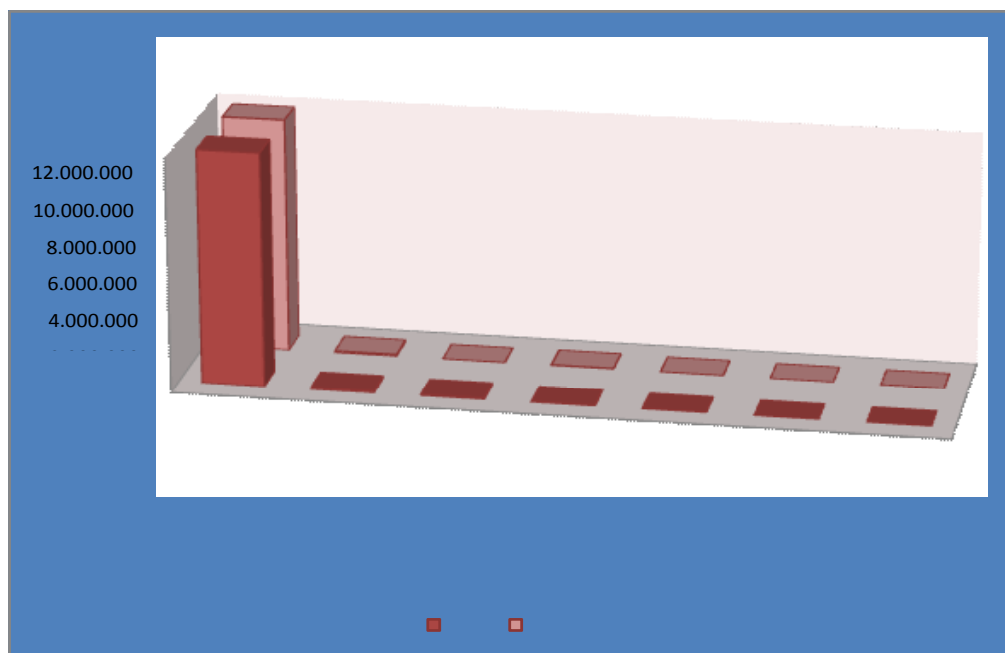
Tabel 26
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Menurut
Sumber Dana TA 2011

(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Transaksi Kas			
Belanja Rupiah Murni	17.044.964.597.000	15.969.969.008.138	93,69
Belanja Pinjaman Luar Negeri	119.794.862.000	101.364.595.447	84,62
Rupiah Murni Pendamping	85.505.086.000	4.090.811.443	4,78
Badan Layanan Umum	53.222.987.000	38.325.905.668	72,01
Hibah Luar Negeri	34.526.234.000	6.375.929.639	18,47
Hibah Langsung Luar Negeri	8.858.903.000	1.836.940.665	20,74
Hibah Langsung Jasa Luar Negeri	0	0	0,00
Jumlah Transaksi Kas Bruto	17.346.872.669.000	16.121.963.191.000	92,94
Belanja Transaksi Non Kas			
Hibah Langsung Jasa Luar Negeri	0	4.036.475.457	0,00
Jumlah Transaksi Non Kas Bruto	0	4.036.475.457	0,00
Jumlah Belanja Bruto	17.346.872.669.000	16.125.999.666.457	92,96

Grafik 10
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto
Menurut Sumber Dana TA 2011

(dalam jutaan rupiah)



Perbandingan antara realisasi belanja bruto TA 2011 dan 2010 menurut sumber dana dapat dilihat pada Tabel 27 berikut.

Tabel 27
Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana TA 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Belanja Transaksi Kas				
Belanja Rupiah Murni	15.969.969.008.138	14.103.048.872.509	1.866.920.135.629	13,24
Belanja Pinjaman Luar Negeri	101.364.595.447	117.086.574.544	(15.721.979.097)	(13,43)
Rupiah Murni Pendamping	4.090.811.443	14.528.041.907	(10.437.230.464)	(71,84)
Badan Layanan Umum	38.325.905.668	25.669.270.287	12.656.635.381	49,31
Hibah Luar Negeri	6.375.929.639	22.048.003.594	(15.672.073.955)	(71,08)
Hibah Langsung Luar Negeri	1.836.940.665	15.761.531.660	(13.924.590.995)	(88,35)
Hibah Langsung Jasa Luar Negeri	0	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	16.121.963.191.000	14.298.142.294.501	1.823.820.896.499	12,76
Pengembalian Belanja	25.666.446.168	21.676.612.556	3.989.833.612	18,41
Jumlah Transaksi Kas Neto	16.096.296.744.832	14.276.465.681.945	1.819.831.062.887	12,75
Belanja Transaksi Non Kas				
Hibah Langsung Jasa Luar Negeri	4.036.475.457	0	4.036.475.457	0,00
Jumlah Belanja Bruto	4.036.475.457	0	4.036.475.457	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Jumlah Transaksi Non Kas Neto	4.036.475.457	0	4.036.475.457	0,00
Jumlah Belanja Neto	16.100.333.220.289	14.276.465.681.945	1.823.867.538.344	12,78

Realisasi Belanja Per Eselon I Bruto

B.2.2.2. Belanja Kementerian Keuangan Menurut Unit Eselon I Bruto

Realisasi Belanja Kementerian Keuangan TA 2011 dapat dirinci menurut unit eselon I bruto sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 28. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar adalah pada Setjen sebesar Rp5.963.937.082.788,00 atau 36,99 persen dari total realisasi belanja Kementerian Keuangan. Berdasarkan daya serap realisasi TA 2011, penyerapan terbesar terdapat pada DJP sebesar Rp5.397.033.396.680,00 atau 109,66 persen dari pagu belanja DJP. Adapun realisasi belanja DJP tersebut termasuk didalamnya pembayaran imbalan bunga sebesar Rp1.247.399.871.387,00 yang tidak tersedia pagu anggarannya di dalam DIPA. Apabila imbalan bunga ini dikeluarkan maka realisasi belanja DJP adalah sebesar Rp4.149.633.525.293,00 atau 84,32 persen dari pagu belanja DJP.

Perbandingan pagu dan realisasi belanja menurut unit eselon I dapat dilihat pada Tabel 28 berikut.

Tabel 28
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja
Menurut Unit Eselon I TA 2011

(dalam rupiah)

NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%
Belanja Transaksi Kas				
1	SETJEN	6.910.441.708.000	5.963.937.082.788	86,30
2	ITJEN	102.690.573.000	93.791.092.203	91,33
3	DJA	123.126.257.000	114.765.543.793	93,21
4	DJP	4.921.494.700.000	5.397.033.396.680	109,66
5	DJBC	2.074.536.058.000	1.726.841.144.537	83,24
6	DJPK	139.950.000.000	115.201.678.220	82,32
7	DJPU	112.142.456.000	107.415.130.754	95,78
8	DJPB	1.484.566.434.000	1.385.436.301.213	93,32
9	DJKN	653.148.000.000	543.878.523.670	83,27
10	BAPEPAM DAN LK	199.236.145.000	140.999.075.196	70,77
11	BPPK	440.143.341.000	396.304.767.440	90,04
12	BKF	185.396.997.000	136.359.454.506	73,55
	Jumlah Belanja Bruto	17.346.872.669.000	16.121.963.191.000	92,94
	Pengembalian		25.666.446.168	0,00
	Jumlah Transaksi Kas Neto	17.346.872.669.000	16.096.296.744.832	92,79
Belanja Transaksi Non Kas				
1	BKF	0	986.102.000	0,00
2	Bapepam LK	0	3.050.373.457	0,00
	Jumlah Belanja Bruto	0	4.036.475.457	0,00
	Pengembalian	0	0	0,00
	Jumlah Transaksi Non Kas Neto	0	4.036.475.457	0,00
	Jumlah Belanja Neto	17.346.872.669.000	16.100.333.220.289	92,81

Perbandingan antara realisasi belanja per unit eselon I bruto TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 29 berikut.

Tabel 29
Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I Bruto TA 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

NO.	UNIT ESELON I	TA 2011	TA 2010	Kenaikan(Penurunan)	%
Belanja Transaksi Kas					
1	SETJEN	5.963.937.082.788	5.490.764.396.822	473.172.685.966	8,62
2	ITJEN	93.791.092.203	90.526.200.496	3.264.891.707	3,61
3	DJA	114.765.543.793	95.625.189.671	19.140.354.122	20,02
4	DJP	5.397.033.396.680	4.319.005.999.039	1.078.027.397.641	24,96
5	DJBC	1.726.841.144.537	1.627.137.038.020	99.704.106.517	6,13
6	DJPK	115.201.678.220	106.318.595.888	8.883.082.332	8,36
7	DJPU	107.415.130.754	184.206.507.790	(76.791.377.036)	(41,69)
8	DJPB	1.385.436.301.213	1.262.943.812.132	122.492.489.081	9,70
9	DJKN	543.878.523.670	498.025.099.926	45.853.423.744	9,21
10	BAPEPAM DAN LK	140.999.075.196	145.798.248.519	(4.799.173.323)	(3,29)
11	BPPK	396.304.767.440	367.952.325.609	28.352.441.831	7,71
12	BKF	136.359.454.506	109.838.880.589	26.520.573.917	24,14
	Jumlah Belanja Bruto	16.121.963.191.000	14.298.142.294.501	1.823.820.896.499	12,76
	Pengembalian	25.666.446.168	21.676.612.556	3.989.833.612	18,41
	Jumlah Transaksi Kas Neto	16.096.296.744.832	14.276.465.681.945	1.819.831.062.887	12,75
Belanja Transaksi Non Kas					
1	BKF	986.102.000	0	986.102.000	0,00
2	Bapepam LK	3.050.373.457	0	3.050.373.457	0,00
	Jumlah Belanja Bruto	4.036.475.457	0	4.036.475.457	0,00
	Pengembalian	0	0	0	0,00
	Jumlah Transaksi Non Kas Neto	4.036.475.457	0	4.036.475.457	0,00
	Jumlah Belanja Neto	16.100.333.220.289	14.276.465.681.945	1.823.867.538.344	12,78

B.2.2.3. Belanja Kementerian Keuangan Bruto Menurut Fungsi

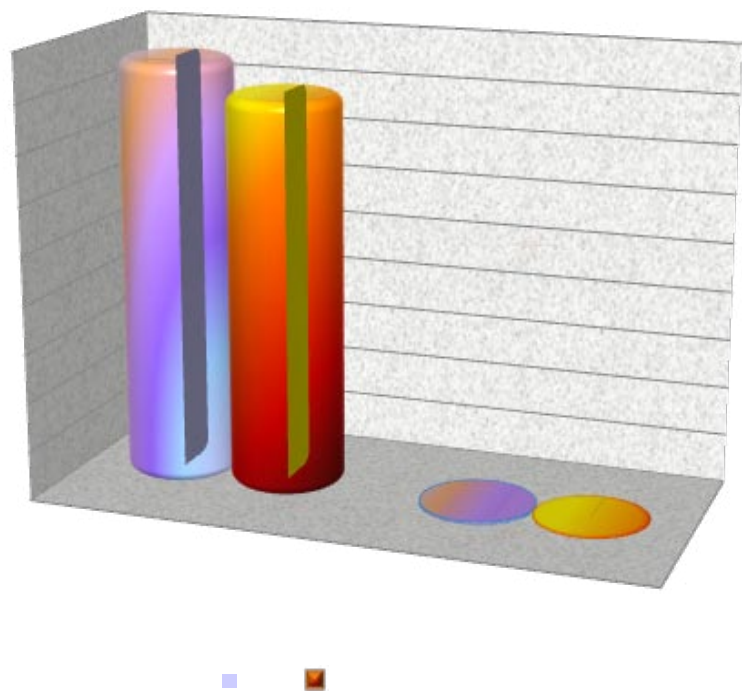
*Realisasi Belanja Bruto TA 2011
Menurut Fungsi*

Belanja Kementerian Keuangan juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi. Perbandingan pagu dan realisasi belanja Kementerian Keuangan bruto menurut Fungsi pada TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 30 dan Grafik 11 berikut.

Tabel 30
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Menurut Fungsi TA 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Transaksi Kas	17.346.872.669.000	16.121.963.191.000	92,94
Belanja Pelayanan Umum	17.246.094.260.000	16.035.157.249.021	92,98
Belanja Pendidikan	100.778.409.000	86.805.941.979	86,14
Transaksi Non Kas	0	4.036.475.457	0,00
Belanja Pelayanan Umum	0	4.036.475.457	0,00
Belanja Pendidikan	0	0	0,00
Jumlah	17.346.872.669.000	16.125.999.666.457	92,96

Grafik 11
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Menurut Fungsi TA 2011
(dalam jutaan rupiah)



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja Kementerian Keuangan TA 2011 menurut fungsi yang terbesar digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar **Rp16.039.193.724.478,00** atau **99,46** persen dari total realisasi belanja Kementerian Keuangan.

B.2.2.4. Belanja Kementerian Keuangan Bruto Menurut Jenis Belanja

*Realisasi Belanja Bruto TA 2011
Menurut Jenis Belanja*

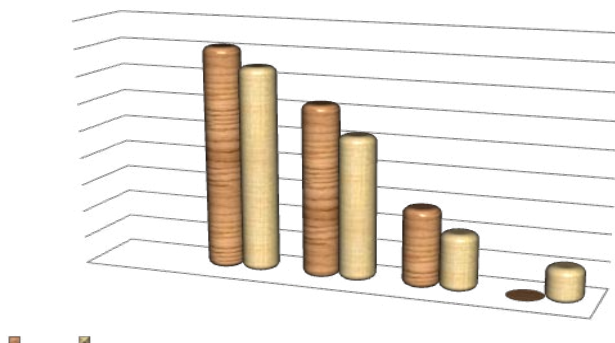
Belanja Kementerian Keuangan Bruto menurut jenis belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Pembayaran Kewajiban Utang (SPM-IB Pajak). Perbandingan pagu dan realisasi belanja menurut jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 32 dan Grafik 12.

Tabel 32
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Menurut Jenis Belanja TA 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Transaksi Kas			
Belanja Pegawai	8.161.582.433.000	7.510.455.351.495	92,02
Belanja Barang	6.315.762.685.000	5.279.309.268.307	83,59
Belanja Modal	2.869.527.551.000	2.084.798.699.811	72,65
Pembayaran Kewajiban Utang (SPM-IB Pajak)	0	1.247.399.871.387	0,00
Jumlah Transaksi Kas Bruto	17.346.872.669.000	16.121.963.191.000	92,94
Transaksi Non Kas			
Belanja Barang	0	4.036.475.457	0,00
Jumlah Transaksi Non Kas Bruto	0	4.036.475.457	0,00
Jumlah Belanja Bruto	17.346.872.669.000	16.125.999.666.457	92,96

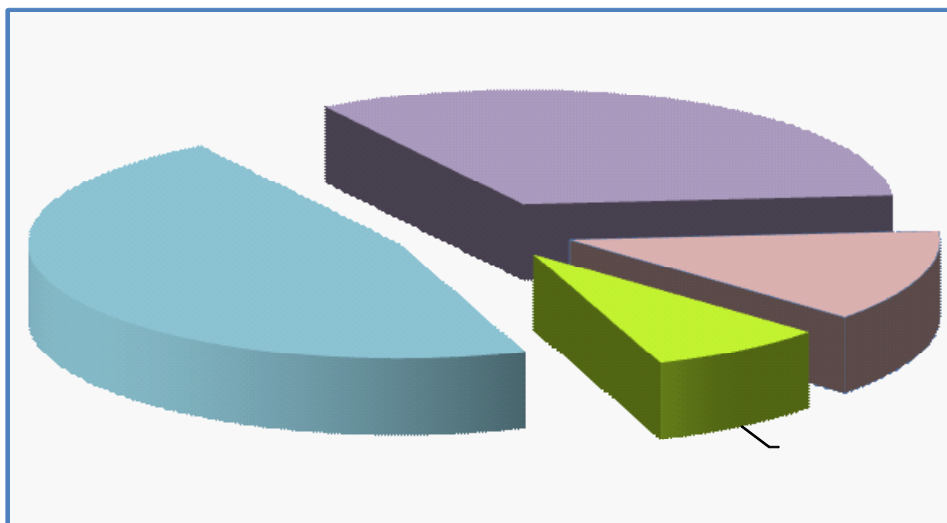
Perbandingan pagu dan realisasi belanja bruto berdasarkan jenis belanja untuk TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 12 berikut.

Grafik 12
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Bruto Menurut Jenis Belanja TA 2011
(dalam jutaan rupiah)



Komposisi realisasi belanja berdasarkan jenis belanja bruto untuk TA 2011 juga dapat dilihat pada Grafik 13 berikut.

Grafik 13
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Bruto TA 2011



Perbandingan realisasi belanja Kementerian Keuangan bruto menurut jenis belanja TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 33 berikut.

Tabel 33
Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Bruto TA 2011 dan TA 2010
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Transaksi Kas				
Belanja Pegawai	7.510.455.351.495	7.194.523.880.093	315.931.471.402	4,39
Belanja Barang	5.279.309.268.307	3.931.936.721.184	1.347.372.547.123	34,27
Belanja Modal	2.084.798.699.811	1.850.194.481.247	234.604.218.564	12,68
Pembayaran Kewajiban Utang (SPM-IB Pajak)	1.247.399.871.387	1.321.487.211.977	(74.087.340.590)	(5,61)
Jumlah Belanja Bruto	16.121.963.191.000	14.298.142.294.501	1.823.820.896.499	12,76
Pengembalian Belanja	25.666.446.168	21.676.612.556	3.989.833.612	18,41
Jumlah Transaksi Kas Neto	16.096.296.744.832	14.276.465.681.945	1.819.831.062.887	12,75
Transaksi Non Kas				
Belanja Barang	4.036.475.457	0	4.036.475.457	0,00
Jumlah Belanja Bruto	4.036.475.457	0	4.036.475.457	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Jumlah Transaksi Non Kas Neto	4.036.475.457	0	4.036.475.457	0,00
Jumlah Belanja Neto	16.100.333.220.289	14.276.465.681.945	1.823.867.538.344	12,78

B.2.2.4.1. Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja Pegawai Bruto
Rp7.510.455.351.495,00*

Realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2011 adalah sebesar Rp7.510.455.351.495,00 atau 92,02 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2011 sebesar Rp8.161.582.433.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2010, realisasi Belanja Pegawai TA 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp315.931.471.402,00 atau 4,39 persen dari Realisasi TA 2010.

Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan gaji PNS tahun 2011 dan penerimaan pegawai baru yang menyebabkan naiknya pembayaran gaji, TKPKN dan pembayaran uang makan. Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Pegawai TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Transaksi Kas			
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.754.470.696.760	2.619.409.669.125	95,10
B. Gaji dan Tunj. Peg. Non PNS	0	0	0,00
Belanja Honorarium	7.160.375.000	6.615.548.921	92,39
Belanja Lembur	110.025.536.000	93.882.789.620	85,33
Belanja Vakasi	0	0	0,00
B. Tunj. Khusus & B. Peg. Transito	5.289.925.825.240	4.790.547.343.829	90,56
Belanja Pegawai BLU	0	0	0,00
Jumlah Transaksi Kas Bruto	8.161.582.433.000	7.510.455.351.495	92,02
Transaksi Non Kas			
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Jumlah Transaksi Non Kas Bruto	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	8.161.582.433.000	7.510.455.351.495	92,02

Realisasi Belanja Pegawai BLU nihil karena gaji masih dibayar oleh satuan kerja asal pegawai BLU.

Komposisi realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 14 berikut.

Grafik 14
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2011

Perbandingan antara realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 35 berikut.

Tabel 35
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Bruto TA 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Transaksi Kas				
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	2.619.409.669.125	2.373.350.859.684	246.058.809.441	10,37
B. Gaji dan Tunj. Peg. Non PNS	0	0	0	0,00
Belanja Honorarium	6.615.548.921	7.080.310.000	(464.761.079)	(6,56)
Belanja Lembur	93.882.789.620	97.623.457.150	(3.740.667.530)	(3,83)
Belanja Vakasi	0	0	0	0,00
B. Tunj. Khusus & Peg. Transito	4.790.547.343.829	4.716.469.253.259	74.078.090.570	1,57
Belanja Pegawai BLU	0	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	7.510.455.351.495	7.194.523.880.093	315.931.471.402	4,39
Pengembalian Belanja	19.941.310.401	17.054.385.504	2.886.924.897	16,93
Jumlah Transaksi Kas Neto	7.490.514.041.094	7.177.469.494.589	313.044.546.505	4,36
Transaksi Non Kas	0	0	0	
Jumlah Belanja Neto	7.490.514.041.094	7.177.469.494.589	313.044.546.505	4,36

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Pegawai per unit eselon I dapat dilihat pada Tabel 36 berikut.

Tabel 36
Perbandingan Pagu dan Realisasi Bruto Belanja Pegawai Per Eselon I TA 2011
(dalam rupiah)

NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%
Belanja Transaksi Kas				
1	SETJEN	5.376.055.640.000	4.878.316.572.393	90,74
2	ITJEN	26.500.000.000	23.571.787.195	88,95
3	DJA	35.481.846.000	39.682.719.229	111,84
4	DJP	1.437.168.405.000	1.354.681.299.686	94,26
5	DJBC	498.418.621.000	453.640.814.986	91,02
6	DJPK	20.969.593.000	18.968.838.639	90,46
7	DJPU	14.817.482.000	14.396.946.704	97,16
8	DJPB	464.332.195.000	450.427.443.892	97,01
9	DJKN	165.305.819.000	160.682.419.341	97,20
10	BAPEPAM DAN LK	45.943.160.000	45.035.140.949	98,02
11	BPPK	54.264.960.000	50.781.153.373	93,58
12	BKF	22.324.712.000	20.270.215.108	90,80
Jumlah Transaksi Kas Bruto		8.161.582.433.000	7.510.455.351.495	92,02
Belanja Transaksi Non Kas				
		0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto		8.161.582.433.000	7.510.455.351.495	92,02

Perbandingan Belanja Pegawai Kementerian Keuangan per unit eselon I TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 37 berikut:

Tabel 37
Perbandingan Belanja Pegawai Bruto TA 2011 dan TA 2010
(dalam rupiah)

NO.	UNIT ESELON I	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Belanja Transaksi Kas					
1	SETJEN	4.878.316.572.393	4.792.240.216.650	86.076.355.743	1,80
2	ITJEN	23.571.787.195	21.706.062.406	1.865.724.789	8,60
3	DJA	39.682.719.229	35.172.586.568	4.510.132.661	12,82
4	DJP	1.354.681.299.686	1.227.818.953.099	126.862.346.587	10,33
5	DJBC	453.640.814.986	415.142.724.527	38.498.090.459	9,27
6	DJPK	18.968.838.639	15.829.981.932	3.138.856.707	19,83
7	DJPU	14.396.946.704	12.860.726.562	1.536.220.142	11,95
8	DJPB	450.427.443.892	434.337.315.256	16.090.128.636	3,70
9	DJKN	160.682.419.341	144.360.875.363	16.321.543.978	11,31
10	BAPEPAM DAN LK	45.035.140.949	35.075.584.035	9.959.556.914	28,39
11	BPPK	50.781.153.373	41.649.914.648	9.131.238.725	21,92
12	BKF	20.270.215.108	18.328.939.047	1.941.276.061	10,59
	Jumlah Belanja Bruto	7.510.455.351.495	7.194.523.880.093	315.931.471.402	4,39
	Pengembalian	19.941.310.401	17.055.198.960	2.886.111.441	16,92
	Jumlah Transaksi Kas Neto	7.490.514.041.094	7.177.468.681.133	313.045.359.961	4,36
Belanja Transaksi Non Kas		0	0	0	0,00
	Jumlah Belanja Neto	7.490.514.041.094	7.177.468.681.133	313.045.359.961	4,36

B.2.2.4.2. Belanja Barang

*Realisasi Belanja Barang
Rp5.283.345.743.764,00*

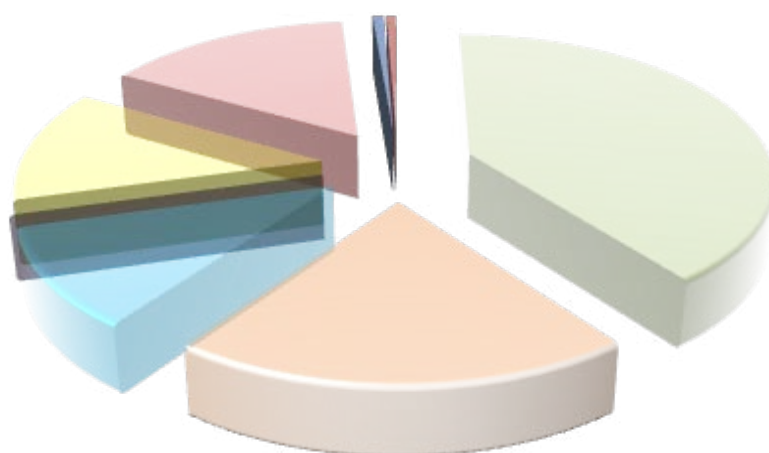
Realisasi Belanja Barang Bruto TA 2011 adalah sebesar **Rp5.283.345.743.764,00** yang berarti **83,65** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2011 sebesar **Rp6.315.762.685.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2010, realisasi Belanja Barang TA 2011 mengalami kenaikan sebesar **Rp1.351.409.022.580,00** atau **34,37** persen dari TA 2010. Kenaikan terbesar berasal dari belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja barang BLU. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya volume kerja/kegiatan dibandingkan tahun sebelumnya dan adanya kenaikan indeks/harga satuan sesuai dengan Standar Biaya Tahun 2011. Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Barang TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 38 berikut.

Tabel 38
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang Bruto TA 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Transaksi Kas			
Belanja Barang Operasional	2.330.335.817.000	2.096.014.777.419	89,94
Belanja Barang Non Operasional	1.321.508.813.000	1.069.287.145.857	80,91
Belanja Jasa	833.432.378.000	567.381.655.911	68,08
Belanja Jasa untuk Hibah	0	0	0,00
Belanja Pemeliharaan	781.905.919.000	661.590.235.968	84,61
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	935.496.909.000	815.902.481.274	87,22
Belanja Perjalanan Luar Negeri	66.908.891.000	36.806.266.398	55,01
Belanja Barang BLU	46.173.958.000	32.326.705.480	70,01
Jumlah Transaksi Kas Bruto	6.315.762.685.000	5.279.309.268.307	83,59
Transaksi Non Kas			
Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah	0	4.036.475.457	0,00
Jumlah Transaksi Non Kas Bruto	0	4.036.475.457	0,00
Jumlah Belanja Bruto	6.315.762.685.000	5.283.345.743.764	83,65

Komposisi Belanja Barang Bruto TA 2011 dapat dilihat dalam Grafik 15.

Grafik 15
Komposisi Realisasi Belanja Barang Bruto TA 2011



Perbandingan antara realisasi Belanja Barang Bruto TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 39 berikut.

Tabel 39
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan/(Penurunan)	%
Transaksi Kas				
Belanja Barang Operasional	2.096.014.777.419	1.415.715.748.039	680.299.029.380	48,05
Bel. Barang Non Operasional	1.069.287.145.857	813.922.970.904	255.364.174.953	31,37
Belanja Jasa	567.381.655.911	437.239.445.747	130.142.210.164	29,76
Belanja Jasa untuk Hibah	0	0	0	0,00
Belanja Pemeliharaan	661.590.235.968	541.507.464.640	120.082.771.328	22,18
Bel. Perjalanan Dalam Negeri	815.902.481.274	668.347.998.809	147.554.482.465	22,08
Belanja Perjalanan Luar Negeri	36.806.266.398	33.245.473.491	3.560.792.907	10,71
Belanja Barang BLU	32.326.705.480	21.957.619.554	10.369.085.926	47,22
Jumlah Belanja Bruto	5.279.309.268.307	3.931.936.721.184	1.347.372.547.123	34,27
Pengembalian Belanja	5.508.465.517	4.380.644.502	1.127.821.015	25,75
Jumlah Transaksi Kas Neto	5.273.800.802.790	3.927.556.076.682	1.346.244.726.108	34,28
Transaksi Non Kas				
Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah	4.036.475.457	0	4.036.475.457	0,00
Jumlah Belanja Bruto	4.036.475.457	0	4.036.475.457	0,00
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Jumlah Transaksi Non Kas Neto	4.036.475.457	0	4.036.475.457	0,00
Jumlah Belanja Neto	5.277.837.278.247	3.927.556.076.682	1.350.281.201.565	34,38

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Barang per unit eselon I bruto dapat dilihat pada Tabel 40 berikut.

Tabel 40
Perbandingan Pagu dan Realisasi Bruto Belanja Barang Per Eselon I TA 2011
(dalam rupiah)

NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%
Belanja Transaksi Kas				
1	SETJEN	631.069.530.000	402.180.191.697	63,73
2	ITJEN	66.080.573.000	60.576.192.520	91,67
3	DJA	66.384.028.000	56.184.593.724	84,64
4	DJP	2.765.698.083.000	2.370.575.755.219	85,71
5	DJBC	1.030.694.266.000	923.844.690.772	89,63
6	DJPK	100.735.178.000	80.537.799.012	79,95
7	DJPU	54.639.974.000	50.596.233.720	92,60
8	DJPB	751.118.701.000	679.370.514.810	90,45
9	DJKN	319.028.971.000	251.272.820.620	78,76
10	BAPEPAM DAN LK	118.056.986.000	67.506.248.657	57,18
11	BPPK	261.161.396.000	228.580.025.303	87,52
12	BKF	151.094.999.000	108.084.202.253	71,53
Jumlah Transaksi Kas Bruto		6.315.762.685.000	5.279.309.268.307	83,59
Belanja Transaksi Non Kas				
	BKF	0	986.102.000	0,00
	Bapepam dan LK	0	3.050.373.457	0,00
Jumlah Transaksi Non Kas Bruto		0	4.036.475.457	0,00
Jumlah Belanja Bruto		6.315.762.685.000	5.283.345.743.764	83,65

Perbandingan realisasi Belanja Barang per unit eselon I TA 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 41 berikut.

Tabel 41
Perbandingan Belanja Barang Per Eselon I TA 2011 dan TA 2010
(dalam rupiah)

NO.	UNIT ESELON I	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Belanja Transaksi Kas					
1	SETJEN	402.180.191.697	372.424.844.842	29.755.346.855	7,99
2	ITJEN	60.576.192.520	59.592.781.498	983.411.022	1,65
3	DJA	56.184.593.724	53.077.910.349	3.106.683.375	5,85
4	DJP	2.370.575.755.219	1.427.432.785.378	943.142.969.841	66,07
5	DJBC	923.844.690.772	765.924.496.759	157.920.194.013	20,62
6	DJPK	80.537.799.012	70.781.618.981	9.756.180.031	13,78
7	DJPU	50.596.233.720	50.082.181.978	514.051.742	1,03
8	DJPB	679.370.514.810	538.729.613.627	140.640.901.183	26,11
9	DJKN	251.272.820.620	252.617.266.817	(1.344.446.197)	(0,53)
10	BAPEPAM DAN LK	67.506.248.657	69.036.434.626	(1.530.185.969)	(2,22)
11	BPPK	228.580.025.303	185.483.776.227	43.096.249.076	23,23
12	BKF	108.084.202.253	86.753.010.102	21.331.192.151	24,59
	Jumlah Belanja Bruto	5.279.309.268.307	3.931.936.721.184	1.347.372.547.123	34,27
	Pengembalian	5.508.465.517	4.380.644.502	1.127.821.015	25,75
	Jumlah Transaksi Kas Neto	5.273.800.802.790	3.927.556.076.682	1.346.244.726.108	34,28
Belanja Transaksi Non Kas					
1	BKF	986.102.000	0	986.102.000	0,00
2	Bapepam dan LK	3.050.373.457	0	3.050.373.457	0,00
	Jumlah Belanja Bruto	4.036.475.457	0	4.036.475.457	0,00
	Pengembalian	0	0	0	0,00
	Jumlah Transaksi Non Kas Neto	4.036.475.457	0	4.036.475.457	0,00
	Jumlah Belanja Neto	5.277.837.278.247	3.927.556.076.682	1.350.281.201.565	34,38

B.2.2.4.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Bruto TA 2011 Rp 2.084.798.699.811,00

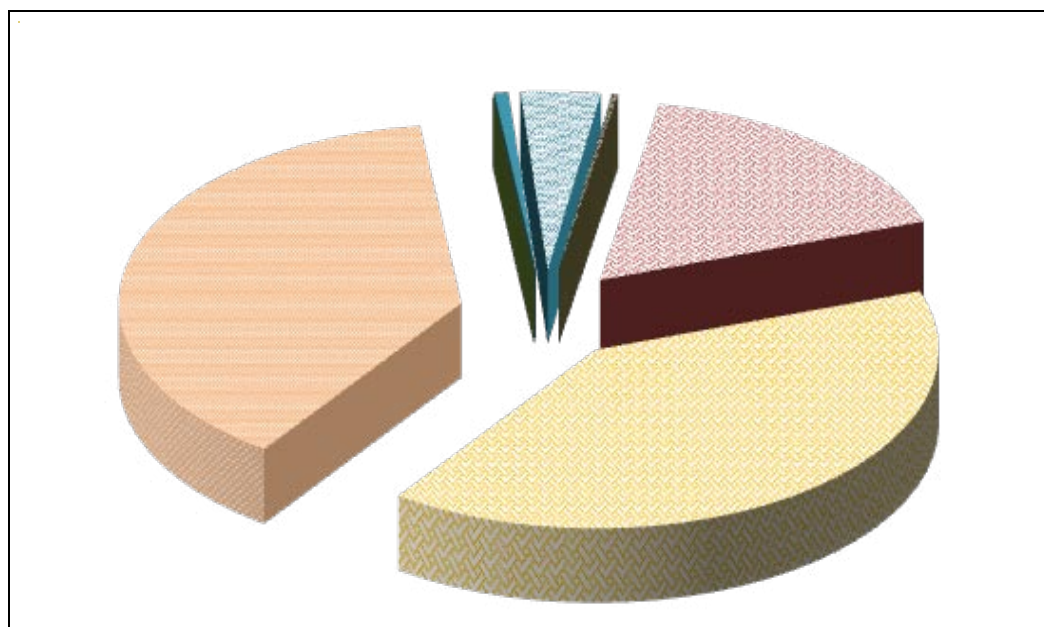
Realisasi Belanja Modal Bruto TA 2011 adalah sebesar **Rp 2.084.798.699.811,00** yang berarti **72,65** persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2011 sebesar **Rp2.869.527.551.000,00**. Apabila dibandingkan dengan TA 2010, realisasi Belanja Modal TA 2011 mengalami kenaikan sebesar **Rp 234.604.218.564,00** atau **12,68** persen dari TA 2010. Kenaikan terbesar berasal dari belanja modal tanah yaitu untuk pembayaran angsuran pembayaran atas tanah pada PT Taspen oleh Kantor Pusat Sekretariat Jenderal dan belanja modal fisik lainnya. Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Modal TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 42 berikut.

Tabel 42
Perbandingan Pagu dan Realisasi Bruto Belanja Modal TA 2011
(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Transaksi Kas			
Belanja Modal Tanah	377.525.221.000	352.139.360.349	93,28
Belanja Modal Peralatan & Mesin	1.211.320.919.000	835.704.317.459	68,99
Belanja Modal Gedung & Bangunan	1.090.946.143.250	798.701.703.233	73,21
Belanja Pemeliharaan yg Dikapitalisasi	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	73.367.664.000	13.795.617.424	18,80
Belanja Modal Fisik Lainnya	109.318.574.750	78.458.501.158	71,77
Belanja Modal BLU	7.049.029.000	5.999.200.188	85,11
Jumlah Transaksi Kas Bruto	2.869.527.551.000	2.084.798.699.811	72,65
Transaksi Non Kas	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto	2.869.527.551.000	2.084.798.699.811	72,65

Komposisi Belanja Modal Bruto TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 16 berikut.

Grafik 16
Komposisi Realisasi Belanja Modal Bruto TA 2011



Tabel 43
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Transaksi Kas				
Belanja Modal Tanah	352.139.360.349	169.692.884.966	182.446.475.383	107,52
Belanja Modal Peralatan & Mesin	835.704.317.459	660.104.667.975	175.599.649.484	26,60
Belanja Modal Gedung & Bangunan	798.701.703.233	955.185.541.282	(156.483.838.049)	(16,38)
Belanja Pemeliharaan yg Dikapitalisasi	0	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	13.795.617.424	18.933.840.493	(5.138.223.069)	(27,14)
Belanja Modal Fisik Lainnya	78.458.501.158	42.565.895.798	35.892.605.360	84,32
Belanja Modal BLU	5.999.200.188	3.711.650.733	2.287.549.455	61,63
Jumlah Belanja Bruto	2.084.798.699.811	1.850.194.481.247	234.604.218.564	12,68
Pengembalian Belanja	216.670.250	241.582.550	(24.912.300)	(10,31)
Jumlah Transaksi Kas Neto	2.084.582.029.561	1.849.952.898.697	234.629.130.864	12,68
Transaksi Non Kas	0	0	0	0,00
Jumlah Belanja Neto	2.084.582.029.561	1.849.952.898.697	234.629.130.864	12,68

Perbandingan pagu dan realisasi Belanja Modal per unit eselon I dapat dilihat pada Tabel 44 berikut.

Tabel 44
Realisasi Belanja Modal Per Eselon I Bruto TA 2011

(dalam rupiah)

NO.	UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	%
Belanja Transaksi Kas				
1	SETJEN	903.316.538.000	683.440.318.698	75,66
2	ITJEN	10.110.000.000	9.643.112.488	95,38
3	DJA	21.260.383.000	18.898.230.840	88,89
4	DJP	718.628.212.000	424.376.470.388	59,05
5	DJBC	545.423.171.000	349.355.638.779	64,05
6	DJPK	18.245.229.000	15.695.040.569	86,02
7	DJPU	42.685.000.000	42.421.950.330	99,38
8	DJPB	269.115.538.000	255.638.342.511	94,99
9	DJKN	168.813.210.000	131.923.283.709	78,15
10	BAPEPAM DAN LK	35.235.999.000	28.457.685.590	80,76
11	BPPK	124.716.985.000	116.943.588.764	93,77
12	BKF	11.977.286.000	8.005.037.145	66,84
Jumlah Transaksi Kas Bruto		2.869.527.551.000	2.084.798.699.811	72,65
Belanja Transaksi Non Kas				
		0	0	0,00
Jumlah Belanja Bruto		2.869.527.551.000	2.084.798.699.811	72,65

Perbandingan Belanja Modal per unit eselon I Kementerian Keuangan TA 2011 dan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 45 berikut.

Tabel 45
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

NO.	UNIT ESELON I	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Belanja Transaksi Kas					
1	SETJEN	683.440.318.698	326.099.335.330	357.340.983.368	109,58
2	ITJEN	9.643.112.488	9.227.356.592	415.755.896	4,51
3	DJA	18.898.230.840	7.374.692.754	11.523.538.086	156,26
4	DJP	424.376.470.388	342.267.048.585	82.109.421.803	23,99
5	DJBC	349.355.638.779	446.069.816.734	(96.714.177.955)	(21,68)
6	DJPK	15.695.040.569	19.706.994.975	(4.011.954.406)	(20,36)
7	DJPU	42.421.950.330	121.263.599.250	(78.841.648.920)	(65,02)
8	DJPB	255.638.342.511	289.876.883.249	(34.238.540.738)	(11,81)
9	DJKN	131.923.283.709	101.046.957.746	30.876.325.963	30,56
10	BAPEPAM DAN LK	28.457.685.590	41.686.229.858	(13.228.544.268)	(31,73)
11	BPPK	116.943.588.764	140.818.634.734	(23.875.045.970)	(16,95)
12	BKF	8.005.037.145	4.756.931.440	3.248.105.705	68,28
	Jumlah Belanja Bruto	2.084.798.699.811	1.850.194.481.247	234.604.218.564	12,68
	Pengembalian	216.670.250	241.582.550	(24.912.300)	(10,31)
	Jumlah Transaksi Kas Neto	2.084.582.029.561	1.849.952.898.697	234.629.130.864	12,68
Belanja Transaksi Non Kas					
		0	0	0	0,00
	Jumlah Belanja Neto	2.084.582.029.561	1.849.952.898.697	234.629.130.864	12,68

B.2.2.4.4. Pembayaran Kewajiban Utang

Realisasi Belanja Pembayaran Kewajiban Utang TA 2011 adalah sebesar **Rp1.247.399.871.387,00**, yaitu merupakan imbalan bunga kepada Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pajak atau keputusan keberatan, putusan banding dan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak. Realisasi Pembayaran Kewajiban Utang TA 2011 mengalami penurunan sebesar **Rp74.087.340.590,00** atau **5,61** persen apabila dibandingkan dengan pengeluaran yang sama untuk TA 2010.

Komposisi realisasi Pembayaran Kewajiban Utang tersebut dapat dilihat pada Tabel 46 berikut.

Tabel 46
Realisasi Pembayaran Kewajiban Utang TA 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2011	TA 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
B. Pembayaran Imb. Bunga Pajak	1.247.399.871.387	1.321.487.211.977	(74.087.340.590)	(5,61)
Pembyrn Imb. Bunga Bea & Cukai	0	0	0	0,00
Jumlah	1.247.399.871.387	1.321.487.211.977	(74.087.340.590)	(5,61)

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

B.3.1 Program PINTAR Direktorat Jenderal Pajak

Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) adalah program penyempurnaan proses bisnis perpajakan serta pengembangan *platform* dan pondasi sistem informasi yang terintergrasi, yang merupakan salah satu program Reformasi Perpajakan Jilid Dua sebagai lanjutan dari reformasi fundamental Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PINTAR mengadopsi praktek administrasi perpajakan terbaik di dunia, baik dalam aspek pelayanan perpajakan maupun aspek pengawasan kepatuhan. PINTAR bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional DJP dan menurunkan *compliance cost*. Selain itu, PINTAR bertujuan untuk menyempurnakan penerapan *good governance* dengan meningkatkan transparansi, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 DJP, terdapat alokasi untuk PINTAR sebesar Rp76.389.100.000,00. Nilai tersebut terdiri dari Rupiah Murni Pendamping (RMP) sebesar Rp61.189.500.000,00 dan belanja jasa konsultan yang didanai oleh hibah sebesar Rp15.199.600.000,00 yang merupakan alokasi CTF-7 dalam DIPA Tahun Anggaran 2011 DJP.

Berdasarkan perkembangan pengadaan kegiatan PINTAR Tahun Anggaran 2011 mengalami beberapa kendala sehingga anggaran untuk kegiatan PINTAR sebesar tersebut tidak dapat terserap. Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada saat pengadaan kegiatan PINTAR Tahun Anggaran 2011 antara lain:

- a. Proses pengadaan mengikuti *World Bank Procurement Guidelines* dimana terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi;
- b. Ada perpanjangan waktu penyampaian proposal *bidder* yang disebabkan oleh klarifikasi *bidder*, yang mengarah pada penyempurnaan dokumen *baseline* oleh DJP;
- c. Terdapat 2374 *requirements* dalam dokumen lelang, sedangkan sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim Evaluasi Teknis terbatas untuk melakukan evaluasi atas 6 proposal *bidder*; dan
- d. *Bid Evaluation Report (BER)* harus mendapatkan *No Objection Letter (NOL)* dari *World Bank* yang membutuhkan waktu yang cukup lama karena *review* dilakukan juga oleh *World Bank Head Office* di Washington DC.

B.3.2 Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengembalian Penerimaan pada DJP

Dalam rangka menjaga validitas data realisasi pendapatan khususnya untuk data penerimaan pajak dan pengembalian pendapatan pajak dilakukan rekonsiliasi antara DJP selaku Pengguna Anggaran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara. Rekonsiliasi dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji bahwa jumlah penerimaan pajak yang disajikan Rp787.841.964.465.467,00 telah didukung uang (kas) yang masuk ke negara dengan jumlah yang sama dan pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp45.122.108.432.543,00 dengan membandingkan (mencocokkan) data transaksi pengembalian pendapatan pajak berupa daftar SP2D pengembalian pendapatan pajak antara data SAU dengan data SAI.

Hasil rekonsiliasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	SAU	SAI	Selisih
MPN	630.826.246.152.408	630.804.211.796.181	22.034.356.227
Pemotongan SPM	40.720.360.758.180	40.720.360.758.180	0
BUN	116.317.391.911.106	116.317.391.911.106	0
Total Penerimaan Bruto	787.863.998.821.694	787.841.964.465.467	22.034.356.227
Pengembalian Pajak	45.122.975.661.929	45.122.108.432.543	867.229.386
Total Penerimaan Netto	742.741.023.159.765	742.719.856.032.924	21.167.126.841

Atas selisih tersebut akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak yang terkait, yaitu DJP dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pemindahbukuan yang terjadi selama TA 2011 adalah sebesar Rp1.863.389.245.204,00. Nilai tersebut merupakan pemindahbukuan yang disebabkan oleh perubahan Mata Anggaran Pendapatan (MAP) dan bukan merupakan pelunasan tunggakan pajak. Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud belum terakomodasi dalam nilai penerimaan perpajakan dalam laporan keuangan karena belum ada Peraturan dalam Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak (TUPRP) yang mengatur pemindahbukuan berdasarkan data MPN. Perubahan terhadap TUPRP (saat ini masih mengacu pada KEP-11/PJ./1994) masih dalam proses pembahasan.

Rekonsiliasi pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp45.122.108.432.543,00 antara DJP dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan dengan membandingkan (mencocokkan) data transaksi pengembalian pendapatan pajak berupa daftar SP2D pengembalian pendapatan pajak antara data SAU dengan data SAI. Rincian pengembalian pendapatan pajak berdasarkan hasil rekonsiliasi antara SAU dan SAI sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	SAU	SAI	Selisih
1. SAI dan SAU sama (semua elemen)	45.119.323.013.347	45.119.323.013.347	0
2. SAI dan SAU beda MAP (nilai sama)	447.726.928	447.726.928	0
3. SAI dan SAU beda tanggal dokumen (nilai sama)	358.780.884	358.780.884	0
4. SAI dan SAU beda nomor dokumen (nilai sama)	832.217.298	832.217.298	0
5. SAI dan SAU beda KPPN (nilai sama)	136.273	136.273	0
6. SAI dan SAU beda nominal	603.222.445	603.222.445	0
7. Data Hanya ada di SAI	3.666.685	3.666.685	0
8. Data Hanya ada di SAU	520.865.523	520.865.523	0
9. Data beda dua variabel atau lebih	18.803.160	18.803.160	0
10. Bukan Satker DJP	0	0	0
11. Data Tambahan Pengembalian Pajak	867.229.386		867.229.386
Total	45.122.975.661.929	45.122.108.432.543	867.229.386

Selanjutnya, terhadap selisih SP2D akan ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada seluruh satuan kerja terkait.

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2011 sebesar Rp45.122.108.432.543,00 dan per 31 Desember 2010 sebesar Rp40.141.310.541.968,00 serta pengembalian pendapatan periode-periode atas sebelumnya merupakan produk dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nominal surat ketetapan pajak (SKPLB)/keputusan/putusan yang menyatakan lebih bayar yang diajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali yang belum diterbitkan keputusan atau putusan per tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp15.514.859.282.289,00.

Dalam rangka menjaga validitas data realisasi PNBPN telah dilakukan rekonsiliasi data PNBPN antara DJP dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan secara elektronis di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan hasil sebagai berikut.

Hasil Rekonsiliasi Realisasi PNBPN:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SAU	SAI	Selisih
1.	Data Sama	8.251.579.882	8.251.579.882	0
2.	SAI Kurang Input	0	299.841.320	(299.841.320)
3.	SAU Kurang Input	244.589.938		244.589.938
4.	Beda Nilai	2.690.000	5.230.000	(2.540.000)
5.	Data Bukan MAP DJP	808.996.478	0	808.996.478
6.	Data Bukan Satker DJP	2.359.543.959	0	2.359.543.959
	TOTAL	11.667.400.257	8.572.329.910	3.110.749.055

Hasil Rekonsiliasi Pengembalian PNBPN:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SAU	SAI	Selisih
1.	Data Sama	532.800	532.800	0
2.	SAI Kurang Input	688.165	0	(688.165)
	TOTAL	1.220.965	532.800	(688.165)

Hasil rekonsiliasi ini telah digunakan untuk perbaikan Laporan Realisasi Anggaran BA 015 TA 2011.

B.3.3 Rekonsiliasi Belanja dan Pengembalian Belanja Pada DJP

Dalam rangka menjaga validitas data realisasi belanja telah dilakukan rekonsiliasi data belanja dan pengembalian belanja antara DJP dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan secara elektronis di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan hasil sebagai berikut.

Hasil Rekonsiliasi Pagu Belanja:

(dalam rupiah)

No	Uraian	SAU	SAI	Selisih
1	Pagu Belanja	5.114.422.980.000	4.921.494.700.000	192.928.280.000

Hasil Rekonsiliasi Realisasi Belanja:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	SAU	SAI	Selisih
1	Data Sama	5.397.033.396.680	5.397.033.396.680	0
	TOTAL	5.397.033.396.680	5.397.033.396.680	0

Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja:

(dalam rupiah)

No	Uraian	SAU	SAI	Selisih
1	Data Sama	1.569.275.894	1.569.275.894	0
2	SAU Kurang Input	0	3.528.560	(3.528.560)
3	Data Bukan MAK DJP	49.659.033	0	49.659.033
4	Data Bukan Satker DJP	5.387.240	0	5.387.240
5	Data Baru	3.208.271		3.208.271
	TOTAL	1.627.530.438	1.572.804.454	54.725.984

Terhadap selisih tersebut telah selesai diklarifikasi oleh pihak terkait yaitu DJP dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

B.3.4 Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengembalian Penerimaan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mencatat penerimaan berdasarkan bukti setor SSPCP/SSBP secara berjenjang (*bottom-up*) dari tingkat UAKPA ke UAPPA-W dan ke UAPPA-Es-1, dan telah dilakukan rekonsiliasi internal secara periodik dan berjenjang dari tingkat Satker, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2010.

Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengembalian Penerimaan Perpajakan tingkat Eselon I tahun anggaran 2011 antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Pengguna Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Bendahara Umum Negara telah dilakukan pada tanggal 07 Februari 2012 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nomor BAR-267/SM II/PB.64/2012 tanggal 07 Februari 2012.

1. Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan

Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan antara SAI dengan SAU dilakukan dengan 8 metode dan *key* rekonsiliasi unik dalam setiap metodenya. *Key* rekonsiliasi unik dalam setiap level digunakan untuk menghindari hasil rekonsiliasi ganda. 8 Metode tersebut yaitu:

- Metode-1 dengan elemen kunci NTPN, TGL. NTPN, AKUN, NILAI;
- Metode-2 dengan elemen kunci NTPN, AKUN, NILAI;
- Metode-3 dengan elemen kunci NTPN, TGL. NTPN, NILAI;

- d. Metode-4 dengan elemen kunci TGL. NTPN, AKUN, NILAI;
- e. Metode-5 dengan elemen kunci NTB/NTP, AKUN, NILAI;
- f. Metode-6 dengan elemen kunci NTPN, NILAI;
- g. Metode-7 dengan elemen kunci BULAN NTPN, AKUN, NILAI;
- h. Metode-8 dengan elemen kunci NTPN.

Hasil Rekonsiliasi:

i. Data Awal Rekonsiliasi

(dalam rupiah)

DATA AWAL	SAU		SAI		Selisih	
	Trx	Nilai	Trx	Nilai	Trx	Nilai
	1.426.552	131.749.456.443.024	1.361.189	131.345.476.036.118	65.363	403.980.406.906

ii. Hasil Rekonsiliasi 8 Metode

(dalam rupiah)

URAIAN	ELEMEN KUNCI	SAU	SAI			
		Trx	Nilai	Trx	Nilai	
Metode-1	NTPN, TGL. NTPN, AKUN, NILAI	1.340.395	131.060.264.610.082	1.340.395	131.060.264.610.082	
Metode-2	NTPN, AKUN, NILAI	3.986	36.730.186.907	3.986	36.730.186.907	
Metode-3	NTPN, TGL. NTPN, NILAI	1.311	73.878.329.900	1.311	73.878.329.900	
Metode-4	TGL. NTPN, AKUN, NILAI	5.296	50.232.300.702	5.296	50.232.300.702	
Metode-5	NTB/NTP, AKUN, NILAI	813	511.905.218	813	511.905.218	
Metode-6	NTPN, NILAI	424	4.390.652.069	424	4.390.652.069	
Metode-7	BULAN NTPN, AKUN, NILAI	712	9.988.345.892	712	9.988.345.892	
Metode-8	NTPN	3.126	62.428.122.294	3.216	58.950.153.059	
Unmatch		70.399	451.031.989.960	5.036	50.529.552.289	
JUMLAH		1.426.462	131.749.456.443.024	1.361.189	131.345.476.036.118	

Selisih antara SAI dan SAU sebesar Rp403.980.406.906,00 terdiri atas:

- a. SAI *match* SAU namun selisih nilai sebanyak 3.216 transaksi sebesar Rp3.477.969.235,00;
- b. SAI *unmatch* sebanyak 5.036 sebesar Rp50.529.552.289,00;
- c. SAU *unmatch* sebanyak 70.399 sebesar Rp451.031.989.960,00.

Terhadap selisih SAI dan SAU tersebut DJBC telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meminta konfirmasi kepada Satker-Satker yang memiliki data *unmatch* dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal S-121/BC.1/2012 untuk menjelaskan penyebab *unmatch* dilengkapi dokumen pendukung terkait.
- b. Meminta sampling dokumen sumber berupa SSPCP dan BPN terkait data SAU *unmatch* dengan nilai di atas 500 juta kepada KPPN Jakarta I, II, III, IV, V, Surabaya I, dan Surabaya II.

- c. Melakukan pengecekan data SAU *unmatch* ke database Sistem Ekspor dan Impor DJBC untuk mengetahui kemungkinan adanya data pembayaran yang belum tercatat di SAI.

Tim Pemeriksa BPK juga melakukan penelusuran dan pengujian terhadap hasil langkah-langkah yang dilakukan DJBC. Berdasarkan kesepakatan antara DJBC dan Tim BPK diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Atas data SAI *match* SAU namun terdapat selisih nilai sebanyak 3.216 transaksi sebesar Rp3.477.969.235,00, diketahui sebanyak 2.270 sebesar Rp1.619.976.858,00 disebabkan karena pada saat penginputan dan transfer ke SAI terjadi pergeseran, terba klik, dan adanya notul (dua kali pembayaran namun di SAI tercatat satu transaksi). Dari data tersebut yang belum dapat ditelusuri adalah sebanyak 946 transaksi sebesar Rp1.857.99.237,00.
- Atas SAI *unmatch* sebanyak 5.036 sebesar Rp50.529.552.289,00, diketahui sebanyak 2.964 transaksi sebesar Rp45.246.897.007,00 merupakan data *cut off*, ganda, dan salah input. Dari data tersebut yang belum dapat ditelusuri adalah sebanyak 2.072 transaksi dengan nilai sebesar Rp5.282.655.282,00.
- Atas SAU *unmatch* sebanyak 70.399 sebesar Rp451.031.989.960,00, diketahui sebanyak 15.807 transaksi sebesar Rp318.210.133.495,00 merupakan pasangan SAI *unmatch* salah input yang ada di sistem DJBC serta hasil sampling KPPN yang belum tercatat di SAI. Dari data tersebut yang belum dapat ditelusuri adalah sebanyak 54.592 transaksi dengan nilai sebesar Rp132.821.856.465,00.

2. Rekonsiliasi Pengembalian Penerimaan Perpajakan

(dalam rupiah)

KODE AKUN	SAU		SAI		Selisih	
	trx	nilai	trx	nilai	trx	nilai
411123	1	12.297.000	-	-	1	12.297.000
411211	1	3.000.000	-	-	1	3.000.000
411212	1	13.923.000	-	-	1	13.923.000
411511	10	1.837.965.140	10	1.837.965.140	-	-
411512	1	120.000.000	1	120.000.000	-	-
411513	1	95.614.200	1	95.614.200	-	-
411514	3	1.767.006.000	3	1.767.006.000	-	-
412111	2.619	144.263.932.752	2.619	144.263.932.752	-	-
412113	1.952	80.403.706.941	1.952	80.403.706.941	-	-
412114	858	362.112.439.616	858	362.112.439.616	-	-
412119	4	32.014.525	4	32.014.525	-	-
412211	177	100.489.042.571	177	100.489.042.571	-	-
412213	1	620.349.800	1	620.349.800	-	-
JUMLAH	5.629	691.771.291.545	5.626	691.742.071.545	3	29.220.000

Selisih SAU dan SAI sebesar Rp29.220.000,00 disebabkan karena adanya 3 (tiga) transaksi pengembalian pendapatan yang bukan merupakan akun pendapatan bea dan cukai.

B.3.5 Pergeseran Anggaran Uang Ganjaran dari BA Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA 015) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pemberian uang ganjaran didasarkan pada PMK 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi. Sejak bulan Oktober 2011 atas pengelolaan uang ganjaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan pergeseran anggaran dari belanja bagian anggaran belanja lainnya (999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA 015). Peraturan yang menjadi dasar adanya pergeseran anggaran belanja belanja tersebut adalah:

1. Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari BA BUN pengelola belanja lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

Kewenangan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA Kementerian/Lembaga adalah Menteri Keuangan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Anggaran belanja yang dilakukan pergeseran dari BA 999.08 ke BA-K/L merupakan tambahan anggaran belanja K/L dan tidak menjadi dasar perhitungan untuk alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

Anggaran belanja yang dapat dilakukan pergeseran dari BA 999.08 ke BA-K/L digunakan untuk membiayai kegiatan dengan kriteria sebagai berikut.

1. Merupakan tugas dan fungsi serta dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang telah mempunyai Bagian Anggaran.
2. Dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan/atau pihak lain yang menerima penugasan.

Adapun tata cara pergeseran anggaran belanja uang ganjaran dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA-015) adalah sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan melakukan pergeseran anggaran belanja uang ganjaran dari BA 999.08 ke BA-015 dengan menerbitkan SP-SABA 999.08 (Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08);
2. SP-SABA 999.08 sekurang-kurangnya memuat satuan kerja yang menggunakan dana, kegiatan yang akan dibiayai, dan besaran alokasi dananya;
3. SP-SABA 999.08 tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai dasar usulan revisi anggaran;
4. Berdasarkan SP-SABA 999.08 tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran, dengan paling sedikit dilampiri dokumen sebagai berikut.
 - a. SP-SABA 999.08;
 - b. Catatan hasil penelaahan;
 - c. Revisi DIPA terakhir; dan
 - d. RKA-KL
5. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan terkait kesesuaian antara RKA-KL dengan SP-SABA 99.08 dengan catatan hasil penelaahan;
6. Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran menetapkan revisi RKA-KL;
7. Setelah menerima perubahan SP-RKA-KL dari Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan usulan revisi DIPA ke Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
8. Setelah revisi DIPA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan diterima oleh

DJBC, selanjutnya proses pencairan anggaran uang ganjaran melalui mekanisme pencairan DIPA biasa.

Selama tahun 2011 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerima SP-SABA 999.08 dari Direktorat Jenderal Anggaran untuk uang ganjaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor/Tanggal SP-SABA 999.08	Nomor/Tanggal DIPA	Nilai (Rupiah)
1.	STAP-0022/AG/2011, 11 Agustus 2011	0014/015-01.1.01/00/2011, 28 Oktober 2011	1.361.232.000,00
2.	STAP-0055/AG/2011, 11 Oktober 2011	0014/015-01.1.01/00/2011, 22 November 2011	4.773.029.000,00
3.	STAP-0055/AG/2011, 11 Oktober 2011	0014/015-01.1.01/00/2011, 16 Desember 2011	500.000.000,00
Jumlah			6.634.261.000,00

Selama peralihan pengelolaan uang ganjaran dari BA Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Keuangan (BA-015) Tahun Anggaran 2011, satuan kerja yang telah mendapatkan uang ganjaran adalah sebagai berikut:

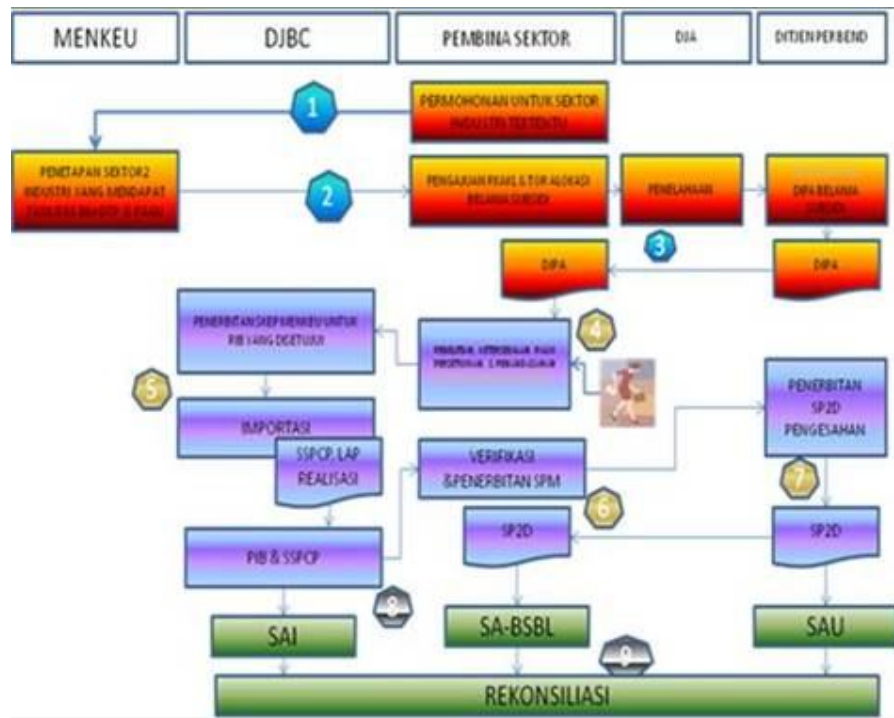
No.	Nama Kantor	Nilai (Rupiah)	Keterangan
1.	KPPBC Gresik	361.252.000,00	SP-SABA Nomor STAP-0055/AG/2011, 11 Oktober 2011
2.	KPPBC Tanjung Emas	999.980.000,00	SP-SABA Nomor STAP-0055/AG/2011, 11 Oktober 2011
3.	KPPBC Tanjung Perak	500.000.000,00	SP-SABA Nomor STAP-0055/AG/2011, 11 Oktober 2011
4.	KPU Tanjung Priok	998.866.000,00	SP-SABA Nomor STAP-0055/AG/2011, 11 Oktober 2011
5.	KPPBC Merak	500.000.000,00	SP-SABA Nomor STAP-0055/AG/2011, 11 Oktober 2011
6.	Kanwil DJBC Kalbagtim	499.906.000,00	SP-SABA Nomor STAP-0055/AG/2011, 11 Oktober 2011
7.	KPPBC Banjarmasin	500.000.000,00	SP-SABA Nomor STAP-0055/AG/2011, 11 Oktober 2011
8.	KPPBC Dumai	423.506.000,00	SP-SABA Nomor STAP-0055/AG/2011, 11 Oktober 2011
9.	KPPBC Soekarno Hatta	500.000.000,00	SP-SABA Nomor STAP-0055/AG/2011, 11 Oktober 2011
10.	Kanwil DJBC Jawa Timur II	446.949.000,00	SP-SABA Nomor STAP-0055/AG/2011, 11 Oktober 2011
11.	KPPBC Ngurah Rai	403.802.000,00	SP-SABA Nomor STAP-0055/AG/2011, 11 Oktober 2011
12.	KPPBC Bandar Lampung	500.000.000,00	SP-SABA Nomor STAP-0055/AG/2011, 11 Oktober 2011

B.3.6 Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP)

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga daya tahan dunia usaha dan meningkatkan daya saing usaha dan industri, maka Pemerintah melalui kebijakan fiskalnya memberikan fasilitas bea masuk yang ditanggung pemerintah (BM DTP). Pemberian BM DTP diawali dengan adanya dampak krisis pertengahan tahun 2008 yang masih terasa sampai saat ini. Melalui pemberian BMDTP diharapkan penyediaan barang dan jasa bagi kepentingan umum dapat terpenuhi. Selain itu, sektor riil yang sempat terguncang dapat bertahan dan meningkatkan daya saingnya. Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas BM DTP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 236/PMK.05/2011 secara umum yaitu:

- a. Proses *Planning* (Perencanaan) yaitu berdasarkan permohonan dari Instansi Pembina Sektor, Menteri Keuangan setiap tahunnya menetapkan sektor-sektor industri yang mendapat insentif fiskal berupa BM DTP sesuai kriteria penilaian tertentu;
- b. Proses *Budgeting* (Penggangan) yaitu berdasarkan penetapan insentif fiskal per sektor, masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran Instansi Pembina Sektor mengajukan RKA-KL alokasi belanja subsidi insentif BM DTP yang akan diberikan kepada perusahaan penerima kepada Ditjen Anggaran untuk selanjutnya diterbitkan DIPA Belanja Subsidi BM DTP;
- c. Proses *Execution* (Pelaksanaan) yaitu:
 - 1) Perusahaan calon penerima insentif BM DTP mengajukan penandasahan RIB (Rencana Impor Barang) kepada Instansi Pembina Sektor (IPS). Selanjutnya RIB yang telah ditandasahkan oleh perusahaan diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan;
 - 2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan insentif fiskal BM DTP kepada perusahaan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan pemberian BM DTP;
 - 3) Berdasarkan SKMK pemberian BM DTP tersebut, perusahaan melaksanakan importasi barang dan menyelesaikan formalitas kepabeanan di KPPBC pelabuhan bongkar;
 - 4) KPPBC pelabuhan bongkar melakukan pemotongan kuota BM DTP dan menatausahakan dokumen PIB+SSPCP BM DTP serta mengirimkan laporan realisasi BM DTP beserta dokumen terkait kepada Kantor Pusat DJBC;
 - 5) Selanjutnya Laporan realisasi BM DTP beserta dokumen SSPBC+PIB ditatausahakan dan disampaikan kepada Satker Belanja Subsidi BM DTP dalam hal ini Instansi Pembina Sektor sebagai dasar penerbitan SPM.
- d. Proses *Accountability & Reporting* (Pertanggungjawaban dan Pelaporan):
 - 1) Berdasarkan dokumen PIB dan SSPCP BM DTP dari DJBC, Kuasa PA Belanja Subsidi BM DTP menerbitkan SPM kepada Kuasa BUN dalam hal ini KPPN Jakarta II untuk diterbitkan SP2D Pengesahan;
 - 2) SP2D pengesahan digunakan sebagai dasar untuk mencatat Laporan Realisasi Penerimaan BM DTP yang dicatat oleh Satker Kantor Pusat DJBC;
 - 3) SPM dan SP2D Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam huruf d digunakan sebagai dasar pencatatan realisasi belanja subsidi BM DTP yang dicatat oleh Satker Belanja Subsidi BM DTP melalui Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain;
 - 4) Setiap Triwulan dilakukan rekonsiliasi antara realisasi penerimaan BM DTP Satker Kantor Pusat DJBC, realisasi belanja subsidi BM DTP Satker Belanja Subsidi Instansi Pembina Sektor, dan Kuasa BUN.

ALUR PROSES BISNIS BM DTP



BM DTP TAHUN 2011

Pemberian Insentif Bea Masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) Tahun 2011 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tanggal 31 Desember 2010. BM DTP diberikan kepada Industri Sektor tertentu dengan kriteria penilaian:

- memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen;
- meningkatkan daya saing;
- meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan
- meningkatkan pendapatan negara.

BM DTP tidak diberikan atas:

- Barang dan bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
- Barang dan bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
- Barang dan bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti *Dumping*/Bea Masuk Anti *Dumping* Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
- Barang dan bahan yang diimpor ke dalam Kawasan Berikat menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor dengan mendapat penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
- Barang dan bahan yang diimpor dalam rangka pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor

Tujuan Ekspor.

Pagu BM DTP Tahun 2011

Pada awalnya Pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan pagu BM DTP tahun 2011 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 sebesar 1 (satu) triliun rupiah. Kemudian direvisi pada triwulan III tahun 2011 menjadi 500 Miliar dengan APBN-P yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Dari total pagu BM DTP 500 miliar tersebut, Kementerian Keuangan berdasarkan usulan dari Instansi Pembina Sektor Industri terkait hanya menerbitkan PMK tentang alokasi BM DTP tahun 2011 sebesar Rp325.119.500.000,00 yang terdiri atas:

NO	Sektor Industri	Instansi Pembina Sektor	PMK	Pagu Anggaran yang Dialokasikan (Rp)
1.	Alat besar	Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	103/PMK.011/2011	57.467.500.000,00
2.	Listrik	Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	104/PMK.011/2011	3.446.000.000,00
3.	Ballpoint	Ditjen Basis Industri Manufaktur (BIM)	105/PMK.011/2011	880.000.000,00
4.	Karpet	Ditjen Basis Industri Manufaktur (BIM)	106/PMK.011/2011	9.056.000.000,00
5.	Kendaraan bermotor	Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	107/PMK.011/2011	106.136.500.000,00
6.	Perkeretaapian	Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	108/PMK.011/2011	6.192.500.000,00
7.	Kapal	Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	109/PMK.011/2011	20.042.500.000,00
8.	Elektronik	Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	110/PMK.011/2011	12.500.000.000,00
9.	Kabel serat optik	Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	111/PMK.011/2011	5.350.000.000,00
10.	Telekomunikasi	Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	112/PMK.011/2011	6.450.000.000,00
11.	Toner	Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	113/PMK.011/2011	337.500.000,00
12.	Plastik	Ditjen Basis Industri Manufaktur (BIM)	114/PMK.011/2011	49.267.500.000,00
13.	Resin	Ditjen Basis Industri Manufaktur (BIM)	115/PMK.011/2011	7.734.000.000,00
14.	Sorbitol	Ditjen Basis Industri Manufaktur (BIM)	116/PMK.011/2011	385.500.000,00
15.	Pesawat terbang	Ditjen Perhubungan Udara	117/PMK.011/2011	38.034.000.000,00
16.	Kemasan infus	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	118/PMK.011/2011	1.840.000.000,00
TOTAL				325.119.500.000,00

Permasalahan yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan BM DTP Tahun 2011 ini masih ditemukan kendala-kendala diantaranya:

- a. Keterlambatan penerbitan PMK yang mengatur mengenai alokasi pagu BM DTP tahun 2011 yang disebabkan adanya kebijakan untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu kepada setiap perusahaan yang akan menerima fasilitas BM DTP dengan tujuan agar BM DTP tahun 2011 sesuai untuk peruntukannya dan tidak disalahgunakan. Impor atas barang yang mendapatkan fasilitas BM DTP baru dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2011;

- b. DIPA Belanja Subsidi Instansi Pembina Sektor Ditjen Bidang Industri Manufaktur Tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 belum ada sehingga proses pengajuan SPM belum dapat dilaksanakan pada awal Desember 2011;
- c. Realisasi importasi dengan menggunakan fasilitas BM DTP masih dimungkinkan terjadi sampai dengan akhir tahun 2011 mengingat batas waktu penggunaan fasilitas tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.011/2010 tanggal 31 Desember 2010 adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, sedangkan batas waktu pengajuan SPM ke KPPN paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Upaya yang Telah Dilakukan DJBC

Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul sebagaimana tersebut di atas, selama tahun 2011 DJBC melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi antara DJBC, Instansi Pembina Sektor dan KPPN Jakarta II untuk mendapatkan persepsi yang sama mengenai alur proses BM DTP dan fungsi masing-masing pihak dalam proses BM DTP;
- b. Melakukan klarifikasi data realisasi penerimaan BM DTP Tahun 2011 antara Kantor Pusat, KPPBC/KPU BC, dan Para Instansi Pembina Sektor untuk menyakini realisasi BM DTP yang akan dipertanggungjawabkan baik oleh DJBC maupun oleh Instansi Pembina Sektor;
- c. Mendorong penyelesaian DIPA Belanja Subsidi BM DTP tahun 2011 Satker Ditjen Bidang Industri Manufaktur baik di internal Ditjen Bidang Industri Manufaktur sendiri maupun Unit terkait seperti BKF, Ditjen Perbendaharaan, maupun Ditjen Anggaran.

Realisasi BM DTP Tahun 2011

Nilai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) yang telah direalisasikan impornya selama tahun 2011 adalah sebesar Rp73.310.676.000,00, sedangkan nilai BM DTP yang telah direalisasikan SP2D oleh Instansi Pembina Sektor yaitu sebesar Rp73.117.396.000,00 sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp193.280.000,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

INSTANSI PEMBINA SEKTOR	PMK	REALISASI BM DTP	REALISASI SPM/SP2D BM DTP	SELISIH
Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	103/PMK.011/2011	12.201.434.000	12.201.434.000	-
Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	104/PMK.011/2011	-	-	-
Ditjen Basis Industri Manufaktur (BIM)	105/PMK.011/2011	593.544.000	593.544.000	-
Ditjen Basis Industri Manufaktur (BIM)	106/PMK.011/2011	438.740.000	438.740.000	-
Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	107/PMK.011/2011	32.004.599.000	32.004.599.000	-
Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	108/PMK.011/2011	-	-	-
Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	109/PMK.011/2011	1.327.722.000	1.327.722.000	-
Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	110/PMK.011/2011	1.981.864.000	1.981.864.000	-
Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	111/PMK.011/2011	-	-	-
Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	112/PMK.011/2011	4.282.967.000	4.282.967.000	-
Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)	113/PMK.011/2011	-	-	-
Ditjen Basis Industri Manufaktur (BIM)	114/PMK.011/2011	15.797.883.000	15.677.326.000	120.557.000
Ditjen Basis Industri Manufaktur (BIM)	115/PMK.011/2011	1.817.763.000	1.817.763.000	-
Ditjen Basis Industri Manufaktur (BIM)	116/PMK.011/2011	-	-	-
Ditjen Perhubungan Udara	117/PMK.011/2011	1.178.584.000	1.105.861.000	72.723.000

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	118/PMK.011/2011	1.685.576.000	1.685.576.000	-
TOTAL		73.310.676.000	73.117.396.000	193.280.000

Berdasarkan data tersebut, realisasi BM DTP atas impor barang tahun 2011 belum semuanya dapat diajukan SPM/SP2D BM DTPnya oleh Instansi Pembina Sektor yaitu:

- a. Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp72.723.000,00 karena permohonan dispensasi penyampaian SPM BM DTP tahun 2011 yang diajukan oleh yang bersangkutan dengan surat Nomor KU.006/1/3/DRJU.2012 tanggal 26 Januari 2012 belum mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Sistem Perbendaharaan;
- b. Ditjen Bidang Industri Manufaktur sebesar Rp120.557.000,00 (Rp390.557.000,00 - Rp270.000.000,00) karena:
 - terdapat kesalahan perhitungan atas SP2D Nomor 941332W tanggal 31 Desember 2011 dari yang seharusnya Rp4.403.169.000,00 namun tertulis Rp4.673.169.000,00 sehingga nilai SPM/SP2D kelebihan sebesar Rp270.000.000,00;
 - terdapat realisasi BM DTP atas PIB Nomor 038990 tanggal 30 Desember 2011 a.n PT Polidayaguna Perkasa sebesar Rp390.557.000,00 yang belum disampaikan kepada Ditjen Bidang Industri Manufaktur.

Untuk mengantisipasi selisih realisasi BM DTP tahun 2011 yang belum diterbitkan SPM/SP2D tersebut, DJBC telah melakukan hal-hal berikut.

- a. menyampaikan permasalahan kekurangan realisasi BM DTP tahun 2011 yang belum diajukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Ditjen Bidang Industri Manufaktur untuk selanjutnya dapat diajukan SPMnya atas kekurangan sebesar Rp120.557.000,00 dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Sistem Perbendaharaan;
- b. menyampaikan permasalahan realisasi BM DTP tahun 2011 kepada Direktur Sistem Perbendaharaan sebagai bahan pertimbangan pemberian dispensasi penyampaian SPM/SP2D kepada Ditjen Bidang Industri Manufaktur dan Ditjen Perhubungan Udara.

B.3.7 REKONSILIASI DATA SAI DAN SAU PADA BAPEPAM LK

Pada bulan Januari 2012, Bapepam LK telah melakukan rekonsiliasi antara data SAI dan data SAU di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Nomor BAR-228/SM.II/PB.6.4/2012 tanggal 19 Januari 2012. Adapun hasil rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	SAU (Rp)	SAI (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Pagu Belanja	199.236.145.000	199.236.145.000	0
2	LRA Belanja	140.999.075.196	140.999.075.196	0
3	LRA Pengembalian Belanja	33.927.618	33.927.618	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	LRA Pendapatan	95.528.398.295	95.072.195.602	456.202.693
6	LRA Pengembalian Pendapatan	0	0	0

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat selisih LRA Pengembalian Belanja dan LRA pendapatan antara SAI dan SAU. Perbedaan tersebut dituangkan dalam BAR dan lampirannya (BAR beserta lampirannya dapat dilihat pada lampiran VI).

B.3.8 Bantuan Tenaga Ahli Luar Negeri Bapepam LK

Pada tahun anggaran 2011, Bapepam LK menerima bantuan dari luar negeri berupa tenaga ahli dengan rincian sebagai berikut:

No.	Negara Asing/Donor	Jenis Bantuan	Proyek	Periode	Konsultan
1.	The Australian Government overseas aid program (AusAID)	Technical Assistance	Government Partnership Fund (GPF)	GPF I : 2005 – 2010	
		a. Australian Securities and Investment Commission (ASIC)		GPF II: Okt 2010 – Des. 2013	Steven Bardy
		b. Australian Prudential Regulation Authority (APRA)	Risk Based Supervision		
		Technical Assistance of AIPEG	Financial Sector Sub-Facility	2010-2011	Gavin Forte
2.	Asian Development Bank (ADB)*	Technical Assistance	TA 7466-INO: Strengthening Indonesia's Capital Market	2011 – 2013	Fariz Rabidin 1. Harry Wiguna 2. Whzary Wardaya
3.	Islamic Development Bank (IDB)	Technical Assistance	Strengthening Capacity and Institutional Building for Sharia Finance Industry	Planned to start at the end of 2011	-
4.	Japan International Cooperation Agency (JICA)	Technical Assistance	Assistance for Bapepam-LK in Capital Market and Financial Institutions Development Policy	2010 – 2011	Shigero Shinozaki
5.	Korea Development Institute (KDI)	Technical Assistance	Knowledge Sharing Program (KSP)	2010 – 2011 Selesai Juli 2011	-
6.	United States Agency for International Development (USAID)	Technical Assistance	Support for Economic Analysis and Development in Indonesia (SEADI)	16 Mar 2011- 31 Agt 2014	James R Hambric
7	World Bank	Technical Assistance	Study on Expanding	Dec 2009 –	-

			Islamic Financing Access to SME	July 2011	
			Other new upcoming projects	2011 – 2013	-

Bantuan dari luar negeri berupa tenaga ahli tersebut tidak masuk dalam DIPA Bapepam LK, kecuali untuk poin 2, masuk dalam DIPA Bapepam LK.

B.3.9 Belanja Hibah Luar Negeri Direktorat Jenderal Anggaran dan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan

a. Belanja Hibah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

Pada TA 2011 Direktorat Jenderal Anggaran memperoleh alokasi dana Hibah Luar Negeri (MDTF) sebesar Rp1.437.089.000,00. Dana hibah tersebut termasuk dalam kegiatan Pengembangan Sistem Penganggaran berupa *Study Visit* dan *Technical Assistance*. Sampai dengan 31 Desember 2011 alokasi dana Hibah Luar Negeri tersebut belum direalisasikan sama sekali karena hal-hal berikut.

- Study Visit ke Luar Negeri

Pelaksanaan *Study Visit* harus berkoordinasi dengan Bappenas dan lembaga pemberi hibah (*World Bank*), sedangkan pada tahun 2011 Bappenas tidak melaksanakan kegiatan tersebut, padahal sesuai dengan yang diatur dalam dokumen/komitmen bahwa kegiatan dimaksud dalam pelaksanaannya harus bersamaan dengan Bappenas. Sedangkan dengan *World Bank* yang sebelumnya merekomendasikan negara tujuan *study visit* sampai batas waktu yang telah ditentukan belum memberikan nama negara tujuan *study visit* dimaksud.

- Technical Assistance

Proses pengadaan jasa konsultan yang sudah berjalan dibatalkan karena dalam pelaksanaannya tidak mendapatkan tenaga konsultan yang memenuhi kriteria.

b. Belanja Hibah Luar Negeri pada Bapepam LK

Belanja Hibah Luar Negeri Bapepam LK merupakan belanja yang berasal dari hibah/*grant* *Asian Development Bank* (ADB) melalui *Technical Assistance* (TA) No. 7466-INO-INO : *Strengthening Indonesia's Capital Market* sebesar US\$ 1.500.000,00, yang pelaksanaannya dimulai bulan Maret 2010 sampai dengan Desember 2011. Melalui surat Nomor S-164/PU/2010 tanggal 10 Februari 2010, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan nomor register dari TA No. 7466-INO dimaksud yaitu 70999501.

Jumlah alokasi hibah/*grant* ADB yang dicantumkan pada DIPA Bapepam LK tahun 2011 sebesar USD636.340,00 (ekuivalen Rp5.886.145.000,00 dengan kurs USD 1 = Rp9.250,00).

Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2011 pengelolaan hibah TA 7466-INO sepenuhnya dilakukan oleh pihak ADB dengan metode pembayaran langsung dari ADB kepada pihak ketiga, sehingga Bapepam LK menerima hibah dimaksud dalam bentuk jasa konsultan dan jasa training.

Bapepam LK telah memproses pengesahan hibah dalam bentuk jasa dimaksud ke Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU)

dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan telah disahkan melalui Surat Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) Nomor 0078/PU.6/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan disampaikan Direktur EAS, DJPU melalui surat nomor S-87/PU.6/2012 tanggal 20 Januari 2012. Selain itu, Bapepam LK juga telah memproses pencatatan hibah dimaksud ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI dan telah disahkan melalui Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL.BJS) Nomor 00001/HIBAH ADB TA 7466 INO/2011 tanggal 31 Desember 2011. Namun demikian, karena hibah yang diperoleh Bapepam-LK berupa jasa, maka realisasi hibah tersebut dalam LRA Bapepam LK muncul sebagai belanja transaksi non kas dengan akun 522311 (Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah), sedangkan pagu hibah tersebut dicantumkan dalam DIPA Bapepam LK sebagai belanja transaksi kas dengan kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya).

Pencatatan pagu hibah pada DIPA Bapepam LK TA 2011 dengan menggunakan akun 521219 tersebut didasarkan pada pelaksanaan Hibah ADB pada TA 2010, dimana Pihak ADB selaku donor melakukan transfer uang dalam bentuk valas ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang didanai dari hibah tersebut. Sedangkan pada TA 2011, Pihak ADB melakukan pembayaran secara langsung kepada Pihak Ketiga atas kegiatan yang didanai dari hibah tersebut, sehingga realisasi belanja Hibah TA 2011 merupakan transaksi non kas dan dicatat sebagai akun 522311 (Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah).

Berdasarkan memo tersebut, realisasi Hibah TA 7466-INO Tahun 2011 dalam bentuk jasa adalah sebesar USD 336.388,78 setara dengan Rp3.050.373.457,00 (nilai tukar 1 USD = Rp9.068,00 per 30 Desember 2011).

B.3.10 Penerimaan Pinjaman Luar Negeri BKF

Dalam rangka membantu penyempurnaan manajemen keuangan Pemerintah Indonesia, *World Bank* telah memberikan pinjaman dengan nomor PHLN LN/Cr 4762-IND dan 4026-IDA: *Government Financial Management and Revenue Administration Project* (GFMRAP) sebesar USD1.661.730,32 setara dengan Rp15.121.745.912,00 (nilai tukar 1 USD = Rp9.100,00) .

Pinjaman tersebut berlaku efektif mulai tanggal 22 Maret 2005 dan mempunyai *closing date* tanggal 31 Desember 2013 serta telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan nomor 10694001 dan 10695701.

Pada Tahun Anggaran 2011 pagu anggaran untuk kegiatan GFMRAP sebesar Rp1.922.531.000,00. Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp1.909.705.929,00 atau 99,33 persen, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp12.825.071,00. Realisasi anggaran untuk kegiatan GFMRAP tersebut digunakan untuk membiayai beasiswa tugas belajar 7 pegawai BKF.

Sampai dengan akhir tahun 2011, realisasi pinjaman GFMRAP adalah sebagai berikut.

Realisasi Pinjaman GFMRAP
s.d. Tahun Anggaran 2011

Hibah		Realisasi	
Rp	15.121.745.912	Total	Rp 12.420.095.935
		Tahun 2005	Rp -
		Tahun 2006	Rp 2.264.060.478
		Tahun 2007	Rp 3.238.201.236
		Tahun 2008	Rp 1.848.740.727

	Tahun 2009	Rp	1.880.579.127
	Tahun 2010	Rp	1.278.808.438
	Tahun 2011	Rp	1.909.705.929

B.3.11 Penerimaan Hibah Luar Negeri Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal

a. Penerimaan Hibah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Pada tahun 2010 dan 2011 Ditjen Perimbangan Keuangan menerima hibah langsung dari luar negeri berbentuk jasa atau *technical assistance*. Daftar kegiatan/program yang didanai mitra pembangunan tersebut adalah:

- i. *Local Government Finance and Government Reform*
Hibah ini berupa *technical assistance* yakni Tim Konsultan ADB TA 7184 yang didanai oleh Asia Development Bank (ADB) dengan nilai komitmen sebesar USD1.500.000. Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2009 sampai dengan 31 Maret 2011 dengan realisasi sampai akhir 2011 sebesar USD811.296. Nilai ini belum memasukkan estimasi pengeluaran untuk Duke University *shortcourses* sebesar USD80.300 dan *International Conference* senilai USD75.000.
- ii. *Building Capacity for the Development of Sub National Government Capital Market s for Municipal Bonds (ACN 6)*
Hibah ini berasal dari *Decentralization Support Facility* (DSF) dengan komitmen awal senilai USD900.000. Kegiatan dilaksanakan sejak bulan November 2009 sampai dengan bulan Mei 2011 dengan realisasi sampai akhir 2011 sebesar USD338.149.
- iii. *Strengthening Data Provision to the Regional Financial Information System by Sub National Government with Stand Alone Electronic Data Bases (ACN 12)*
Hibah ini juga diperoleh dari *Decentralization Support Facility* (DSF) dengan komitmen awal senilai USD250.000. Kegiatan dilaksanakan sejak bulan November 2009 sampai dengan bulan April 2011 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar USD193.504.
- iv. *Improving the Policy Framework for Fiscal Decentralization (the Grand Design Fiscal Decentralization) (ACN 13)*
Hibah ini juga diperoleh dari *Decentralization Support Facility* (DSF) dengan komitmen awal senilai USD250.000. Kegiatan dilaksanakan sejak bulan November 2009 sampai dengan bulan Januari 2011 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2011 sebesar USD494.556.
- v. *Program Decentralisation as Contribution to Good Governance*
Hibah ini diperoleh dari *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)* dengan komitmen awal senilai Euro 8.000.000 untuk 4 Proyek di Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN, dan Bappenas. Kegiatan dilaksanakan sejak 18 Maret 2011 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2011 sebesar Euro 523.549.
- vi. *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD)*
Hibah ini diperoleh dari *Australian Aid (AusAID)* dengan komitmen awal senilai AUD62.000.000 yang dipergunakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas. Kegiatan dilaksanakan sejak 13 Januari 2011 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2011 sebesar AUD121.227.

b. Penerimaan Hibah pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

1) Hibah *Technical Assistance* ADB 4872-INO (70712601)

Dalam rangka membantu penyediaan infrastruktur di Indonesia, *World Bank* melalui *Asian Development Bank* berkomitmen untuk memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia dalam bentuk *Technical Assistance* dengan nomor PHLN 4872-INO: *Enhancing Private Sector Participation in Infrastructure Provision*.

Hibah tersebut berlaku efektif mulai tanggal 12 April 2007 dan mempunyai *closing date* tanggal 31 November 2011. Pihak ADB telah memperpanjang masa *closing date* sampai dengan tanggal 30 September 2012. Hibah dimaksud telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan nomor 70712601.

Pada Tahun Anggaran 2011 pagu anggaran untuk Hibah *Technical Assistance* ADB 4872-INO sebesar Rp5.000.000.000,00, yang terdiri dari:

- a) Belanja Barang Operasional sebesar Rp2.400.004.000,00.
- b) Belanja Jasa sebesar Rp2.399.995.000,00.
- c) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp200.001.000,00.

Dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp1.836.940.665,00 atau 36,74 persen, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp3.163.059.335,00. Realisasi anggaran untuk hibah *Technical Assistance* ADB 4872-INO tersebut merupakan realisasi belanja barang operasional yang berasal dari kegiatan workshop dan training.

Rendahnya realisasi pagu anggaran hibah tersebut disebabkan oleh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 namun belum mendapat pengesahan dari negara donor. Kegiatan tersebut berupa kegiatan Konsultan dan *Workshop/Training*.

Sampai dengan akhir tahun 2011, realisasi hibah *Technical Assistance* ADB 4872-INO adalah sebagai berikut:

Realisasi Hibah TA ADB 4872-INO
s.d. Tahun Anggaran 2011

Mata Uang	Rupiah	USD
Total Hibah	13.517.560.000	1.469.300,00
Total Realisasi	8.874.708.013	931.111,69
2007	-	-
2008	-	-
2009	3.731.850.491	373.185,05
2010	3.305.916.857	359.338,79
2011	1.836.940.665	198.587,85
Sisa Hibah	4.642.851.987	538.188,31

2) Hibah *Technical Assistance* ADB 7338-INO (71042601)

Asian Development Bank memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia untuk membantu memperkuat perekonomian Indonesia melalui sistem peringatan dini dalam bentuk *Technical Assistance* dengan nomor PHLN 7338-INO: *Strengthening Indonesia's Economic Early Warning System*. Hibah tersebut berlaku efektif mulai Agustus 2009 dan mempunyai *closing date* Juli 2011. Pihak ADB telah memperpanjang masa *closing date* sampai dengan tanggal 31

Juli 2012. Hibah dimaksud telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan nomor 71042601.

Realisasi Hibah *Technical Assistance* ADB 7338-INO (71042601) pada Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp986.102.000,00 yang merupakan hibah langsung luar negeri dalam bentuk jasa.

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Posisi Neraca Kementerian Keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: Aset sebesar **Rp101.349.409.297.605,00**; Kewajiban sebesar **Rp806.982.593.139,00**; dan Ekuitas Dana sebesar **Rp100.542.426.704.466,00**.

Nilai Aset per 31 Desember 2011 sebesar **Rp101.349.409.297.605,00** terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp62.816.187.789.195,00**; Aset Tetap sebesar **Rp37.731.845.000.870,00**; dan Aset Lainnya sebesar **Rp801.376.507.540,00**.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2011 sebesar **Rp806.982.593.139,00** terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp806.982.593.139,00** dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar **Rp0,00**.

Nilai Ekuitas Dana per 31 Desember 2011 sebesar **Rp100.542.426.704.466,00** terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar **Rp62.084.362.174.070,00** dan Ekuitas Dana Investasi sebesar **Rp38.458.064.530.396,00**.

Komposisi Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 47 berikut.

Tabel 47

Komposisi Neraca Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

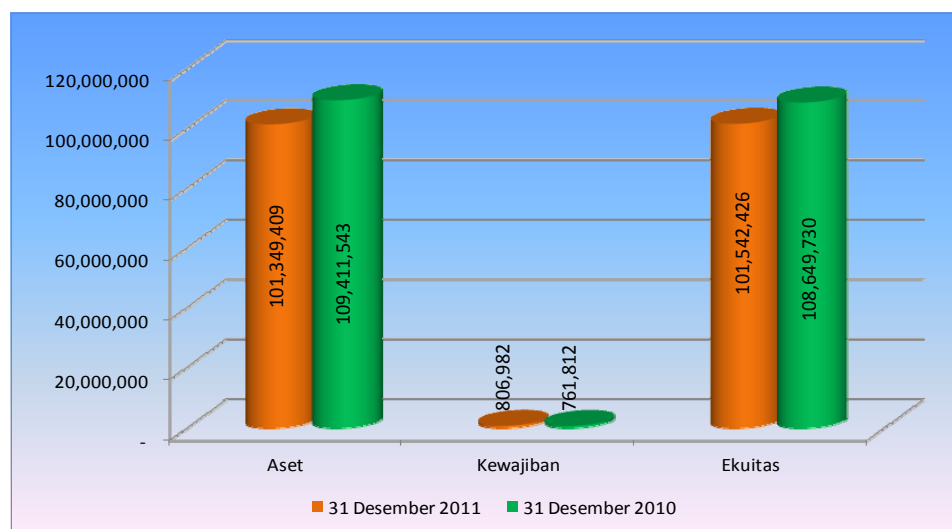
Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Aset	101.349.409.297.605	109.432.138.938.078	(8.082.729.640.473)	(7,39)
Kewajiban	806.982.593.139	761.816.067.975	45.166.525.164	5,93
Ekuitas Dana	100.542.426.704.466	108.670.322.870.103	(8.127.896.165.637)	(7,48)

Komposisi Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Grafik 17 berikut.

Grafik 17

Komposisi Neraca Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam juta rupiah)



C.2 PENJELASAN PER POS NERACA**C.2.1 Aset Lancar****C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp1.439.660.756,00

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar **Rp1.439.660.756,00** dan **Rp2.253.757.563,00**. Saldo tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang belum disetor dan bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan Bendahara Pengeluaran ke Kas Negara pada tanggal neraca.

Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran pada unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 48 berikut.

Tabel 48
Kas di Bendahara Pengeluaran Per Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
SETJEN	(1.279.591.407)	44.294.149	(1.323.885.556)	(2.988,85)
DJP	1.325.869.577	1.277.176.465	48.693.112	3,81
DJBC	991.716.122	413.703.068	578.013.054	139,72
DJPB	210.947.593	211.371.045	(423.452)	(0,20)
DJKN	190.631.871	262.704.258	(72.072.387)	(27,43)
BPPK	87.000	44.508.578	(44.421.578)	(99,80)
JUMLAH	1.439.660.756	2.253.757.563	(814.096.807)	(36,12)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.439.660.756,00 merupakan saldo rekening koran bank yang dibuka oleh Bendahara Pengeluaran untuk kepentingan operasional, saldo kas tunai (brankas), dan kuitansi-kuitansi yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Rincian daftar rekening bank dapat dilihat pada Lampiran Daftar Rekening Dipertahankan.

Khusus untuk unit Eselon I Setjen, saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar minus Rp1.279.591.407,00 disebabkan kelebihan penyetoran saldo ke rekening Kas Umum Negara (KUN). Adapun kelebihan penyetoran tersebut telah diselesaikan pada TA 2012.

C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp3.060.880.248,00

Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp3.060.880.248,00 dan Rp4.068.349.035,00. Nilai tersebut mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

Posisi Kas di Bendahara Penerimaan pada unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 49 berikut.

Tabel 49
Kas di Bendahara Penerimaan Per Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DJBC	884.854.990	315.258.156	569.596.834	180,68
DJKN	2.176.025.158	3.741.330.879	(1.565.305.721)	(41,84)
BPPK	100	11.760.000	(11.759.900)	(100,00)
JUMLAH	3.060.880.248	4.068.349.035	(1.007.468.787)	(24,76)

C.2.1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan Setara
 Kas Rp8.115.195.871,00*

Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp8.115.195.871,00 dan Rp2.149.709.248,00. Nilai tersebut terdiri dari bunga dan jasa giro rekening Bendahara Pengeluaran yang belum menerapkan *Treasury Notional Pooling* (TNP) dan uang pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Pendapatan bunga jasa giro yang berasal dari rekening Bendahara Penerimaan yang belum disetor dapat dilihat di akun Kas di Bendahara Penerimaan.

Posisi Kas Lainnya dan Setara Kas pada unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 50 berikut.

Tabel 50
Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)	%
SETJEN	3.406.882.454	-	3.406.882.454	0,00
ITJEN	4.537.500	347.313.001	(342.775.501)	(98,69)
DJA	801.369.450	933.012.949	(131.643.499)	(14,11)
DJP	287.441.232	40.184.358	247.256.874	615,31
DJBC	344.534.657	132.481.338	212.053.319	160,06
DJPB	838.930.772	179.296.340	659.634.432	367,90
DJKN	1.999.836.105	33.114.133	1.966.721.972	5939,22
BAPEPAM-LK	315.151.750	418.436.050	(103.284.300)	(24,68)
BPPK	9.045.651	65.841.779	(56.796.128)	(86,26)
BKF	107.466.300	29.300	107.437.000	366,68
JUMLAH	8.115.195.871	2.149.709.248	5.965.486.623	277,50

Saldo Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.149.709.248,00. Saldo tersebut telah seluruhnya disetor ke kas negara dan diserahkan kepada pihak lain pada Tahun Anggaran 2011.

Kas pada BLU
Rp2.168.961.124.597,00

C.2.1.4 Kas pada BLU

Nilai Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp2.168.961.124.597,00 dan Rp1.085.722.227.076,00.

Posisi Kas pada Badan Layanan Umum pada unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 51 berikut.

Tabel 51
Kas pada Badan Layanan Umum Per Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)	%
SETJEN	2.152.191.089.517	1.070.744.238.147	1.081.446.851.370	101,00
BPPK	16.770.035.080	14.977.988.929	1.792.046.151	11,96
JUMLAH	2.168.961.124.597	1.085.722.227.076	1.083.238.897.521	99,77

Penjelasan Kas pada Badan Layanan Umum

1. Nilai sebesar Rp2.152.191.089.517,00 di Setjen merupakan besaran kas di bank milik PIP (baik dalam bentuk giro maupun deposito jangka pendek), yang terdiri dari Kas Tunai, Kas di Rekening Pendapatan Giro Dollar AS (Bank BRI dengan nomor rekening 0329.02.0002255.30.2), Kas di Rekening Bendahara Penerimaan (Bank BRI dengan nomor rekening 0329.01.002911.30.6) untuk pendapatan yang telah disahkan dan tercatat pada Kas Negara serta Kas Di Bendahara Pengeluaran (Bank Mandiri dengan nomor rekening 122-00-0488802-3).

Pengelolaan kas untuk pendapatan dan belanja yang telah disahkan dan belum disahkan dikelola dalam rekening bersama. Untuk pendapatan dikelola dalam rekening pendapatan dan untuk belanja dikelola dalam rekening bendahara pengeluaran. Rincian Kas baik untuk Kas pada BLU maupun Kas di Bendahara Pengeluaran serta Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya disajikan secara gabungan pada Tabel 52 berikut.

Tabel 52
Rincian Kas

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Jumlah
1	2	3
1	Deposito BRI (16 bilyet)	610.000.000.000
2	Deposito Bank Mandiri (7 bilyet)	290.000.000.000
3	Deposito BNI (6 bilyet)	396.000.000.000
4	Deposito BTN (4 bilyet)	130.000.000.000
5	Deposito Bank Bukopin (6 bilyet)	140.000.000.000
6	Deposito Bank Muamalat (10 bilyet)	352.500.000.000
7	Deposito Bagari (1 bilyet)	40.000.000.000
8	Deposito bjb Syariah (1 bilyet)	37.500.000.000
9	Deposito Syariah Bukopin (3 bilyet)	40.500.000.000
10	Deposito Sumut (2 bilyet)	91.500.000.000
11	Deposito Bank bjb (1 bilyet)	22.000.000.000
12	Deposito Pendapatan DPPN BRI (1 bilyet)	70.000.000.000
13	Kas di Rekening Pendapatan DPPN	4.767.621.862
14	Kas di Bendahara Pengeluaran	199.264.346
15	Kas di Rekening Pendapatan	2.367.585.501
16	Kas di Rekening Pendapatan Giro Dollar AS	13.243.451
17	Kas BLU yang dibukukan pada RIDI-DPPN	1.000.000
18	Selisih Kurs	(647.731)
19	Pembulatan	102
	Jumlah	2.227.348.067.531

Tabel 53
Rincian Kas Berdasarkan Kode Akun

Kode akun	Uraian	Jumlah Rupiah
1	2	3
111911	Kas pada BLU	Rp 2.152.191.089.517
111711	Kas pada Bendahara Penerimaan	Rp -
154413	Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	Rp 75.156.978.014
	Jumlah	Rp 2.227.348.067.531

Berdasarkan Tabel Rincian Kas berdasarkan kode akun, terdapat Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp75.156.978.014,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya akan dijelaskan pada kelompok akun Aset Lainnya.

2. Nilai sebesar Rp16.770.035.080,00 di BPPK merupakan Saldo Kas pada BLU STAN. Rincian Saldo Kas pada BLU STAN sebagai berikut:

No	Uraian Kas	Jumlah (Rp)
1	Saldo Rekening Koran	16.492.821.316
2	Saldo Kas Tunai	124.467.100
3	Uang Muka Kerja	277.183.796
4	Cek Beredar	(124.437.132)
	Jumlah	16.770.035.080

C.2.1.5 Piutang Pajak

Piutang Pajak
Rp60.246.153.293.302,00

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp60.246.153.293.302,00 dan Rp70.945.271.446.620,00. Apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2010 mengalami penurunan sebesar Rp10.699.118.153.318,00 atau 15,08 persen.

Posisi Piutang Pajak pada unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 54 berikut.

Tabel 54
Piutang Pajak Neto Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
DJP	40.595.674.369.318	54.008.060.540.425	(13.412.386.171.107)	(24,83)
DJBC	19.650.478.923.984	16.937.210.906.195	2.713.268.017.789	16,02
Jumlah	60.246.153.293.302	70.945.271.446.620	(10.699.118.153.318)	(15,08)

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2011 sebesar Rp60.246.153.293.302,00 merupakan nilai neto setelah dilakukan penyisihan terhadap piutang. Adapun nilai bruto dan penyisihan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 55 berikut.

Tabel 55
Piutang Pajak Bruto Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Eselon I	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Netto
DJP	86.801.366.456.341	(46.205.692.087.023)	40.595.674.369.318
DJBC	21.262.095.927.300	(1.611.617.003.316)	19.650.478.923.984
JUMLAH	108.063.462.383.641	(47.817.309.090.339)	60.246.153.293.302

Saldo Piutang Pajak bruto per 31 Desember 2011 sebesar Rp108.063.462.383.641,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai Piutang Pajak pada DJP per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp86.801.366.456.341,00 dan Rp54.008.060.540.425,00 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum mendapat pelunasan sampai dengan 31 Desember 2011.

Rincian Piutang Pajak per Jenis Pajak per 31 Desember 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 56 berikut.

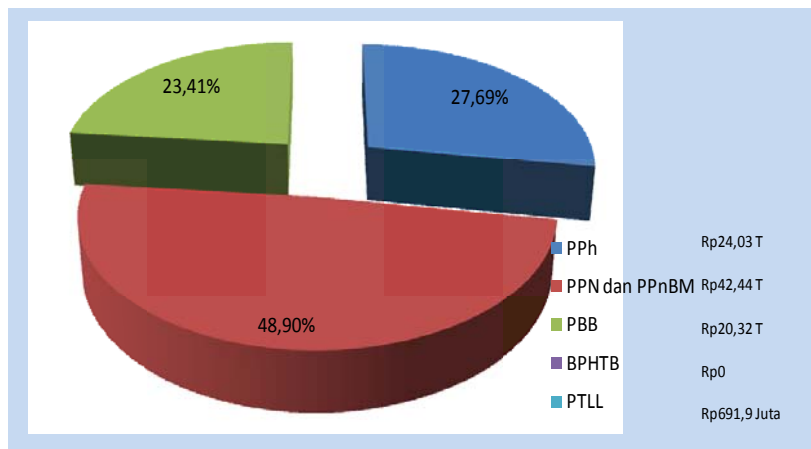
Tabel 56
Rincian Piutang Pajak Per Jenis Pajak Yang Dicatat di DJP
Per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Piutang PPh Pasal 21	1.085.067.767.115	1.266.406.447.889	(181.338.680.774)	(14,32)
Piutang PPh Pasal 22	466.665.742.712	483.960.766.219	(17.295.023.507)	(3,57)
Piutang PPh Pasal 23	1.971.735.365.857	2.203.941.784.322	(232.206.418.465)	(10,54)
Piutang PPh Pasal 25 OP	1.011.913.424.152	1.011.934.207.339	(20.783.187)	(0,00)
Piutang PPh Pasal 25 Badan	14.272.978.070.717	14.375.139.273.281	(102.161.202.564)	(0,71)
Piutang PPh Pasal 26	2.831.091.117.252	1.707.425.467.877	1.123.665.649.375	65,81
Piutang PPh Final dan Fiskal LN	517.874.742.847	756.662.431.444	(238.787.688.597)	(31,56)
Piutang Bunga Penagihan PPh	1.878.627.837.655	2.016.033.203.366	(137.405.365.711)	(6,82)
Jumlah Piutang PPh	24.035.954.068.307	23.821.503.581.737	214.450.486.570	0,90
Piutang PPN Dalam Negeri	42.235.408.556.549	13.758.554.551.125	28.476.854.005.424	206,98
Piutang PPNBM Dalam Negeri	208.754.851.900	279.736.078.186	(70.981.226.286)	(25,37)
Jumlah Piutang PPN dan PPNBM	42.444.163.408.449	14.038.290.629.311	28.405.872.779.138	202,35
Piutang PBB Pedesaan	2.401.365.978.916	1.617.432.556.023	783.933.422.893	48,47
Piutang PBB Perkotaan	11.291.484.268.102	9.391.433.663.020	1.900.050.605.082	20,23
Piutang PBB Perkebunan	394.209.918.227	388.198.560.617	6.011.357.610	1,55
Piutang PBB Kehutanan	630.580.993.822	617.951.905.189	12.629.088.633	2,04
Piutang PBB Pertambangan	5.602.915.905.581	4.029.788.497.473	1.573.127.408.108	39,04
Jumlah Piutang PBB	20.320.557.064.648	16.044.805.182.322	4.275.751.882.326	26,64
Piutang BPHTB	0	101.220.473.265	(101.220.473.265)	(100,0)
Jumlah Piutang BPHTB	0	101.220.473.265	(101.220.473.265)	(100,0)
Piutang PTLL	691.914.937	2.240.673.790	(1.548.758.853)	(69,12)
Jumlah Piutang PTLL	691.914.937	2.240.673.790	(1.548.758.853)	(69,12)
Jumlah	86.801.366.456.341	54.008.060.540.425	32.793.305.915.916	60,72

Komposisi Piutang Pajak per Jenis Pajak pada DJP per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Grafik 18 berikut

Grafik 18
Komposisi Piutang Pajak Per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2011



Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 57 berikut.

Tabel 57
Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 Tahun	19.470.734.026.876
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	28.620.350.779.588
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	9.268.222.857.493
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	4.996.612.309.382
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	3.507.371.490.454
Lebih dari 5 Tahun	20.938.074.992.554
Jumlah	86.801.366.456.347

*selisih pembulatan sebesar Rp6,00 antara tabel diatas dengan aplikasi SAI.

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp86.801.366.456.341,00 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp46.205.692.087.023,00 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp40.595.674.369.318,00. Perhitungan nilai penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2011 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	19.454.699.724.014	16.100.046.935.261	13.365.960.262.569	37.880.659.534.503	86.801.366.456.347
Barang Sitaan/Agunan yang dapat dikurangkan	612.642.820*	139.819.075.498	91.922.291.347	5.282.717.662	237.636.727.327
Dasar Penghitungan Penyisihan	19.454.699.724.014	15.960.227.859.763	13.274.037.971.222	37.875.376.816.841	86.563.729.729.020
Prosentasi Penyisihan	0,50%	10%	50%	100%	
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	97.273.498.620	1.596.022.785.976	6.637.018.985.611	37.875.376.816.841	46.205.692.087.049**

*Barang sitaan/agunan tidak mengurangi kualitas piutang lancar. **Selisih pembulatan Rp26,00 dengan SAI

*Penyisihan, Daluwarsa,
Penghapusan Piutang
Pajak, dan Sengketa Pajak*

Dari nilai piutang pajak kualitas macet sebesar Rp37.875.376.816.841,00 termasuk piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp6.217.999.181.660,00. Selama tahun 2011 telah diusulkan penghapusan sebesar Rp 489.005.652.771,00 dan termasuk didalamnya piutang pajak yang telah daluwarsa sebesar Rp155.384.705.577,00. Selama Tahun Anggaran 2011, tidak ada nilai piutang pajak yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapustagihkan.

Dari nilai piutang pajak kualitas macet sebesar Rp37.875.376.816.841,00 tersebut termasuk piutang PPN atas BBM bersubsidi yang sudah tidak dapat ditagih lagi sebesar Rp28.075.790.794.612,00. Pada tanggal neraca 31 Desember 2011, piutang PPN atas BBM bersubsidi tersebut masih dikategorikan sebagai piutang pajak kualitas diragukan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak, karena piutang tersebut belum diusulkan untuk dihapuskan, sehingga penyisihannya sebesar 50%. Akan tetapi karena ada subsequent event yaitu pengusulan penghapusan piutang PPN atas BBM bersubsidi tersebut pada tanggal 13 April 2012, serta agar piutang pajak yang disajikan lebih mencerminkan nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka kualitas piutang PPN atas BBM bersubsidi tersebut direvisi menjadi kualitas macet dengan penyisihan sebesar 100%.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak (SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT)/keputusan/putusan yang menyatakan kurang bayar yang menjadi sengketa pajak tersebut diatas yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp43.454.095.270.562,00.

Nilai nominal ketetapan pajak/keputusan/putusan yang menjadi sengketa pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai piutang pajak per 31 Desember 2011. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, khusus untuk sengketa pajak keberatan, nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut adalah atas nilai ketetapan pajak awal, bukan atas nilai piutang pajak atau tunggakan pajak yang belum dibayar. Kedua, nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak untuk SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 dan seterusnya, sebagian nilai dalam SKPKB/SKPKBT tersebut yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak belum diakui sebagai piutang pajak.

*Barang Sitaan dalam
Rangka Penagihan Pajak*

Dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak dilunasi Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan/jaminan, yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan/atau penjualan yang dikecualikan dari lelang

sebesar Rp889.285.399.952,00 dan dari piutang pajak sebesar Rp1.559.625.674.452,00. Dari aset Wajib Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp237.636.727.323,00.

SP3DRI

1. DJBC telah menyampaikan data SP3DRI tahun 2011 dari DJBC kepada DJP sebagai berikut:
 - a. Data SP3DRI selama tahun 2011 yang dikompilasi dari hasil validasi piutang tahun 2011 di lingkungan DJBC yaitu sebanyak 252 dokumen dengan nilai sebesar Rp325.732.790.304,00 meliputi:

Nama Akun	Akun	Nilai (Rp)
PPN Impor	113132	127.586.730.351
PPN Lain	113139	-
PPnBM	113142	161.513.174.185
PPh Pasal 22 Impor	113123	35.489.542.380
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	113173	93.943.000
Piutang Bunga Penagihan PPN	113174	956.676.064
Piutang Bunga Penagihan PPh	113175	92.724.324
JUMLAH		325.732.790.304

- b. Dari nilai SP3DRI tersebut, terdapat 5 SP3DRI yang telah dilunasi oleh wajib bayar yaitu sebesar Rp84.978.480,00 meliputi:

Nama Akun	Akun	Nilai (Rp)
PPN Impor	113132	67.991.000
PPN Lain	113139	-
PPnBM	113142	-
PPh Pasal 22 Impor	113123	16.759.000
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	113173	-
Piutang Bunga Penagihan PPN	113174	228.480
Piutang Bunga Penagihan PPh	113175	-
JUMLAH		84.978.480

- c. Berdasarkan angka 1 dan 2, data SP3DRI dari DJBC yang akan ditindaklanjuti oleh DJP adalah sebanyak 247 dokumen dengan nilai Rp325.647.811.824,00 (Rp325.732.790.304,00-Rp84.978.480,00) meliputi:

Nama Akun	Akun	Nilai (Rp)
PPN Impor	113132	127.518.739.351
PPN Lain	113139	-
PPNBM	113142	161.513.174.185
PPh Pasal 22 Impor	113123	35.472.783.380
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	113173	93.943.000
Piutang Bunga Penagihan PPN	113174	956.447.584
Piutang Bunga Penagihan PPh	113175	92.724.324
JUMLAH		325.647.811.824

2. Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2011 senilai Rp388.587.331,00. Atas nilai tersebut dapat dijelaskan dengan data sebagai berikut:

Tindak Lanjut	Tahun 2011		Tahun 2010		Jumlah
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Lunas	8	304.198.239	1	165.954.000	470.152.239
Telah diterbitkan SKPKB	19	1.123.681.729	6	4.068.934.812	5.192.616.541
Himbauan	6	130.015.902	58	20.024.218.974	20.154.234.876
Masih dalam proses penelitian	218	324.089.915.954	377	38.680.411.507	362.770.327.461
Total	251	325.647.811.824	442	62.939.519.293	388.587.331.117

3. Nilai Piutang Pajak pada DJBC per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp21.262.095.927.300,00 dan Rp16.937.210.906.195,00. Piutang pajak merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Pajak per Jenis Pajak per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 58 berikut.

Tabel 58
Rincian Piutang Pajak Per Jenis Pajak Yang Dicatat di DJBC
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)		
Akun	Nama Perkiraan	Rupiah
113123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	45.892.299.214
113131	Piutang PPN Dalam Negeri	3.146.910.248.970
113132	Piutang PPN Impor	240.562.578.649
113139	Piutang PPN Lainnya	13.975.000
113142	Piutang PPnBM Impor	26.715.140.404
113161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	15.612.436.025.861
113162	Piutang Cukai Etil Alkohol	889.000.000
113163	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.108.046.600
113164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	102.598.902.174
113169	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	46.830.933.374
113173	Piutang Bunga Penagihan PPN	9.710.326.332
113174	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	16.682.000
113181	Piutang Bea masuk	851.036.853.853
113183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	773.536.556.838
113184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	173.032.494.314
113185	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	222.278.975.975
113186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	6.238.348.382
113187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	288.539.360
Jumlah		21.262.095.927.300

Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 59 berikut.

Tabel 59
Rincian Piutang Pajak Berdasarkan Umur Piutang
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

AKUN	0 s.d. 1 Thn	1 s.d. 2 Thn	2 s.d. 3 Thn	> 3 Tahun	JUMLAH
113123 PPh Pasal 22 Impor	21,050,804,495	1,398,815,882	1,413,661,288	22,029,017,550	45,892,299,214
113131 PPN Dalam Negeri	3,146,910,248,970	-	-	-	3,146,910,248,970
113132 PPN Impor	101,804,450,137	16,067,092,985	6,144,005,428	116,547,030,100	240,562,578,649
113139 PPN Lain	-	13,975,000	-	-	13,975,000
113142 PPN-BM	19,088,664,211	421,509,947	379,612,143	6,825,354,103	26,715,140,404
113161 Cukai Hasil Tembakau	15,579,752,423,700	-	3,659,250,324	29,024,351,837	15,612,436,025,861
113162 Cukai Etil Alkohol	889,000,000	-	-	-	889,000,000
113163 Cukai MMEA	146,592,000	56,140,000	294,869,600	2,610,445,000	3,108,046,600
113164 Denda Administrasi Cukai	2,705,557,040	89,386,698,971	3,250,230,473	7,256,415,690	102,598,902,174
113169 Cukai Lainnya	228,269,754	45,103,241,360	814,991,678	684,430,582	46,830,933,374
113174 Piutang Bunga Penagihan PPN	5,119,342,875	386,580,186	-	4,204,403,271	9,710,326,332
113175 Piutang Bunga Penagihan PPhBM	8,319,000	8,363,000	-	-	16,682,000
113181 Bea Masuk	239,614,380,111	32,094,433,751	28,335,033,850	550,993,006,141	851,036,853,853
113183 Denda Administrasi Pabean	411,959,981,346	19,438,780,498	49,263,389,717	292,873,405,277	773,536,556,838
113184 Pabean Lainnya	17,761,369,712	11,432,318,191	9,275,997,528	134,562,808,883	173,032,494,314
113185 Bea Keluar	96,268,666,997	1,457,230,193	-	124,553,078,784	222,278,975,974
113186 Denda Administrasi Bea Keluar	5,514,223,343	-	724,125,039	-	6,238,348,382
113187 Bunga Bea Keluar	96,691,833	-	-	191,847,527	288,539,360
JUMLAH	19,648,918,985,526	217,266,179,964	103,555,167,066	1,292,355,594,744	21,262,095,927,300

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada DJBC per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 60 berikut.

Tabel 60
Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

AKUN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH
113123 PPh Pasal 22 Impor	105,426,059	136,848,888	718,968,838	22,033,333,478	22,994,577,262
113131 PPN Dalam Negeri	15,734,551,245	-	-	-	15,734,551,245
113132 PPN Impor	508,821,544	1,560,543,899	3,162,423,191	116,677,495,314	121,909,283,947
113139 PPN Lain	-	1,397,500	-	-	1,397,500
113142 PPN-BM	95,490,386	34,418,795	189,806,071	6,825,354,103	7,145,069,355
113161 Cukai Hasil Tembakau	77,898,762,119	-	1,489,017,162	29,705,567,837	109,093,347,118
113162 Cukai Etil Alkohol	4,445,000	-	-	-	4,445,000
113163 Cukai MMEA	732,960	5,614,000	-	2,905,314,600	2,911,661,560
113164 Denda Administrasi Cukai	13,417,785	41,312,800	922,586,150	97,657,044,834	98,634,361,569
113169 Cukai Lainnya	525,676	3,682,536	170,874,900	46,347,222,961	46,522,306,073
113174 Piutang Bunga Penagihan PPN	25,596,715	38,658,019	-	4,204,403,271	4,268,658,005
113175 Piutang Bunga Penagihan PPhBM	41,585	836,300	-	-	877,895
113181 Bea Masuk	1,190,698,132	2,843,338,854	12,611,832,318	560,534,474,672	577,180,343,975
113183 Denda Administrasi Pabean	1,996,426,525	1,839,559,763	21,843,197,730	311,267,811,598	336,946,995,616
113184 Pabean Lainnya	86,445,912	1,037,218,780	4,381,908,312	136,543,173,540	142,048,746,543
113185 Bea Keluar	481,343,334	145,723,019	-	124,553,078,784	125,180,145,137
113186 Denda Administrasi Bea Keluar	27,571,117	-	-	724,125,039	751,696,156
113187 Bunga Bea Keluar	-	-	-	288,539,360	288,539,360
JUMLAH	98,170,296,103	7,689,153,152	45,490,614,671	1,460,266,939,391	1,611,617,003,316

C.2.1.6 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp40.979.765.532,00*

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar **Rp40.979.765.532,00** dan **Rp59.128.826.922,00**. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dan diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Posisi Piutang Bukan Pajak per unit Eselon I per 31 Desember 2011 dan 2010 dapat dilihat pada Tabel 61 berikut.

Tabel 61
Piutang PNBPNB Neto Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

ESELON I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
SETJEN	541.291.638	4.862.500	536.429.138	11.031,96
DJA	0	7.832.412	(7.832.412)	(100,00)
DJP	3.167.769.180	0	3.167.769.180	0,00
DJBC	19.658.449.460	34.273.610.000	(14.615.160.540)	(42,64)
DJPB	137.617.302	278.740.115	(141.122.813)	(50,63)
DJKN	6.221.639	1.862.000	4.359.639	234,14
BAPEPAM LK	17.242.320.313	24.212.798.767	(6.970.478.454)	(28,79)
BPPK	226.096.000	349.121.128	(123.025.128)	(35,24)
Jumlah	40.979.765.532	59.128.826.922	(18.149.061.390)	(30,69)

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 sebesar Rp40.979.765.532,00 merupakan nilai neto setelah dilakukan penyisihan terhadap piutang. Adapun nilai bruto dan penyisihan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 62 berikut.

Tabel 62
Piutang PNBPNB Bruto Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

Eselon I	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Netto
SETJEN	544,011,696	(2,720,058)	541,291,638
ITJEN	-	-	-
DJA	-	-	-
DJP	3,183,687,618	(15,918,438)	3,167,769,180
DJBC	25,004,513,000	(5,346,063,540)	19,658,449,460
DJPK	-	-	-
DJPU	-	-	-
DJPB	138,308,846	(691,544)	137,617,302
DJKN	6,252,903	(31,264)	6,221,639
BAPEPAM-LK	56,508,964,892	(39,266,644,579)	17,242,320,313
BPPK	463,406,097	(237,310,097)	226,096,000
BKF	-	-	-
JUMLAH	85,849,145,052	(44,869,379,520)	40,979,765,532

Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak Berdasarkan Kualitas Piutang per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 63 berikut

Tabel 63
Rincian Penyisihan Piutang PNB Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

No	Es 1	Piutang PNB	Kualitas Piutang			
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
			5%	10%	50%	100%
1	Setjen	544.011.696	544.011.696	-	-	-
2	DJP	3.183.687.618	3.183.687.618	-	-	-
3	DJBC	25.004.513.000	19.727.808.000	27.220.000	9.565.000	5.239.920.000
4	DJPB	138.308.846	138.308.846	-	-	-
5	DJKN	6.252.903	6.252.903	-	-	-
6	BAPEPAM LK	56.508.964.892	17.127.630.465	86.700.000	244.596.000	39.050.038.427
7	BPPK	463.406.097	227.232.160	-	-	236.173.937
	Jumlah Piutang (Bruto)	85.849.145.052	40.954.931.688	113.920.000	254.161.000	44.526.132.364
	Jumlah Penyisihan	44.869.379.520	204.774.658	11.392.000	127.080.500	44.526.132.364
	Jumlah Piutang (Neto)	40.979.765.532	40.750.157.030	102.528.000	127.080.500	-

Saldo Piutang Bukan Pajak bruto per Eselon I per 31 Desember 2011 sebesar Rp85.849.145.052,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Piutang Bukan Pajak di Setjen per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp544.011.696,00 dan Rp4.862.500,00.

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Sekretariat Jenderal	74.759.483
-	Pendapatan kelebihan pembayaran TKPN	35.697.875
-	pendapatan denda keterlambatan pekerjaan meubelair	1.556.438
-	pendapatan denda keterlambatan pekerjaan sistem tata udara	12.848.170
-	pendapatan denda keterlambatan renovasi rumah dinas	24.657.000
2	Sekretariat Pengadilan Pajak	10.840.403
-	Pendapatan kelebihan pembayaran tunjangan jabatan	10.840.403
3	PUSINTEK	454.811.810
-	Pendapatan pengembalian pekerjaan TA 2011	454.811.810
4	GKN Makassar	3.000.000
-	Pendapatan Sewa Kantin	3.000.000
5	GKN Kupang	600.000
-	Pendapatan Sewa Kantin	600.000
JUMLAH		544.011.696

2. Saldo Piutang Bukan Pajak di DJA per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.832.412,00. Nilai Piutang Bukan Pajak mengalami penurunan karena piutang pada TA 2010 telah seluruhnya dibayar.
3. Saldo Piutang Bukan Pajak di DJP per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp3.183.687.618,00 dan Rp0,00. Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Selain itu, terdapat penyisihan piutang bukan pajak yang dikategorikan lancar karena diharapkan dapat dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan pada tahun berikutnya.

Uraian	31-Des-11	31-Des-10	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.183.687.618	0,00	3.183.687.618	100,00
Penyisihan Piutang PNPB	(15.918.438)	0,00	(15.918.438)	(100,00)
Jumlah Neto	3.167.769.180	0,00	3.167.769.180	100,00

4. Saldo Piutang Bukan Pajak di DJBC per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp25.004.513.000,00 dan Rp34.273.610.000,00. Saldo per 31 Desember 2011 mengalami penurunan sebesar Rp9.269.097.000,00 atau 27,04 persen apabila dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya karena adanya pelunasan. Piutang PNPB pada DJBC pada umumnya disebabkan adanya fasilitas penundaan pembayaran pita cukai dimana PNPB atas penerimaan cukai tersebut juga dibayarkan bersamaan dengan pembayaran piutang cukai hasil tembakau. Selain itu juga disebabkan adanya fasilitas PNPB berkala kepada beberapa importir.

NAMA KANWIL	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH
Kanwil DJBC Sumatera Utara	55.350.000	-	-	-	55.350.000
Kanwil Riau dan Sumatera Barat	362.498.000	-	-	-	362.498.000
Kanwil DJBC Jakarta	22.180.000	-	1.515.000	2.550.000	26.245.000
Kanwil DJBC Jawa Barat	1.230.000	-	-	-	1.230.000
Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY	25.170.000	-	-	-	25.170.000
Kanwil DJBC Jawa Timur I	494.110.000	27.120.000	8.050.000	-	529.280.000
Kanwil DJBC Jawa Timur II	24.350.000	100.000	-	330.000	24.780.000
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	2.280.000	-	-	-	2.280.000
KPU BC Tanjung Priok	18.740.640.000	-	-	5.237.040.000	23.977.680.000
JUMLAH	19.727.808.000	27.220.000	9.565.000	5.239.920.000	25.004.513.000

5. Saldo Piutang Bukan Pajak di DJPB per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp138.308.846,00 dan Rp278.740.115,00. Saldo per 31 Desember 2011 mengalami penurunan sebesar Rp140.431.269,00 atau 50,38 persen apabila dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya. Adapun posisi Piutang Bukan Pajak di DJPB berdasarkan transaksinya adalah sebagai berikut:

No	JENIS PIUTANG	TA 2011	TA 2010
1	Kelebihan uang makan, lembur, dan tunjangan	47.642.513	19.212.638
2	Kelebihan belanja barang	86.384.844	56.991.500
3	Sewa rumah dinas	4.281.489	1.935.075
4	Sewa Kantin	0	3.300.000
5	Sewa Koperasi	0	4.620.000
6	Sewa Mess	0	192.680.902
JUMLAH		138.308.846	278.740.115

6. Saldo Piutang Bukan Pajak di DJKN per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp6.252.903,00 dan Rp1.862.000,00. Piutang Bukan Pajak DJKN TA 2010 merupakan kelebihan pembayaran uang makan yang telah disetorkan kembali ke Kas Negara pada TA 2011.
7. Saldo Piutang Bukan Pajak di Bapepam LK per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp56.508.964.892,00 dan Rp24.212.798.767,00. Piutang Bukan Pajak Bapepam LK berasal dari Piutang atas Denda di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bidang Asuransi dan Dana Pensiun).

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 sebesar Rp56.508.964.892,00, terdiri dari:

- 1) Piutang Denda di Bidang Pasar Modal sebesar Rp28.676.057.338,00 merupakan piutang denda yang belum jatuh tempo.
- 2) Piutang Denda di Bidang Perasuransian sebesar Rp 10.055.118.180,00 merupakan piutang yang sudah dilimpahkan ke DJKN.
- 3) Piutang Denda di Bidang Dana Pensiun sebesar Rp720.658.909,00, merupakan piutang yang sudah dilimpahkan ke DJKN.
- 4) Piutang dari Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan triwulan IV tahun 2011 sebesar Rp17.057.130.465,00. Pembayaran iuran tahunan ini akan dilakukan paling lambat tanggal 15 Januari 2012.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31-Dec-11	31-Dec-10	Kenaikan/Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6 = 5/4 X 100
1	Piutang atas Denda di Bidang Pasar Modal	28.676.057.338	1.956.200.000	26.719.857.338	1.365,91
2	Piutang atas Denda di Bidang Perasuransian	10.055.118.180	284.580.000	9.770.538.180	3.433,32
3	Piutang atas Denda di Bidang Dana Pensiun	720.658.909	104.562.000	616.096.909	589,22
4	Piutang dari iuran badan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan	17.057.130.465	21.867.456.767	(4.810.326.302)	(22,00)
Jumlah (1+2+3+4)		56.508.964.892	24.212.798.767	32.296.166.125	133,38

Berdasarkan tabel tersebut, maka piutang bukan pajak Bapepam LK per 31 Desember 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp32.296.166.125,00 atau 133,38 persen apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2010.

Adapun perubahan/mutasi tersebut berasal dari:

- a. Bidang Pasar Modal mengalami kenaikan sebesar Rp26.719.857.338,00 atau 1.365,91 persen;
- b. Bidang Perasuransian mengalami kenaikan sebesar Rp9.770.538.180,00 atau 3.433,32 persen;
- c. Bidang Dana Pensiun mengalami kenaikan sebesar Rp616.096.909,00 atau 589,22 persen;
- d. Piutang dari iuran badan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan mengalami penurunan sebesar Rp 4.810.326.302,00 atau 22,00 persen.

Perubahan/mutasi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pasar Modal

1 Saldo Awal (1 Januari 2011)	Rp	1.956.200.000
2 Penambahan (a+b)	Rp	41.772.788.611
a. Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain	Rp 27.112.202.611	
b. Tambahan Piutang Bidang Pasar Modal	Rp 14.660.586.000	
3 Pengurangan (a+b)	Rp	15.052.931.273
a. Pembayaran Piutang Bidang Pasar Modal	Rp 14.960.069.273	
b. Penyesuaian	Rp 92.862.000	
Saldo Akhir 31 Desember 2011 (1+2-3)	Rp	28.676.057.338

Adapun rincian atas penyesuaian tersebut sebesar Rp92.862.000,00 adalah sebagai berikut.

A. Penambahan	Rp	1.474.000
1 Kelebihan Pembayaran	Rp	1.474.000
- Milenium Danatama	Rp 102.000	
- Bahana Sekurities	Rp 700.000	
- Capital Bridge Indonesia	Rp 400.000	
- Delta Djakarta	Rp 20.000	
- Erwan Dukat	Rp 134.000	
- Murni Anwar	Rp 14.000	
- Irawan Riza	Rp 52.000	
- Irawan Riza	Rp 52.000	
B. Pengurangan	Rp	94.336.000
2 Pembayaran dilakukan sebelum penerbitan sanksi	Rp 45.000.000	
3 Pembatalan Sanksi PT AKR Korporindo	Rp 3.000.000	
4 Pembatalan Bunga PT Optima Investama	Rp 22.000	
5 Ralat Bunga DBS Vickers Securities	Rp 414.000	
6 Batal sanksi PT Berlian Laju Tanker	Rp 45.900.000	
Total (A-B)	Rp	(92.862.000)

Perubahan/mutasi piutang bukan pajak bidang pasar modal yang dilimpahkan ke DJKN adalah sebagai berikut:

1 Saldo Awal (1 Januari 2011)	Rp	-
2 Penambahan	Rp	29.416.810.611
- Reklasifikasi dari aset lain-lain	Rp 26.607.202.611	
- Pelimpahan piutang bidang pasar modal ke DJKN periode Jan - Des 2011	Rp 2.790.490.000	
- Penyesuaian	Rp 19.118.000	
3 Pengurangan	Rp	2.196.893.273
- Pembayaran atas piutang yang dilimpahkan ke DJKN	Rp 2.196.893.273	
Saldo Akhir 31 Desember 2011 (1+2-3)	Rp	27.219.917.338

b. Bidang Perasuransian

1. Saldo Awal (1 Januari 2011)		Rp	284.580.000
2. Penambahan (a+b)		Rp	10.235.180.000
a. Reklasifikasi Dari Aset Lain-Lain	Rp	6.684.340.000	
b. Tambahan Piutang Bidang Perasuransian	Rp	3.549.370.000	
c. Kelebihan bayar :	Rp	1.470.000	
- AIA Financial	Rp	1.000.000	
- Holmes Insurance	Rp	470.000	
3. Pengurangan (a+b)		Rp	464.641.820
a. Pembayaran Piutang	Rp	464.641.820	
Saldo Akhir 31 Desember 2011 (1+2-3)		Rp	10.055.118.180

Perubahan/mutasi piutang bukan pajak bidang perasuransian yang dilimpahkan ke DJKN adalah sebagai berikut.

1 Saldo Awal (1 Januari 2011)		Rp	-
2 Penambahan		Rp	10.229.900.000
- Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	Rp	4.980.340.000	
- Pelimpahan piutang bidang perasuransian ke DJKN periode Jan - Des 2011	Rp	5.249.560.000	
3 Pengurangan		Rp	174.781.820
- Pembayaran atas piutang yang dilimpahkan ke DJKN	Rp	174.781.820	
Saldo Akhir 31 Desember 2011 (1+2-3)		Rp	10.055.118.180

c. Bidang Dana Pensiun

1 Saldo Awal (1 Januari 2011)		Rp	104.562.000
2 Penambahan (a)		Rp	1.286.414.000
a. Reklasifikasi Dari Aset Lain-Lain	Rp	1.136.000.000	
b. Tambahan Piutang Bidang Dana Pensiun	Rp	150.414.000	
3 Pengurangan (a+b+c)		Rp	670.317.091
a. Pembayaran Piutang Bidang Dana Pensiun	Rp	668.217.091	
b. Pembatalan Sanksi Industri Soda	Rp	1.200.000	
c. Pembatalan Sanksi Utama Karya	Rp	900.000	
Saldo Akhir 31 Desember 2011 (1+2-3)		Rp	720.658.909

Perubahan/mutasi piutang bukan pajak bidang dana pensiun yang dilimpahkan ke DJKN adalah sebagai berikut:

1 Saldo Awal (1 Januari 2011)		Rp	-
2 Penambahan		Rp	957.788.000
- Pelimpahan piutang bidang dana pensiun ke DJKN periode Jan - Des 2011	Rp	957.788.000	
3 Pengurangan		Rp	237.129.091
- Pembayaran atas piutang yang dilimpahkan ke DJKN	Rp	237.129.091	
Saldo Akhir 31 Desember 2011 (1+2-3)		Rp	720.658.909

d. Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

1 Saldo Awal (1 Januari 2011)	Rp	21.867.456.767
2 Penambahan (a)	Rp	73.403.459.768
a. Tambahan Piutang SRO	Rp 73.403.459.768	
3 Pengurangan (a)	Rp	78.213.786.070
a. Pembayaran Iuran SRO	Rp 78.213.786.070	
Saldo Akhir 31 Desember 2011 (1+2-3)	Rp	17.057.130.465

8. Piutang Bukan Pajak di BPPK per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp463.406.097,00 dan Rp349.121.128,00.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 64 berikut.

Tabel 64
Rincian Piutang Bukan Pajak di BPPK
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

No	Unit Satuan Kerja	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Netto	Keterangan
1	BPPK Pusat	32.614.940	7.346.915	25.268.025	kelebihan pembayaran uang makan dan kelebihan pembayaran atas pengadaan meubelair
2	STAN	5.560.000	27.800	5.532.200	kelebihan pembayaran uang makan
3	Pusdiklat AP	63.872.275	319.361	63.552.914	denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan yang belum diterima dan kelebihan pembayaran uang makan
4	Pusdiklat BC	3.580.000	17.900	3.562.100	kelebihan pembayaran uang makan
5	Pusdiklat Pajak	6.220.000	31.100	6.188.900	kelebihan pembayaran uang makan
6	Pusdiklat PSDM	16.704.000	83.520	16.620.480	kelebihan pembayaran uang makan
7	Pusdiklat KNPK	32.768.800	163.844	32.604.956	Kelebihan pembayaran uang makan dan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional
8	Pusdiklat KU	5.639.000	28.195	5.610.805	Kelebihan pembayaran uang makan
9	BDK Medan	-	-	-	Kelebihan pembayaran pada pembangunan gedung
10	BDK Pekanbaru	1.833.000	9.165	1.823.835	kelebihan pembayaran uang makan
11	BDK Palembang	2.682.000	13.410	2.668.590	kelebihan pembayaran uang makan
12	BDK Balikpapan	1.683.000	8.415	1.674.585	kelebihan pembayaran uang makan
13	BDK Makasar	2.900.000	14.500	2.885.500	kelebihan pembayaran uang makan
14	BDK Manado	235.048.797	228.984.471	6.064.326	kelebihan uang makan dan denda atas keterlambatan penyelesaian pembangunan Tahun 2009
15	BDK Malang	11.382.000	56.910	11.325.090	kelebihan pembayaran uang makan
16	BDPim Magelang	2.596.000	12.980	2.583.020	kelebihan pembayaran uang makan dan piutang PNPB atas sewa ruangan
17	BDK Denpasar	1.900.000	9.500	1.890.500	kelebihan pembayaran uang makan
18	BDK Pontianak	36.422.285	182.111	36.240.174	piutang denda keterlambatan pekerjaan pembangunan
	TOTAL	463.406.097	237.310.097	226.096.000	

C.2.1.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar TGR
Rp395.243.658,00

Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp395.243.658,00 dan Rp327.204.855,00. Saldo per 31 Desember 2011 merupakan saldo Tagihan TGR Kementerian Keuangan yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca (sampai dengan 31 Desember 2012) dengan memperhitungkan penyisihan nilai piutang.

Posisi Bagian Lancar TGR neto per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 65 berikut.

Tabel 65
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Neto Per Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)	%
SETJEN	88.102.500	35.250.000	52.852.500	149,94
ITJEN	8.955.000	-	8.955.000	0,00
DJP	52.872.051	44.721.008	8.151.043	18,23
DJBC	119.940.119	43.099.650	76.840.469	178,29
DJPK	11.940.000	36.000.000	(24.060.000)	(66,83)
DJPB	70.644.988	125.659.200	(55.014.212)	(43,78)
DJKN	7.164.000	2.999.997	4.164.003	138,80
BAPEPAM-LK	-	-	-	-
BPPK	35.625.000	39.475.000	(3.850.000)	(9,75)
JUMLAH	395.243.658	327.204.855	68.038.803	20,79

Nilai Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2011 sebesar Rp395.243.658,00 merupakan nilai neto setelah dilakukan penyisihan Bagian lancar TGR. Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Adapun rincian nilai bruto dan penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dapat dilihat pada Tabel 66 berikut.

Tabel 66
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per Eselon I
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

Eselon I	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Netto
SETJEN	1.902.459.183	(1.814.356.683)	88.102.500
ITJEN	47.022.100	(38.067.100)	8.955.000
DJP	654.527.261	(601.655.210)	52.872.051
DJBC	3.940.212.411	(3.820.272.292)	119.940.119
DJPK	12.000.000	(60.000)	11.940.000
DJPB	2.242.691.993	(2.172.047.005)	70.644.988
DJKN	7.200.000	(36.000)	7.164.000
BAPEPAM LK	80.165.000	(80.165.000)	0
BPPK	987.751.838	(952.126.838)	35.625.000
JUMLAH	9.874.029.786	(9.478.786.128)	395.243.658

C.2.1.8 Uang Muka Belanja

Uang Muka Belanja
Rp26.926.848.502,00

Nilai Uang Muka Belanja per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar **Rp26.926.848.502,00** dan **Rp30.201.365.733,00**.

Posisi Uang Muka Belanja per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 67 berikut.

Tabel 67
Uang Muka Belanja Per Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
SETJEN	-	1.111.101.025	(1.111.101.025)	(100,00)
DJP	22.416.135.825	23.473.296.830	(1.057.161.005)	(4,50)
DJBC	53.431.433	20.819.725	32.611.708	156,64
DJPK	-	74.349.550	(74.349.550)	(100,00)
DJPB	2.782.161.134	2.930.967.763	(148.806.629)	(5,08)
DJKN	941.476.182	1.898.134.739	(956.658.557)	(50,40)
BAPEPAM LK	-	1.010.073	(1.010.073)	(100,00)
BPPK	-	1.940.000	(1.940.000)	(100,00)
BKF	733.643.928	689.746.028	43.897.900	6,36
JUMLAH	26.926.848.502	30.201.365.733	(3.274.517.231)	(10,84)

Nilai Uang Muka Belanja per 31 Desember 2011 terdiri dari:

- Uang Muka Belanja Pegawai	Rp	0,00
- Uang Muka Belanja Barang	Rp	16.870.041.667,00
- Uang Muka Belanja Modal	Rp	39.284.483,00
- Uang Muka Belanja Lain-lain	Rp	15.000.000,00
- Belanja Pegawai yang Dibayar di Muka	Rp	2.653.608.895,00
- Belanja Barang yang Dibayar di Muka	Rp	7.346.800.759,00
- Belanja Lain-lain Dibayar Dimuka	Rp	2.112.698,00
Jumlah	Rp	26.926.848.502,00

C.2.1.9 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
Rp14.842.671.844,00

Nilai Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar **Rp14.842.671.844,00** dan **Rp1.800.000,00**.

Posisi Piutang dari Kegiatan Operasional BLU neto per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 68 berikut.

Tabel 68
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Neto Per Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
SETJEN	11.394.660.344	-	11.394.660.344	0,00
BPPK	3.448.011.500	1.800.000	3.446.211.500	191.456,19
JUMLAH	14.842.671.844	1.800.000	14.840.871.844	824.492,88

Nilai Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp14.842.671.844,00 merupakan nilai neto setelah dilakukan penyisihan terhadap piutang. Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Adapun nilai bruto dan penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 69.

Tabel 69
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per Eselon I
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

Eselon I	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Netto
SETJEN	11.451.919.944	(57.259.600)	11.394.660.344
BPPK	3.486.200.000	(38.188.500)	3.448.011.500
JUMLAH	14.938.119.944	(95.448.100)	14.842.671.844

Nilai bruto Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada Unit Eselon I Setjen per 31 Desember 2011 merupakan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal

dari Kegiatan Operasional PIP sebesar Rp11.451.919.944,00. Kegiatan dimaksud merupakan investasi jangka panjang yang dihitung secara akrual yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal Neraca, serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada Unit Eselon I Setjen per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 70.

Tabel 70
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Setjen-PIP
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
113831	Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	3.896.081.385
	Piutang Pemerintah Kota Surakarta	3.791.666
	Piutang PT. PLN	7.552.046.893
	Jumlah	11.451.919.944

Piutang dari kegiatan operasional BLU PIP sebesar Rp11.451.919.944,00 di atas merupakan piutang dari bunga akrual kegiatan penyaluran pinjaman, sedangkan piutang pokoknya dicatat di Laporan Keuangan Bagian Anggaran 999.03 (investasi).

Nilai bruto Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada Unit Eselon I BPPK per 31 Desember 2011 merupakan piutang penerimaan bukan pajak dari Kegiatan Operasional BLU STAN sebesar Rp3.486.200.000,00. Sedangkan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU STAN pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.800.000,00 merupakan Piutang Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada Unit Eselon I BPPK per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 71.

Tabel 71
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU BPPK-STAN
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Netto
1	Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi	151.600.000	(3.940.500)	147.659.500
2	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	572.500.000	(20.437.500)	552.062.500
3	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	2.762.100.000	(13.810.500)	2.748.289.500
	Total	3.486.200.000	(38.188.500)	3.448.011.500

C.2.1.10 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Rp21.474.564.759,00

Nilai Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp21.474.564.759,00 dan Rp6.146.237.068,00.

Posisi Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU neto per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 disajikan pada Tabel 72 berikut.

Tabel 72
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Neto Per Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
SETJEN	21.466.093.406	5.700.967.805	15.765.125.601	276,53
BPPK	8.471.353	445.269.263	(436.797.910)	(98,10)
JUMLAH	21.474.564.759	6.146.237.068	15.328.327.691	249,39

Nilai Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2011 sebesar Rp21.474.564.759,00 merupakan nilai neto setelah dilakukan penyisihan terhadap piutang. Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Adapun nilai bruto dan penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 73.

Tabel 73
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Per Eselon I
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

Eselon I	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Netto
SETJEN	21.573.963.222	(107.869.816)	21.466.093.406
BPPK	453.783.186	(445.311.833)	8.471.353
JUMLAH	22.027.746.408	(553.181.649)	21.474.564.759

Nilai bruto Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU pada Unit Eselon I Setjen per 31 Desember 2011 merupakan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Kegiatan Non Operasional PIP sebesar Rp21.573.963.222,00. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal Neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun sehingga memiliki penyisihan dengan kategori lancar (5 permil). Sedangkan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU pada Unit Eselon I Setjen per 31 Desember 2010 merupakan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Kegiatan Non Operasional PIP sebesar Rp5.700.967.805,00.

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU di SETJEN-PIP per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 74 dan Tabel 75 berikut.

Tabel 74
Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU-PIP
berupa Bunga Akrua Deposito
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
113991	Bunga Deposito Bank BRI – 25 bilyet	5.014.219.178
	Bunga Deposito Bank Mandiri – 11 bilyet	5.763.321.918
	Bunga Deposito Bank BNI – 9 bilyet	536.493.151
	Bunga Deposito Bank BTN – 10 bilyet	914.178.082
	Bunga Deposito Bank Bukopin – 14 bilyet	1.111.534.247
	Bunga Deposito Bank bjb Syariah – 1 bilyet	18.493.151
	Bunga Deposito Bank bjb – 3 bilyet	821.473.973
	Bunga Deposito Bank Sumut – 3 bilyet	3.390.625.000
	Bunga Deposito Bank Muamalat – 13 bilyet	1.288.109.589
	Bunga Deposito Bank Syariah Bukopin – 4 bilyet	86.547.945
	Bunga Deposito Bank Nagari – 2 bilyet	306.493.150
	Bunga Deposito DPPN Bank BRI – 6 bilyet	1.810.415.068
	Jumlah	21.061.904.452

Tabel 75
Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU-PIP
Selain Bunga Akrua Deposito
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
1	2	3
113991	Bunga Deposito Bank BNI	286.643.836
	Bunga Deposito Bank Syariah Bukopin	76.438.356
	Bunga Deposito Bank BRI	11.438.342
	Bunga Deposito Bank	137.534.246
	Denda Ketrlambatan Pembayaran Bunga Deposito	3.989
	Jumlah	512.058.770

Nilai Bruto Piutang dari Kegiatan Non Operasional pada Eselon I BPPK per 31 Desember 2011 sebesar Rp453.783.186,00 merupakan Piutang Bukan Pajak yang berasal dari Kegiatan Non Operasional BLU STAN. Piutang tersebut berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sedangkan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU pada Unit Eselon I BPPK per 31 Desember 2010 merupakan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Kegiatan Non Operasional STAN sebesar Rp445.269.263,00.

Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU di BPPK-STAN per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 76.

Tabel 76
Rincian Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU-STAN
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Bruto	Penyisihan	Nilai Netto	Keterangan
1	Piutang Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Gedung dan Bangunan (sudah Dilimpahkan ke DJKN)	445.269.263	(445.269.263)	-	Kategori kualitas piutang macet, besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah 100%
2	Piutang Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Saluran Air	8.513.923	(42.570)	8.471.353	Kategori kualitas piutang lancar, besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah 5/1000
	Total	453.783.186	445.311.833	8.471.353	

C.2.1.11 Persediaan

Persediaan
Rp282.731.013.941,00

Nilai Persediaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp282.731.013.941,00 dan Rp251.167.008.102,00. Nilai tersebut merupakan hasil stock opname yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Satuan kerja lingkup Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan Akuntansi Persediaan melalui aplikasi yang merupakan bagian dari SIMAK BMN.

Posisi Persediaan per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 77 berikut.

Tabel 77
Persediaan Per Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan/ (Penurunan)	%
SETJEN	3.964.923.629	3.367.068.642	597.854.987	17,76
ITJEN	566.024.806	554.033.606	11.991.200	2,16
DJA	863.820.154	1.312.867.811	(449.047.657)	(34,20)
DJP	184.170.135.826	157.533.976.337	26.636.159.489	16,91
DJBC	61.001.391.665	55.740.538.953	5.260.852.712	9,44
DJPK	502.722.419	255.842.589	246.879.830	96,50
DJPU	1.248.899.154	481.327.222	767.571.932	159,47
DJPB	21.271.969.657	21.547.320.090	(275.350.433)	(1,28)
DJKN	5.231.507.835	5.877.270.480	(645.762.645)	(10,99)
BAPEPAM LK	968.660.948	1.616.574.329	(647.913.381)	(40,08)
BPPK	2.137.225.952	2.142.752.819	(5.526.867)	(0,26)
BKF	803.731.896	737.435.224	66.296.672	8,99
JUMLAH	282.731.013.941	251.167.008.102	31.564.005.839	12,57

Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2011 per jenis persediaan dapat dilihat pada Tabel 78 berikut.

Tabel 78
Persediaan Per Jenis
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

Akun	Jenis Persediaan	31 Desember 2011
115111	Barang konsumsi	169.647.442.915
115112	Amunisi	1.490.722.434
115113	Bahan untuk pemeliharaan	11.073.164.278
115114	Suku cadang	15.313.004.983
115121	Pita cukai, materai dan leges	61.821.560.339
115124	Peralatan dan mesin untuk dijual/diserahkan masyarakat	925.000
115127	Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat	15.795.000
115128	Barang persediaan lainnya untuk dijual/ diserahkan ke masyarakat	17.299.030.538
115131	Bahan baku	3.441.609.203
115191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	87.808.808
115199	Persediaan lainnya	2.539.950.443
Jumlah		282.731.013.941

C.2.1.12 Persediaan BLU

Persediaan BLU
Rp1.107.526.185,00

Nilai Persediaan BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp1.107.526.185,00 dan Rp1.553.923.824,00. Nilai tersebut merupakan hasil *stock opname* yang dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Satuan kerja BLU lingkup Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan akuntansi persediaan melalui aplikasi yang merupakan bagian dari SIMAK BMN.

Posisi Persediaan BLU per unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 79 berikut.

Tabel 79
Persediaan BLU Per Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
SETJEN	27.660.665	74.536.850	(46.876.185)	(62,89)
BPPK	1.079.865.520	1.479.386.974	(399.521.454)	(27,01)
JUMLAH	1.107.526.185	1.553.923.824	(446.397.639)	(28,73)

ASET TETAP

C.2.3 Aset Tetap

Aset Tetap
Rp37.731.845.000.870,00
0.870,00

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar **Rp37.731.845.000.870,00** dan **Rp36.058.407.872.153,00**.

Dalam rangka penyajian nilai wajar aset tetap milik pemerintah, DJKN telah melaksanakan inventarisasi dan penilaian terhadap aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Penjelasan mengenai hasil koreksi nilai Aset Tetap selengkapnya sesuai dengan hasil penilaian Tim Penilaian Aset DJKN dijelaskan dalam pengungkapan lainnya.

Rincian Aset Tetap menurut jenis Aset Tetap dapat dilihat pada Tabel 80 berikut.

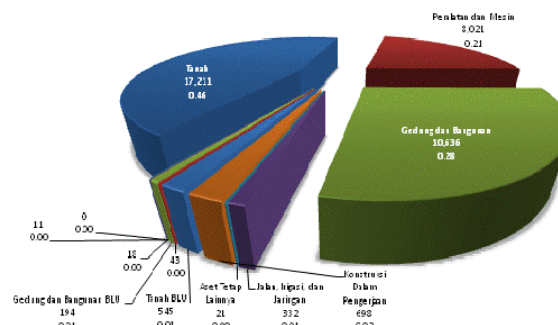
Tabel 80
Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik/(Turun)	%
Tanah	17.210.633.268.536	17.154.828.794.908	55.804.473.628	0,33
Peralatan dan Mesin	8.021.195.465.644	7.306.062.037.508	715.133.428.136	9,79
Gedung dan Bangunan	10.635.543.677.167	9.880.476.902.813	755.066.774.354	7,64
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	332.477.687.395	316.775.657.845	15.702.029.550	4,96
Aset Tetap Lainnya	21.169.879.443	20.496.576.201	673.303.242	3,28
Konstruksi Dalam Pengerjaan	698.283.768.910	615.651.377.375	82.632.391.535	13,42
Tanah BLU	545.192.062.827	545.192.062.827	0	0,00
Peralatan dan Mesin BLU	43.188.928.397	31.697.703.142	11.491.225.255	36,25
Gedung dan Bangunan BLU	194.255.849.179	144.672.506.225	49.583.342.954	34,27
Jalan, Irigasi & Jaringan BLU	18.437.121.332	16.745.701.264	1.691.420.068	10,10
Aset Tetap Lainnya BLU	11.467.292.040	7.486.585.860	3.980.706.180	53,17
KDP BLU	0	18.321.966.185	(18.321.966.185)	100
Jumlah	37.731.845.000.870	36.058.407.872.153	1.673.437.128.717	4,64

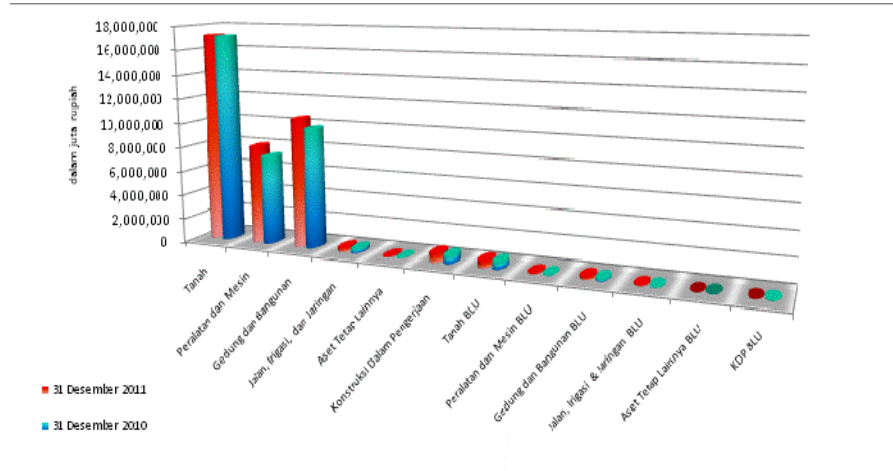
Komposisi Aset Tetap menurut jenis Aset per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Grafik 19 berikut.

Grafik 19
Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset
Per 31 Desember 2011



Perkembangan Aset Tetap per jenis Aset Tetap dapat dilihat pada Grafik 20 berikut.

Grafik 20
Perkembangan Aset Tetap per Jenis Aset Tetap



Mutasi Aset Tetap selain Aset Tetap BLU Kementerian Keuangan selama periode TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 81 berikut.

Tabel 81
Mutasi/Perubahan Aset Tetap

URAIAN TRANSAKSI	Total (Rp)
SALDO AWAL (SAK)	36.058.407.872.153
Mutasi tambah/kurang karena migrasi	(44.035.601.521)
Write off aset hilang TAYL	127.799.000
Reklasifikasi BLU TAYL	
Aset Tetap Renovasi	(22.519.457.067)
SALDO AWAL (SIMAKBMN)	35.991.980.612.565
	0
MUTASI TAMBAH :	0
Penambahan Saldo Awal	125.283.975.904
Pembelian	548.841.927.980
Transfer Masuk	490.072.122.257
Hibah (Masuk)	1.661.586.758
Penyelesaian Pembangunan	773.527.987.669
Pembatalan Penghapusan	43.983.000
Reklasifikasi Masuk	2.027.613.301.987
Perolehan Lainnya	31.159.490
Uraian Transaksi Tidak Ada	203.525.630
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	8.946.638.974
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	31.129.000
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	3.052.942.568
Pengembangan Nilai Aset	51.052.828.807
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	131.522.341.403
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	110.577.084.954
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	112.738.671.348
Pengembangan Melalui KDP	280.698.156.049

Penambahan KDP	64.310.425.350
Jumlah Mutasi Tambah	4.730.209.789.128
MUTASI KURANG :	
Pengurangan Nilai Aset	(6.690.835)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(277.824.818.678)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	(105.555.004.453)
Penghapusan	(15.740.072.507)
Transfer Keluar	(417.775.604.409)
Hibah (Keluar)	(1.346.865.900)
Reklasifikasi Keluar	(2.066.174.445.507)
Koreksi Pencatatan	(22.966.441.313)
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari Aset tetap ke aset lainnya	(4.794.420.061)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(78.140.800.845)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	0
Jumlah Mutasi Kurang	(2.990.325.164.508)
	0
SALDO AKHIR (SIMAKBMN)	37.731.865.237.185
Koreksi SAK	(20.236.317)
SALDO AKHIR (SAK)	37.731.845.000.868

Rincian mutasi Aset dari Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 82 berikut.

Tabel 82
Rincian Mutasi Aset dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2011

Jenis Belanja Modal:	Total (Rp)
Belanja Modal Tanah	352.129.432.349
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	835.813.048.509
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	798.487.202.983
Belanja Modal Jalan dan jembatan	4.037.755.755
Belanja Modal irigasi	97.334.000
Belanja Modal Jaringan	9.561.554.619
Belanja Modal Fisik Lainnya	78.456.501.158
Belanja Modal BLU	5.999.200.188
	2.084.582.029.561
Mutasi terkait belanja modal	
Pembelian	548.841.927.980
Pengembangan KDP	941.259.049.390
Pengembangan langsung	379.599.160.169
Perolehan ATR	28.734.644.215
Perolehan KDP	190.365.134.527
	2.088.799.916.281
Selisih	(4.217.886.720)
Penjelasan selisih:	
Pembelian barang ekstrakomtabel	7.333.312.833
Selisih SAKPA SIMAK karena pengembalian belanja	(109.127.750)
Pembelian barang modal/ kapitalisasi dengan bel. barang	(14.418.995.951)
Kurang lebih kapitalisasi	2.976.924.148
	(4.217.886.720)

Penjelasan selisih kurang atau lebih kapitalisasi berasal dari belanja modal yang

digunakan untuk pembelian aset tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap sebesar **Rp99.487.053,00**, Pengembalian belanja modal karena gagal lelang dan pengembalian honor pengadaan sebesar **Rp2.454.101.205,00** yang langsung dikoreksi pada SIMAK BMN, serta kurang atau lebih input kapitalisasi yang telah dikoreksi dengan transaksi koreksi nilai dan pengembangan sebesar **Rp423.335.890,00**.

Posisi saldo awal Aset Tetap pada neraca SAK dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada SIMAK-BMN per 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Tabel 83 berikut.

Tabel 83
Perbandingan Saldo Aset Tetap
Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2010
(dalam rupiah)

Uraian Aset	Saldo Awal SAK	Saldo Awal Simak BMN	Selisih
Tanah	17.154.828.794.908	17.700.020.857.735	(545.192.062.827)
Peralatan dan Mesin	7.306.062.037.508	7.294.823.508.086	11.238.529.422
Gedung dan Bangunan	9.880.476.902.813	10.002.530.991.232	(122.054.088.419)
Jalan dan Jembatan	184.315.488.769	194.724.242.880	(10.408.754.111)
Irigasi	41.143.676.004	42.515.862.684	(1.372.186.680)
Jaringan	91.316.493.072	96.281.253.545	(4.964.760.473)
Aset Tetap Lainnya	20.496.576.201	27.183.352.843	(6.686.776.642)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	615.651.377.375	633.973.343.560	(18.321.966.185)
Tanah BLU	545.192.062.827	545.192.062.827	0
Peralatan dan Mesin BLU	31.697.703.142	31.722.166.942	(24.463.800)
Gedung dan Bangunan BLU	144.672.506.225	144.648.000.425	24.505.800
Jalan dan Jembatan BLU	10.408.754.111	10.408.754.111	0
Irigasi BLU	1.372.186.680	1.372.186.680	0
Jaringan BLU	4.964.760.473	4.964.760.473	0
Aset Tetap Lainnya BLU	7.486.585.860	7.486.585.860	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU	18.321.966.185	0	18.321.966.185

Penjelasan selisih saldo awal Aset Tetap dalam neraca SAK dengan laporan posisi BMN di neraca SIMAK-BMN adalah sebagai berikut:

- Selisih kurang Tanah sebesar **Rp545.192.062.827,00** merupakan nilai Tanah BLU. Akun Tanah pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada Neraca SAK, Tanah diklasifikasikan sebagai Tanah (kode akun 131111) dan Tanah BLU (kode akun 135111).
- Selisih kurang Gedung dan Bangunan sebesar **Rp122.054.088.419,00** terdiri dari:
 - Selisih kurang sebesar **Rp144.672.506.225** merupakan nilai Gedung dan Bangunan BLU. Akun Gedung dan Bangunan pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada neraca SAK Gedung dan Bangunan diklasifikasikan sebagai Gedung dan Bangunan dan Gedung dan Bangunan BLU.
 - Selisih sebesar **Rp22.519.457.067,00** merupakan nilai Aset Tetap Renovasi yang tidak dapat diinput pada aplikasi SIMAK BMN
 - Selisih sebesar **Rp98.960.739,00** merupakan perubahan nilai saldo awal pada SIMAK BMN karena terjadinya reklasifikasi akun dalam proses migrasi.
- Selisih Peralatan dan Mesin sebesar **Rp11.238.529.422,00** terdiri dari:
 - Selisih kurang sebesar **Rp31.697.703.142** merupakan nilai Peralatan dan Mesin BLU. Akun Peralatan dan Mesin pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada neraca SAK Peralatan dan

- Mesin diklasifikasikan sebagai Peralatan dan Mesin (kode akun 131311) dan Peralatan dan Mesin BLU (kode akun 135211).
- Selisih kurang sebesar **Rp127.799.000,00** merupakan reklasifikasi aset yang hilang pada DJPK, dimana dalam neraca berdasarkan SAK, nilai tersebut telah dikeluarkan namun dalam laporan SIMAK-BMN belum dihapuskan.
 - Selisih sebesar **Rp43.064.031.564,00** merupakan perubahan nilai saldo awal pada SIMAK BMN karena terjadinya reklasifikasi akun dalam proses migrasi.
4. Selisih kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar **Rp16.745.701.264,00** merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU. Akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada neraca SAK Jalan, Irigasi, dan Jaringan diklasifikasikan sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan (kelompok akun 1317) dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU (kode akun 135411).
5. Selisih kurang Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp6.686.776.642,00** terdiri dari:
- Selisih kurang Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp7.486.585.860,00** merupakan nilai Aset Tetap Lainnya BLU. Akun Aset Tetap Lainnya pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada neraca SAK diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Lainnya (kode akun 131921) dan Aset Tetap Lainnya BLU (kode akun 135511).
 - Selisih sebesar **Rp799.809.218,00** merupakan perubahan nilai saldo awal pada SIMAK BMN karena terjadinya reklasifikasi akun dalam proses migrasi.
6. Selisih kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar **Rp18.321.966.185,00** merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU. Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada neraca SAK Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (kode akun 132111) dan Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU (kode akun 135611).

Posisi Aset Tetap pada neraca SAK dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada SIMAK BMN per 31 Desember 2011 dapat dilihat pada Tabel 84 berikut.

Tabel 84
Perbandingan Posisi Aset Tetap
Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2011

AKUN	URAIAN	SAK	SIMAK-BMN	SELISIH
131111	Tanah	17.210.633.268.536	17.755.825.331.363	(545.192.062.827)
131311	Peralatan dan Mesin	8.021.195.465.644	8.064.384.394.041	(43.188.928.397)
131511	Gedung dan Bangunan	10.635.543.677.167	10.737.179.222.226	(101.635.545.059)
131711	Jalan dan Jembatan	181.212.780.653	192.327.764.014	(11.114.983.361)
131712	Irigasi	43.403.172.596	45.639.342.276	(2.236.169.680)
131713	Jaringan	107.861.734.146	112.947.702.437	(5.085.968.291)
131911	Aset Tetap dalam Renovasi	21.080.069.443	96.300.665.435	(75.220.595.992)
131921	Aset Tetap Lainnya	89.810.000	28.945.917.483	(28.856.107.483)
132111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	698.283.768.910	698.283.768.910	0
135111	Tanah-BLU	545.192.062.827	-	545.192.062.827
135211	Peralatan dan Mesin-BLU	43.188.928.397	-	43.188.928.397
135311	Gedung dan Bangunan-BLU	194.255.849.179	-	194.255.849.179
135411	Jalan, Irigasi, dan Jaringan-BLU	18.437.121.332	-	18.437.121.332
135511	Aset Tetap Lainnya-BLU	11.467.292.040	-	11.467.292.040

Penjelasan selisih Aset Tetap dalam neraca SAK dengan laporan posisi BMN di neraca SIMAK-BMN per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

1. Selisih kurang Tanah sebesar **Rp545.192.062.827,00** merupakan nilai Tanah BLU. Akun Tanah pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada neraca SAK, Tanah diklasifikasikan sebagai Tanah (kode akun 131111) dan Tanah BLU (kode akun 135111).
2. Selisih kurang Peralatan dan Mesin sebesar **Rp43.188.928.397,00** merupakan nilai Peralatan dan Mesin BLU. Akun Peralatan dan Mesin pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada neraca SAK Peralatan dan Mesin diklasifikasikan sebagai Peralatan dan Mesin (kode akun 131311) dan Peralatan dan Mesin BLU (kode akun 135211).
3. Selisih kurang Gedung dan Bangunan sebesar **Rp101.635.545.061,00** terdiri dari:
 - Selisih kurang sebesar **Rp194.225.849.179,00** merupakan nilai Gedung dan Bangunan BLU. Akun Gedung dan Bangunan pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada neraca SAK Gedung dan Bangunan diklasifikasikan sebagai Gedung dan Bangunan dan Gedung dan Bangunan BLU.
 - Selisih kurang sebesar **Rp44.646.317,00** adalah bangunan olahraga terbuka permanen (lapangan tenis) pada pusdiklat KU yang sudah direkonstruksi namun masih menunggu SK penghapusan.
 - Selisih sebesar **Rp5.590.000,00** adalah nilai denda atas instalasi listrik pada KPPBC Selat Panjang. Pada SAK nilai tersebut telah dikurangkan dan nilai dendanya telah diakui sebagai piutang, sedangkan pada SIMAK nilai tersebut akan dikurangkan pada saat denda dibayar sesuai rekomendasi BPK.
 - Selisih sebesar **Rp92.640.540.435,00** merupakan nilai Aset Tetap Renovasi yang pada SAK kementerian direklasifikasi menjadi Gedung dan Bangunan, sedangkan pada aplikasi SIMAK BMN tetap pada akun Aset Tetap Renovasi.
4. Selisih kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar **Rp18.437.121.332,00** merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU. Akun Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada neraca SAK Jalan, Irigasi, dan Jaringan diklasifikasikan sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan (kelompok akun 1317) dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU (kode akun 135411).
5. Selisih kurang Aset Tetap Lainnya sebesar **Rp7.865.848.040,00** terdiri atas:
 - Selisih kurang sebesar **Rp7.865.848.040,00** merupakan nilai Aset Tetap Lainnya BLU. Akun Aset Tetap Lainnya pada SIMAK-BMN tidak diklasifikasikan berdasarkan BLU dan Non BLU, sementara pada neraca SAK Tanah diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Lainnya (kode akun 131921) dan Aset Tetap Lainnya BLU (kode akun 135511)
 - Sedangkan selisih pada Aset Tetap Lainnya BLU (kode akun 135511) sebesar **Rp11.467.292.040,00** antara lain terdiri dari Aset BLU sebesar **Rp7.865.848.040,00** yang diklasifikasikan ke Aset Tetap Lainnya, Aset BLU sebesar **Rp31.129.000,00** yang diklasifikasikan pada Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan (kode akun 154112) dan Aset BLU sebesar **Rp3.570.315.000** yang diklasifikasikan pada Aset Tetap dalam Renovasi (kode akun 131911).

C.2.3.1 Tanah

Tanah
Rp17.210.633.268.536,00

Nilai Tanah per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp17.210.633.268.536,00 dan Rp17.154.828.794.908,00. Terdapat peningkatan nilai aset Tanah pada TA 2011 sebesar Rp55.804.473.628,00 atau 0,33 persen.

Perbandingan rincian nilai Tanah yang dimiliki UAPPA-EI lingkup Kementerian Keuangan pada TA 2011 dan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 85 berikut.

Tabel 85
Aset Tetap Tanah Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik/ (Turun)	%
1	SETJEN	5.310.790.595.138	5.370.135.229.206	(59.344.634.068)	(1,11)
2	ITJEN	8.183.833.948	4.052.985.448	4.130.848.500	101,92
3	DJP	6.014.980.591.166	5.930.351.833.426	84.628.757.740	1,43
4	DJBC	2.874.333.716.251	2.879.897.054.588	(5.563.338.337)	(0,19)
5	DJPU	89.500.950.000	89.500.950.000	-	0,00
6	DJPB	2.088.140.787.498	2.094.050.332.663	(5.909.545.165)	(0,28)
7	DJKN	244.585.425.022	210.161.294.614	34.424.130.408	16,38
8	BAPEPAM-LK	99.961.416.247	99.984.999.247	(23.583.000)	(0,02)
9	BPPK	479.031.953.266	475.570.115.716	3.461.837.550	0,73
10	BKF	1.124.000.000	1.124.000.000	-	0,00
Jumlah		17.210.633.268.536	17.154.828.794.908	55.804.473.628	0,33

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Tanah pada TA 2011 sebesar Rp41.517.688.296,00 dapat dilihat pada Tabel 86 berikut.

Tabel 86
Mutasi/Perubahan Tanah

URAIAN TRANSAKSI	Tanah (Rp)
SALDO AWAL (SAK)	17.154.828.794.908
Reklasifikasi BLU TAYL	545.192.062.827
SALDO AWAL (SIMAKBMN)	17.700.020.857.735
MUTASI TAMBAH :	
Penambahan Saldo Awal	8.461.006.590
Pembelian	11.678.481.400
Transfer Masuk	100.448.687.988
Hibah (Masuk)	338.200.000
Penyelesaian Pembangunan	17.379.869.719
Reklasifikasi Masuk	1.722.033.425.139
Pengembangan Nilai Aset	431.173.300
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	73.125.824.128
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	70.074.383.595
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	367.794.850
Pengembangan Melalui KDP	13.300.964.015
Jumlah Mutasi Tambah	2.017.639.810.724
MUTASI KURANG :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(123.883.163.032)

Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	(10.258.153.467)
Penghapusan	(315.000.000)
Transfer Keluar	(96.874.479.296)
Hibah (Keluar)	(885.064.000)
Reklasifikasi Keluar	(1.722.421.723.391)
Koreksi Pencatatan	(7.197.753.910)
Jumlah Mutasi Kurang	(1.961.835.337.096)
SALDO AKHIR (SIMAKBMN)	17.755.825.331.363
Reklasifikasi BLU	(545.192.062.827)
SALDO AKHIR (SAK)	17.210.633.268.536

Adapun rincian mutasi Tanah dari Belanja Modal pada TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 87 berikut.

Tabel 87
Rincian Mutasi Tanah dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

BELANJA ASET TANAH :		
531	Belanja Modal Tanah	352.129.432.349
MUTASI :		
	Pembelian	11.678.481.400
	Pengembangan langsung	306.637.647.800
	Perolehan KDP	6.849.295.447
	Pengembangan KDP	48.245.843.247
TOTAL MUTASI ASET		373.411.267.894
SELISIH		(21.281.835.545)
PENJELASAN SELISIH:		
	BM Tanah untuk Pengembangan/Perolehan Aset Lain	6.229.423.900
	Perolehan/Pengembangan Tanah dari BM lain	(26.293.898.145)
	Perolehan/Pengembangan Tanah dari Bel Barang/Bel pegawai	(276.514.800)
	Kurang/ lebih kapitalisasi	0
	Selisih SPM SAKPA-SIMAK BMN	(940.846.500)

C.2.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp8.021.195.46
5.644,00

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp8.021.195.465.644,00 dan Rp7.306.062.037.508,00. Terdapat peningkatan nilai aset Peralatan dan Mesin pada TA 2011 sebesar Rp715.133.428.136,00 atau 9,79 persen.

Perbandingan rincian nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki UAPPA-EI lingkup Kementerian Keuangan pada TA 2011 dan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 88 berikut.

Tabel 88
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik / (Turun)	%
01	SETJEN	569.946.033.968	433.966.398.418	135.979.635.550	31,33
02	ITJEN	33.693.923.953	28.998.210.220	4.695.713.733	16,19
03	DJA	59.678.724.279	52.094.748.391	7.583.975.888	14,56
04	DJP	3.822.116.114.333	3.637.649.330.564	184.466.783.769	5,07
05	DJBC	2.209.810.148.373	2.003.888.446.799	205.921.701.574	10,28
06	DJPK	36.643.824.308	24.622.151.027	12.021.673.281	48,82
07	DJPU	27.551.773.884	24.384.815.244	3.166.958.640	12,99
08	DJPB	714.994.712.683	631.114.308.309	83.880.404.374	13,29
09	DJKN	271.717.188.880	237.213.859.220	34.503.329.660	14,55
10	BAPEPAM-LK	97.090.748.115	79.511.603.103	17.579.145.012	22,11
11	BPPK	133.190.173.730	114.566.710.899	18.623.462.831	16,26
12	BKF	44.762.099.138	38.051.455.314	6.710.643.824	17,64
Jumlah		8.021.195.465.644	7.306.062.037.508	715.133.428.136	9,9

Adapun mutasi/perubahan nilai aset Peralatan dan Mesin pada TA 2011 sebesar Rp715.133.428.136,00 dapat dilihat pada Tabel 89 berikut.

Tabel 89
Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin

URAIAN TRANSAKSI	Peralatan dan Mesin (Rp)
SALDO AWAL (SAK)	7.306.062.037.508
Mutasi tambah/kurang karena migrasi	(43.074.697.564)
Write off aset hilang TAYL	127.799.000
Reklasifikasi BLU TAYL	31.697.703.142
SALDO AWAL (SIMAKBMN)	7.294.812.842.086
MUTASI TAMBAH :	
Penambahan Saldo Awal	91.458.634.467
Pembelian	497.566.603.051
Transfer Masuk	339.249.357.568
Hibah (Masuk)	1.192.476.908
Penyelesaian Pembangunan	180.609.351.507
Pembatalan Penghapusan	43.983.000
Reklasifikasi Masuk	258.368.174.137

Perolehan Lainnya	13.464.490
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	6.288.623.646
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	772.967.527
Pengembangan Nilai Aset	11.851.010.046
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	38.199.124.843
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	31.770.244.347
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	620.535.400
Pengembangan Melalui KDP	33.217.616.900
Jumlah Mutasi Tambah	1.491.222.167.837
MUTASI KURANG :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(36.993.005.189)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	(47.117.255.765)
Penghapusan	(5.422.547.821)
Transfer Keluar	(259.948.901.597)
Reklasifikasi Keluar	(296.458.705.614)
Koreksi Pencatatan	(8.076.896.724)
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari Aset tetap ke aset lainnya	(4.731.433.061)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(62.901.870.111)
Jumlah Mutasi Kurang	(721.650.615.882)
SALDO AKHIR (SIMAKBMN)	8.064.384.394.041
Reklasifikasi BLU	(43.188.928.397)
SALDO AKHIR (SAK)	8.021.195.465.644

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 90 berikut.

Tabel 90
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

BELANJA ASET		
PERALATAN		
MESIN :		
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	835.813.048.509
MUTASI :		
	Pembelian	497.566.603.051
	Pengembangan langsung	11.981.543.912
	Perolehan KDP	131.207.717.338
	Pengembangan KDP	211.477.203.251
TOTAL MUTASI ASET		852.233.067.552
SELISIH		(16.420.019.043)
PENJELASAN SELISIH:		
	Pembelian Ekstrakomptabel	7.317.712.833
	BM Peralatan Mesin untuk Pengembangan/Perolehan Aset lain	23.855.201.973
	Perolehan/Pengembangan Peralatan Mesin dari BM lain	(43.509.504.088)
	Perolehan/Pengembangan Peralatan Mesin dari Bel Barang/bel pegawai	(7.271.118.376)
	Kurang/ Lebih Kapitalisasi	2.807.374.635
	Selisih SPM SAKPA-SIMAK BMN	380.313.980

Gedung dan
Bangunan Rp10.
635.543.677.167,
00

C.2.3.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp10.635.543.677.167,00 dan Rp9.880.476.902.813,00. Terdapat peningkatan nilai aset Gedung dan Bangunan pada TA 2011 sebesar Rp755.066.774.352,00 atau 0,08 persen.

Perbandingan rincian nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki UAPPA-EI lingkup Kementerian Keuangan pada TA 2011 dan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 91 berikut.

Tabel 91

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik/(Turun)	%
01	SETJEN	2.888.840.748.158	2.754.253.762.038	134.586.986.120	4,89
02	ITJEN	2.343.493.115	2.225.975.715	117.517.400	5,28
03	DJA	1.114.400.000	1.114.400.000	0	0,00
04	DJP	4.448.160.218.335	4.070.559.428.972	377.600.789.363	9,28
05	DJBC	1.461.215.455.598	1.358.444.523.703	102.770.931.895	7,57
06	DJPU	27.152.885.000	27.152.885.000	0	0,00
07	DJPB	1.208.680.059.659	1.137.799.762.257	70.880.297.402	6,23
08	DJKN	282.360.924.737	234.600.887.252	47.760.037.485	20,36
09	BAPEPAM-LK	395.843.550	395.843.550	0	0,00
10	BPPK	314.910.919.015	293.560.704.326	21.350.214.689	7,27
11	BKF	368.730.000	368.730.000	0	0,00
Jumlah		10.635.543.677.167	9.880.476.902.813	755.066.774.354	76,42

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp755.066.774.354,00 dapat dilihat pada Tabel 92 berikut.

Tabel 92

Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan

URAIAN TRANSAKSI	Gedung dan Bangunan (Rp)
SALDO AWAL (SAK)	9.880.476.902.813
Mutasi tambah/kurang karena migrasi	(161.094.739)
Reklasifikasi BLU TAYL	144.672.506.225
Aset Tetap Renovasi	(22.519.457.067)
SALDO AWAL (SIMAKBMN)	10.002.468.857.232
MUTASI TAMBAH :	
Penambahan Saldo Awal	1.777.130.479
Pembelian	16.432.552.309
Transfer Masuk	45.532.777.066
Hibah (Masuk)	130.909.850
Penyelesaian Pembangunan	486.119.958.878
Reklasifikasi Masuk	43.178.728.963
Uraian Transaksi Tidak Ada	84.740.000

Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2.657.015.328
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	2.279.975.041
Pengembangan Nilai Aset	32.297.657.890
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	20.014.693.695
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	8.732.372.014
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	111.658.946.098
Pengembangan Melalui KDP	226.687.005.778
Jumlah Mutasi Tambah	997.584.463.389
MUTASI KURANG :	
Pengurangan Nilai Aset	(6.690.835)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(115.734.318.433)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	(48.008.704.109)
Penghapusan	(9.722.524.686)
Transfer Keluar	(33.295.389.009)
Hibah (Keluar)	(41.800.000)
Reklasifikasi Keluar	(40.552.665.147)
Koreksi Pencatatan	(7.635.005.679)
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari Aset tetap ke aset lainnya	(62.987.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(7.814.013.495)
Jumlah Mutasi Kurang	(262.874.098.393)
SALDO AKHIR (SIMAKBMN)	10.737.179.222.228
Reklasifikasi BLU	(194.255.849.179)
Aset Tetap Renovasi	92.640.540.435
Koreksi SAK	(20.236.317)
SALDO AKHIR (SAK)	10.635.543.677.167

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 93 berikut.

Tabel 93
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

BELANJA ASET GEDUNG BANGUNAN :		
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	798.487.202.983
MUTASI :		
	Pembelian	16.432.552.309
	Pengembangan langsung	35.171.142.286
	Perolehan KDP	43.674.922.885
	Pengembangan KDP	663.229.901.563
TOTAL MUTASI ASET		758.508.519.043
SELISIH		39.978.683.940
PENJELASAN SELISIH:		
	Pembelian Ekstrakomptabel	15.600.000
	BM Gedung Bangunan untuk Pengembangan/Perolehan Aset Lain	55.037.590.073
	Perolehan/Pengembangan Gedung Bangunan dari BM lain	(11.530.467.161)
	Perolehan/Pengembangan Gedung Bangunan dari Bel Barang/ Bel pegawai	(6.115.585.275)
	Kurang/ Lebih kapitalisasi	168.893.713
	Selisih SPM SAKPA-SIMAK BMN	2.402.652.590

C.2.3.4 Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan
Rp181.212.780.653,00

Nilai Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp181.212.780.653,00 dan Rp184.315.488.769,00. Terdapat peningkatan nilai aset Jalan dan Jembatan pada TA 2011 sebesar Rp3.102.708.116,00 atau 1,68 persen.

Perbandingan rincian nilai Jalan dan Jembatan yang dimiliki UAPPA-EI lingkup Kementerian Keuangan pada TA 2011 dan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 94 berikut.

Tabel 94
Aset Tetap Jalan dan Jembatan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik/(Turun)	%
01	SETJEN	3.648.646.636	3.423.843.237	224.803.399	6,57
02	DJP	9.594.998.449	7.710.141.573	1.884.856.876	24,45
03	DJBC	157.157.150.397	162.430.842.788	(5.273.692.391)	(3,25)
04	DJPB	5.045.289.099	4.998.888.099	46.401.000	0,93
05	DJKN	669.932.219	655.009.219	14.923.000	2,28
06	BPPK	5.096.763.853	5.096.763.853	0	0,00
	Jumlah	181.212.780.653	184.315.488.769	(3.102.708.116)	(1,68)

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Jalan dan Jembatan sebesar Rp3.102.708.116,00 dapat dilihat pada Tabel 95 berikut:

Tabel 95
Mutasi/Perubahan Jalan dan Jembatan

URAIAN TRANSAKSI	Jalan dan Jembatan (Rp)
SALDO AWAL (SAK)	184.315.488.769
Reklasifikasi BLU TAYL	10.408.754.111
SALDO AWAL (SIMAKBMN)	194.724.242.880
MUTASI TAMBAH :	
Penambahan Saldo Awal	816.875.202
Pembelian	193.928.155
Transfer Masuk	476.502.049
Penyelesaian Pembangunan	1.448.471.052
Pengembangan Nilai Aset	65.222.000
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	48.500.000
Pengembangan Melalui KDP	1.368.280.607
Jumlah Mutasi Tambah	4.417.779.065
MUTASI KURANG :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(530)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	(25.601)
Transfer Keluar	(29.846.000)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(6.784.385.800)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	
Jumlah Mutasi Kurang	(6.814.257.931)
SALDO AKHIR (SIMAKBMN)	192.327.764.014
Reklasifikasi BLU	(11.114.983.361)
SALDO AKHIR (SAK)	181.212.780.653

Rincian mutasi Jalan dan Jembatan dari Belanja Modal pada TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 96 berikut.

Tabel 96
Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2011

BELANJA ASET JALAN DAN JEMBATAN:		
5341	Belanja Modal Jalan dan jembatan	4.037.755.755
TOTAL BELANJA		
MUTASI :		
	Pembelian	193.928.155
	Pengembangan langsung	65.222.000
	Perolehan KDP	1.010.805.300
	Pengembangan KDP	225.505.400
TOTAL MUTASI ASET		1.495.460.855
SELISIH		2.542.294.900
PENJELASAN SELISIH:		
	BM Jalan Irigasi dan Jaringan untuk Pengembangan/Perolehan Aset Lain	3.603.164.055
	Perolehan/Pengembangan Jalan Irigasi dan Jaringan dari BM lain	(1.190.934.655)
	Perolehan/Pengembangan Gedung Bangunan dari Bel Barang/ Bel pegawai	0
	Kurang/ Lebih Kapitalisasi	0
	Selisih SPM SAKPA-SIMAK BMN	130.065.500

C.2.3.5 Irigasi

Irigasi
Rp43.403.172.596,00

Nilai Irigasi per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar **Rp43.403.172.596,00** dan **Rp41.143.676.004,00**. Terdapat peningkatan nilai aset Irigasi pada TA 2011 sebesar **Rp2.259.496.592,00** atau **5,49 persen**.

Perbandingan rincian nilai Irigasi yang dimiliki UAPPA-EI lingkup Kementerian Keuangan pada TA 2011 dan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 97 berikut.

Tabel 97

Aset Tetap Irigasi Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik/(Turun)	%
01	SETJEN	4.293.595.969	3.670.305.320	623.290.649	16,98
02	DJP	1.799.188.104	1.679.694.274	119.493.830	7,11
03	DJBC	29.975.007.796	29.765.874.934	209.132.862	0,70
04	DJPB	4.819.410.845	4.000.074.795	819.336.050	20,48
05	DJKN	679.231.488	625.393.488	53.838.000	8,61
06	BPPK	1.836.738.394	1.402.333.193	434.405.201	30,98
	Jumlah	43.403.172.596	41.143.676.004	2.259.496.592	5,49

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Irigasi TA 2011 sebesar **Rp2.259.496.592,00** dapat dilihat pada Tabel 98 berikut.

Tabel 98

Mutasi/Perubahan Irigasi

URAIAN TRANSAKSI	Irigasi (Rp)
SALDO AWAL (SAK)	41.143.676.004
Reklasifikasi BLU TAYL	1.372.186.680
SALDO AWAL (SIMAKBMN)	42.515.862.684
MUTASI TAMBAH :	
Penambahan Saldo Awal	96.761.000
Pembelian	50.692.000
Transfer Masuk	150.859.629
Penyelesaian Pembangunan	1.765.740.474
Reklasifikasi Masuk	156.966.359
Pengembangan Melalui KDP	1.089.021.149
Jumlah Mutasi Tambah	3.310.040.611
MUTASI KURANG :	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	(109.831.999)
Transfer Keluar	(11.936.000)
Reklasifikasi Keluar	(42.376.800)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(22.416.220)
Jumlah Mutasi Kurang	(186.561.019)
SALDO AKHIR (SIMAKBMN)	45.639.342.276
Reklasifikasi BLU	(2.236.169.680)
SALDO AKHIR (SAK)	43.403.172.596

Rincian mutasi aset Irigasi dari Belanja Modal pada TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 99 berikut:

Tabel 99
Rincian Mutasi Irigasi dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

BELANJA ASET IRIGASI:		
5342	Belanja Modal Irigasi	97.334.000
TOTAL BELANJA		
MUTASI :		
	Pembelian	50.692.000
	Pengembangan langsung	0
	Perolehan KDP	87.781.000
	Pengembangan KDP	192.328.150
TOTAL MUTASI ASET		330.801.150
SELISIH		(233.467.150)
PENJELASAN SELISIH:		
	BM Jalan Irigasi dan Jaringan untuk Pengembangan/Perolehan Aset Lain	0
	Perolehan/Pengembangan Jalan Irigasi dan Jaringan dari BM lain	(231.877.150)
	Perolehan/Pengembangan Gedung Bangunan dari Bel Barang/ Bel pegawai	(1.590.000)
	Kurang/ Lebih Kapitalisasi	0
	Selisih SP2D BM SAKPA-SIMAK BMN	0

Jaringan
Rp107.861.734.146,00

C.2.3.6 Jaringan

Nilai Jaringan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp107.861.734.146,00 dan Rp91.316.493.072,00. Terdapat peningkatan nilai aset Jaringan pada TA 2011 sebesar Rp16.545.241.074,00 atau 18,12 persen.

Perbandingan rincian nilai aset Jaringan yang dimiliki UAPPA-EI lingkup Kementerian Keuangan pada TA 2011 dan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 100 berikut.

Tabel 100
Jaringan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik/(Turun)	%
01	SETJEN	35.496.404.220	32.729.978.750	2.766.425.470	8,45
02	DJP	30.399.755.660	29.508.643.053	891.112.607	3,02
03	DJBC	25.554.338.163	18.558.100.193	6.996.237.970	37,70
04	DJPB	5.159.235.817	4.777.697.560	381.538.257	7,99
05	DJKN	1.662.516.065	1.467.338.600	195.177.465	13,30
06	BPPK	9.420.867.726	4.205.091.471	5.215.776.255	124,03
07	BKF	168.616.495	69.643.445	98.973.050	142,11
	Jumlah	107.861.734.146	91.316.493.072	16.545.241.074	18,12

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai aset Jaringan dari Belanja Modal pada TA 2011 sebesar Rp16.545.241.074,00 dapat dilihat pada Tabel 101 berikut:

Tabel 101
Mutasi/Perubahan Jaringan

URAIAN TRANSAKSI	Jaringan (Rp)
SALDO AWAL (SAK)	91.316.493.072
Reklasifikasi BLU TAYL	4.964.760.473
SALDO AWAL (SIMAKBMN)	96.281.253.545
MUTASI TAMBAH :	
Penambahan Saldo Awal	2.412.548.215
Pembelian	5.273.272.086
Transfer Masuk	3.084.323.257
Penyelesaian Pembangunan	4.653.921.469
Reklasifikasi Masuk	3.817.851.389
Uraian Transaksi Tidak Ada	4.130.500
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.000.000
Pengembangan Nilai Aset	418.615.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	12.482.393
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	42.895.000
Pengembangan Melalui KDP	5.035.267.600
Jumlah Mutasi Tambah	24.756.306.909
MUTASI KURANG :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(968.220.000)
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	(61.033.512)

Penghapusan	(280.000.000)
Transfer Keluar	(584.090.710)
Reklasifikasi Keluar	(5.936.112.295)
Koreksi Pencatatan	(56.785.000)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(203.616.500)
Jumlah Mutasi Kurang	(8.089.858.017)
SALDO AKHIR (SIMAKBMN)	112.947.702.437
Reklasifikasi BLU	(5.085.968.291)
SALDO AKHIR (SAK)	107.861.734.146

Rincian mutasi aset Jaringan dari Belanja Modal pada TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 102 berikut.

Tabel 102
Rincian mutasi Jaringan dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2011

BELANJA ASET JARINGAN:		
5342	Belanja Modal Jaringan	9.561.554.619
TOTAL BELANJA		
MUTASI :		
	Pembelian	5.273.272.086
	Pengembangan langsung	264.499.500
	Perolehan KDP	252.171.382
	Pengembangan KDP	10.529.808.428
TOTAL MUTASI ASET		16.319.751.396
SELISIH		(6.758.196.777)
PENJELASAN SELISIH:		
	BM Jalan Irigasi dan Jaringan untuk Pengembangan/Perolehan Aset Lain	0
	Perolehan/Pengembangan Jalan Irigasi dan Jaringan dari BM lain	(6.758.196.777)
	Perolehan/Pengembangan Gedung Bangunan dari Bel Barang/ Bel pegawai	0
	Kurang/ Lebih Kapitalisasi	0
	Selisih SP2D BM SAKPA-SIMAK BMN	0

C.2.3.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp21.169.879.443,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp21.169.879.443,00 dan Rp20.496.576.201,00. Terdapat peningkatan nilai aset Jaringan pada TA 2011 sebesar Rp673.303.242,00 atau 3,28 persen.

Perbandingan rincian nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki UAPPA-EI lingkup Kementerian Keuangan pada TA 2011 dan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 103 berikut:

Tabel 103
Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik/(Turun)	%
01	SETJEN	1.853.777.082	1.197.404.467	656.372.615	54,82
02	ITJEN	722.106.711	629.215.992	92.890.719	14,76
03	DJA	522.608.169	427.387.769	95.220.400	22,28
04	DJP	4.574.400.565	4.845.377.060	(270.976.495)	(5,59)
05	DJBC	4.537.412.504	4.536.177.203	1.235.301	0,03
06	DJPK	442.041.682	347.760.137	94.281.545	27,11
07	DJPU	419.278.426	345.778.426	73.500.000	21,26
08	DJPB	1.095.420.952	1.064.322.183	31.098.769	2,92
09	DJKN	815.173.702	696.151.257	119.022.445	17,10
10	BAPEPAM-LK	173.861.145	116.075.425	57.785.720	49,78
11	BPPK	5.509.981.305	5.918.952.277	(408.970.972)	(6,91)
12	BKF	503.817.200	371.974.005	131.843.195	35,44
Jumlah		21.169.879.443	20.496.576.201	673.303.242	3,28

Adapun mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya pada TA 2011 sebesar Rp673.303.242,00 dapat dilihat pada Tabel 104 berikut:

Tabel 104
Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya

URAIAN TRANSAKSI	Aset Tetap Lainnya (Rp)
SALDO AWAL (SAK)	20.496.576.201
Mutasi tambah/kurang karena migrasi	(799.809.218)
Reklasifikasi BLU TAYL	7.486.585.860
SALDO AWAL (SIMAKBMN)	27.183.352.843
MUTASI TAMBAH :	
Penambahan Saldo Awal	20.261.019.951
Pembelian	17.646.398.979
Transfer Masuk	1.129.614.700
Penyelesaian Pembangunan	81.550.674.570
Reklasifikasi Masuk	58.156.000
Perolehan Lainnya	17.695.000
Uraian Transaksi Tidak Ada	114.655.130
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	31.129.000
Pengembangan Nilai Aset	5.989.150.571
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	170.216.344
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	85.000

Jumlah Mutasi Tambah	126.968.795.245
MUTASI KURANG :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(246.111.494)
Transfer Keluar	(27.030.961.797)
Hibah (Keluar)	(420.001.900)
Reklasifikasi Keluar	(762.862.260)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(414.498.719)
Jumlah Mutasi Kurang	(28.874.436.170)
SALDO AKHIR (SIMAKBMN)	125.277.711.918
Reklasifikasi BLU	(11.467.292.040)
Aset Tetap Renovasi	(92.640.540.435)
SALDO AKHIR (SAK)	21.169.879.443

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 105 berikut.

Tabel 105
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2011

ASET TETAP LAINNYA		
MUTASI TERKAIT BELANJA :		
	Pembelian	2.216.571.641
	Pengembangan langsung	3.197.000
	Perolehan KDP	1.717.316.560
	Pengembangan KDP	7.358.459.351
	Perolehan ATR	25.164.329.215
TOTAL MUTASI ASET		36.459.873.767
BELANJA PEROLEHAN/PENGEMBANGAN :		
51 atau 52	Belanja Pegawai/ Belanja Barang	44.874.500
531	Belanja Modal Tanah	0
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	317.396.472
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.281.938.876
534	Belanja Modal JIJ	0
536	Belanja Modal Fisik Lainnya	1.815.663.919
Selisih		0

C.2.3.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp698.283.768.910,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp698.283.768.910,00 dan Rp615.651.377.375,00. Terdapat peningkatan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2011 sebesar Rp82.632.391.535,00 atau 13,42 persen.

Perbandingan rincian nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki UAPPA-EI lingkup Kementerian Keuangan pada TA 2011 dan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 106 berikut.

Tabel 106
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik/(Turun)	%
01	SETJEN	170.256.416.552	83.776.333.161	86.480.083.391	103,23
02	DJA	0	0	0	0,00
03	DJP	304.223.274.958	370.523.105.948	(66.299.830.990)	(17,89)
04	DJBC	39.294.366.591	82.350.824.488	(43.056.457.897)	(52,28)
05	DJPU	40.296.178.800	0	40.296.178.800	0,00
06	DJPB	108.606.931.562	37.035.568.254	71.571.363.308	193,25
07	DJKN	3.898.707.630	28.318.786.779	(24.420.079.149)	(86,23)
08	BAPEPAM LK	0	0	0	0,00
09	BPPK	31.670.168.317	13.646.758.745	18.023.409.572	132,07
12	BKF	37.724.500	0	37.724.500	0,00
	Jumlah	698.283.768.910	615.651.377.375	82.632.391.535	13,42

Adapun mutasi/perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2011 sebesar Rp82.632.391.535,00 dapat dilihat pada Tabel 107 berikut:

Tabel 107
Mutasi/Perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	KDP (Rp)
SALDO AWAL 2010	615.651.377.375
Mutasi Saldo Awal KDP	46.427.092.779
Perolehan KDP	181.403.628.750
Pengembangan KDP	925.074.432.804
Koreksi Nilai KDP	(54.986.254.164)
Penghapusan/Penghentian KDP	(1.019.706.429)
Transfer Masuk KDP	40.850.051.230
Transfer Keluar KDP	(32.812.423.000)
Reklasifikasi KDP menjadi Aset Jadi	(1.022.304.430.435)
SALDO AKHIR	698.283.768.910

C.2.3.9 Tanah BLU

Tanah BLU
Rp545.192.062.827,00

Nilai Tanah BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp545.192.062.827,00 dan Rp545.192.062.827,00. Nilai tersebut merupakan nilai Tanah BLU STAN pada BPPK. Tidak terdapat penambahan/penurunan nilai aset Tanah BLU pada TA 2011.

Perbandingan rincian Tanah BLU yang dimiliki UAPPA-EI lingkup Kementerian Keuangan pada TA 2011 dan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 108 berikut:

Tabel 108
Aset Tetap Tanah BLU Per Unit eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik/ (Turun)	%
1	BPPK	545.192.062.827	545.192.062.827	-	0

Adapun mutasi/perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada TA 2011 dapat dilihat pada Tabel 109 berikut :

Tabel 109
Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin BLU

URAIAN TRANSAKSI	Tanah BLU (Rp)
SALDO AWAL SAK	545.192.062.827
Reklasifikasi Masuk	545.192.062.827
Reklasifikasi Keluar	(545.192.062.827)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	
SALDO AKHIR	545.192.062.827

C.2.3.10 Peralatan dan Mesin BLU

Peralatan dan
Mesin BLU
Rp43.188.928.397,00

Nilai Peralatan dan Mesin BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp43.188.928.397,00 dan Rp31.697.703.142,00. Nilai tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin BLU pada PIP Setjen dan STAN BPPK. Terdapat peningkatan nilai aset Peralatan dan Mesin BLU pada TA 2011 sebesar Rp7.389.402.955,00 atau 23,31 persen.

Perbandingan rincian nilai Peralatan dan Mesin BLU yang dimiliki UAPPA-EI lingkup Kementerian Keuangan pada TA 2011 dan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 110 berikut :

Tabel 110
Aset Tetap Peralatan dan Mesin BLU Per Unit eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik / (Turun)	%
01	SETJEN	8.103.945.843	5.916.375.808	2.187.570.035	36.97
02	BPPK	35.084.982.554	25.781.327.334	9.303.655.220	36.09
	Jumlah	43.188.928.397	31.697.703.142	11.491.225.255	36.25

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin BLU dapat dilihat pada Tabel 111 berikut.

Tabel 111
Mutasi/Perubahan Peralatan dan Mesin BLU

URAIAN TRANSAKSI	Peralatan dan Mesin BLU
SALDO AWAL SAK	31.697.703.142
Mutasi tambah karena proses migrasi	24.463.800
Pembelian	6.745.316.836
Transfer Masuk	9.875.250
Hibah (Masuk)	356.276.690
Reklasifikasi Masuk	4.677.799.500
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	78.650.000
Pengembangan Nilai Aset	59.987.704
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(32.850.000)
Pengembangan Melalui KDP	17.100.000
Transfer Keluar	(409.515.525)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(35.879.000)
SALDO AKHIR	43.188.928.397

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin BLU dari Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 112 berikut.

Tabel 112
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin BLU dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2011

		(dalam rupiah)
BELANJA ASET BLU:		Peralatan dan Mesin BLU
537	Belanja Modal BLU	2.271.937.870
MUTASI :		
	Pembelian	6.745.316.836
	Pengembangan langsung	59.987.704
	Perolehan KDP	
	Pengembangan KDP	17.100.000
TOTAL MUTASI ASET		6.822.404.540
SELISIH		(4.550.466.670)
PENJELASAN SELISIH:		
	Pertambahan BLU dari BM non 537	4.550.466.670

C.2.3.11 Gedung dan Bangunan BLU

Gedung BLU
Rp194.255.849.179,00

Nilai Gedung dan Bangunan BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar **Rp194.255.849.179,00** dan **Rp144.672.506.225,00**. Nilai tersebut merupakan nilai Gedung dan Bangunan BLU STAN pada BPPK.

Rincian Peralatan dan Mesin BLU per eselon I dapat dilihat pada Tabel 113 berikut.

Tabel 113
Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLU Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

No.	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik/(Turun)	%
01	BPPK	194.255.849.179	144.672.506.225	49.583.342.954	34,27

Tabel 114

**Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan BLU dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2011**

(dalam rupiah)

BELANJA ASET BLU:		Gedung bangunan BLU
537	Belanja Modal BLU	-
MUTASI :		
	Pembelian	
	Pengembangan langsung	243.388.519
	Perolehan KDP	53.355.173.500
	Pengembangan KDP	0
TOTAL MUTASI ASET		53.598.562.019
SELISIH		(53.598.562.019)
PENJELASAN SELISIH:		
	Pertambahan BLU dari BM non 537	53.598.562.019

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin BLU dapat dilihat pada Tabel 115 berikut.

Tabel 115

Mutasi/Perubahan Gedung dan Bangunan BLU

(dalam rupiah)

URAIAN TRANSAKSI	Gedung dan Bangunan BLU
SALDO AWAL SAK	144.672.506.225
Mutasi tambah karena proses migrasi	(24.505.800)
Penyelesaian Pembangunan	53.355.173.500
Pengembangan Nilai Aset	254.328.019
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(4.056.022.300)
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	54.369.535
SALDO AKHIR	194.255.849.179

C.2.3.12 Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU

*Jalan, irigasi,
dan jaringan
BLU Rp
Rp18.437.121.332,00*

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp18.437.121.332,00 dan Rp16.745.701.264,00. Nilai tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU pada PIP Setjen dan STAN BPPK.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU per eselon I dapat dilihat pada Tabel 116 berikut.

Tabel 116

**Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU Per Unit eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010**

No.	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik/(Turun)	%
01	SETJEN	73.072.318	218.174.500	(145.102.182)	(66,51)
02	BPPK	18.364.049.014	16.527.526.764	1.836.522.250	11,11
	Jumlah	18.437.121.332	16.745.701.264	1.691.420.068	10,10

Tabel 117

**Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Bangunan BLU dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2011**

(dalam rupiah)

BELANJA ASET BLU:		JIJ BLU
537	Belanja Modal BLU	73.072.318,00
MUTASI :		
	Pembelian	879.759.518,00
	Pengembangan langsung	81.400.000,00
	Perolehan KDP	
	Pengembangan KDP	1.570.212.250,00
TOTAL MUTASI ASET		2.531.371.768,00
SELISIH		(2.458.299.450,00)
PENJELASAN SELISIH:		
	Pertambahan BLU dari BM non 537	2.458.299.450,00

Tabel 118

Mutasi/Perubahan Jalan, Irigasi dan Bangunan BLU

(dalam rupiah)

Uraian TRN	
SALDO AWAL SAK	16.745.701.264
Pembelian	879.759.518
Pengembangan Nilai Aset	81.400.000
Pengembangan Melalui KDP	1.570.212.250
Transfer Keluar	(218.174.500)
Reklasifikasi Keluar	(621.777.200)
SALDO AKHIR	18.437.121.332

C.2.3.13 Aset Tetap Lainnya BLU

Aset Tetap Lainnya BLU
Rp11.467.292.040,00

Nilai Aset Tetap Lainnya BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar **Rp11.467.292.040,00** dan **Rp7.486.585.860,00**. Nilai tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya BLU pada PIP Setjen dan STAN BPPK.

Rincian Aset Tetap Lainnya BLU per eselon I dapat dilihat pada Tabel 119 berikut.

Tabel 119

**Aset Tetap Lainnya BLU Per Unit eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010**

No.	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik/(Turun)	%
1	SETJEN	3.643.668.380	42.224.380	3.601.444.000	8.529,30
2	BPPK	7.823.623.660	7.444.361.480	379.262.180	5,09
	Jumlah	11.467.292.040	7.486.585.860	3.980.706.180	53,17

Tabel 120
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya BLU dari Belanja Modal
Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

BELANJA ASET BLU:		ATL BLU
537	Belanja Modal BLU	3.570.315.000
MUTASI :		
	Pembelian	3.952.341.180
	Pengembangan langsung	
	Perolehan KDP	
	Pengembangan KDP	
TOTAL MUTASI ASET		3.952.341.180
SELISIH		(382.026.180)
PENJELASAN SELISIH:		
	Pertambahan BLU dari BM non 537	382.026.180

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya BLU dapat dilihat pada Tabel 121 berikut.

Tabel 121
Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya BLU

URAIAN TRANSAKSI	JUMLAH (Rp)
SALDO AWAL	7.486.585.860
Mutasi tambah karena proses migrasi	0
Pembelian	3.952.341.180
Transfer Masuk	0
Hibah (Masuk)	0
Penyelesaian Pembangunan	0
Reklasifikasi Masuk	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	31.129.000
Pengembangan Nilai Aset	0
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
Pengembangan Melalui KDP	0
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Keluar	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2.764.000)
SALDO AKHIR	11.467.292.040

C.2.3.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan BLU
Rp0,00*

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar **Rp0,00** dan **Rp18.321.966.185,00**. Nilai tersebut merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU pada STAN BPPK.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU per eselon I dapat dilihat pada Tabel 122 berikut.

Tabel 122
Aset Tetap KDP BLU Per Unit eselon I
Per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Naik/(Turun)	%
01	BPPK	0	18.321.966.185	(18.321.966.185)	(100,00)

Mutasi/perubahan Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU dapat dilihat pada Tabel 123 berikut.

Tabel 123
Mutasi/Perubahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU

Uraian	JUMLAH (Rp)
SALDO AWAL 2010	18.321.966.185
Mutasi Saldo Awal KDP	0
Perolehan KDP	113.523.250
Pengembangan KDP	36.506.996.315
Koreksi Nilai KDP	0
Penghapusan/Penghentian KDP	0
Transfer Masuk KDP	0
Trnasfer Keluar KDP	0
Reklasifikasi KDP menjadi Aset Jadi	(54.942.485.750)
SALDO AKHIR	0

C.2.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya

Rp801.376.507.540,00

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp801.376.507.540,00 dan Rp985.739.209.879,00, merupakan saldo Tagihan TP/TGR, Aset Tak Berwujud, Aset Tak Berwujud BLU, Aset Lain-lain dan Aset Lain-lain BLU.

Rincian Aset Lainnya per Jenis Aset dapat dilihat pada Tabel 124 berikut.

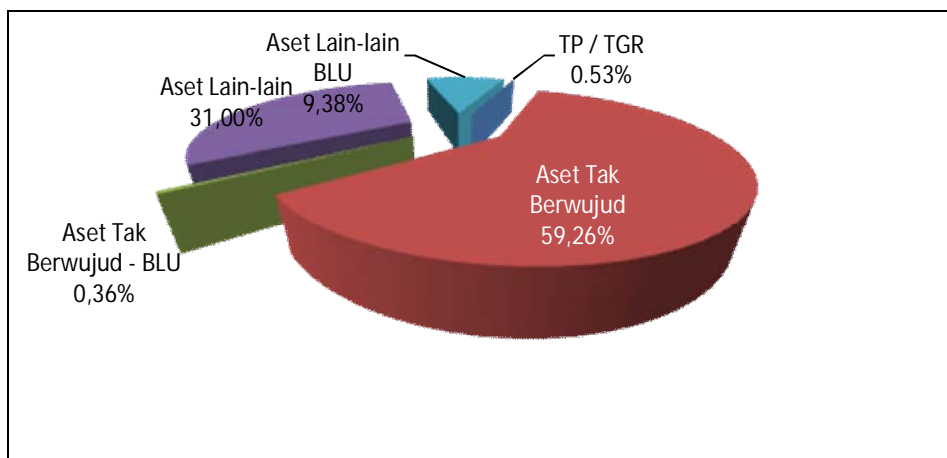
Tabel 124
Komposisi Aset Lainnya per Jenis Aset
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / TGR	26.443.698	5.402.005.376	(5.375.561.678)	(99,51)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP / TGR	(132.218)	0	(132.218)	0,00
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / TGR - Netto	26.311.480	5.402.005.376	(5.375.693.896)	(99,51)
Aset Tak Berwujud	474.893.975.396	360.495.002.682	114.398.972.714	31,73
Aset Tak Berwujud - BLU	2.898.446.790	808.658.790	2.089.788.000	258,43
Aset Lain-lain	248.393.281.860	548.617.378.647	(300.224.096.787)	(54,72)
Aset Lain-lain BLU	75.164.492.014	70.416.164.384	4.748.327.630	6,74
Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0,00
	801.376.507.540	985.739.209.879	(184.362.702.339)	(18,70)

Komposisi Aset Lainnya per Jenis Aset dapat dilihat pada Grafik 21 berikut.

Grafik 21
Komposisi Aset Lainnya Per Jenis Aset
Per 31 Desember 2011



C.2.4.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti
Rugi

Rp26.443.698,00

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang ada pada Kementerian Keuangan hanya berupa Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi/TGR merupakan tagihan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan mendatang.

Nilai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi/TGR Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 dan

2010 masing-masing sebesar **Rp26.443.698,00** dan **Rp5.402.005.376,00**. Berkurangnya nilai Tagihan Tuntutan Ganti Rugi/TGR tersebut dikarenakan adanya pelunasan ganti rugi, dan reklasifikasi akun Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/ TGR bruto dapat dilihat pada Tabel 125 berikut.

Tabel 125
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR per Unit Eselon I
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	0	120.384.000	(120.384.000)	(100,00)
015.02	ITJEN	9.000.000	0	9.000.000	0,00
015.04	DJP	8.332.014	89.375.000	(81.042.986)	(90,68)
015.05	DJBC	1.400.000	3.908.812.411	(3.907.412.411)	(99,96)
015.06	DJPK	0	21.000.000	(21.000.000)	(100,00)
015.08	DJPB	3.841.684	427.441.896	(423.600.212)	(99,10)
015.09	DJKN	3.870.000	0	3.870.000	0,00
015.11	BPPK	0	834.992.069	(834.992.069)	(100,00)
Jumlah		26.443.698	5.402.005.376	(5.375.561.678)	(99,51)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Tagihan TP/TGR berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penyajian akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Tagihan TP/TGR dapat dilihat pada Tabel 126.

Tabel 126
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR per Unit Eselon I
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
015.02	ITJEN	45.000	0	45.000	0,00
015.04	DJP	41.660	0	41.660	0,00
015.05	DJBC	7.000	0	7.000	0,00
015.08	DJPB	19.208	0	19.208	0,00
015.09	DJKN	19.350	0	19.350	0,00
Jumlah		132.218	0	132.218	0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Tagihan TP/TGR periode 31 Desember 2011 sebesar **Rp132.218,00** dihitung berdasarkan persentase penyisihan piutang sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sedangkan Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR periode 31 Desember 2010 tidak disajikan, mengingat Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2011.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2011 lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 127.

Tabel 127
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR per Unit Eselon I
per 31 Desember 2011
(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	Nilai TGR per 31 Desember 2011	Kualitas	Persentase Penyisihan Piutang Tak Tertagih (%)	Nilai Penyisihan per 31 Desember 2011
015.02	ITJEN	9.000.000	Lancar	0,50	45.000
015.04	DJP	8.332.014	Lancar	0,50	41.660
015.05	DJBC	1.400.000	Lancar	0,50	7.000
015.08	DJPB	3.841.684	Lancar	0,50	19.208
015.09	DJKN	3.870.000	Lancar	0,50	19.350
Jumlah		26.443.698			132.218

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/ TGR neto dapat dilihat pada Tabel 128 berikut.

Tabel 128
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR per Unit Eselon I
per 31 Desember 2011 dan 2010
(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	0	120.384.000	(120.384.000)	(100,00)
015.02	ITJEN	8.955.000	0	8.955.000	0,00
015.04	DJP	8.290.354	89.375.000	(81.084.646)	(90,72)
015.05	DJBC	1.393.000	3.908.812.411	(3.907.419.411)	(99,96)
015.06	DJPK	0	21.000.000	(21.000.000)	(100,00)
015.08	DJPB	3.822.476	427.441.896	(423.619.420)	(99,11)
015.09	DJKN	3.850.650	0	3.850.650	0,00
015.11	BPPK	0	834.992.069	(834.992.069)	(100,00)
Jumlah		26.311.480	5.402.005.376	(5.375.693.896)	(99,51)

Adapun rincian Tuntutan Perbendaharaan/TGR dapat dilihat pada lampiran daftar Tagihan TGR Kementerian Keuangan TA 2011.

C.2.4.2 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp474.893.975.396,00

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar **Rp474.893.975.396,00** dan **Rp360.495.002.682,00**. Aset Tak Berwujud terdiri dari *Software*, *Lisensi*, *Hasil Kajian/Penelitian*, dan *Aset Tak Berwujud Lainnya*.

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Tabel 129 berikut.

Tabel 129
Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	75.401.042.390	60.612.151.421	14.788.890.969	24,40
015.02	ITJEN	8.177.453.342	4.954.284.840	3.223.168.502	65,06
015.03	DJA	4.884.969.933	3.330.470.133	1.554.499.800	46,68
015.04	DJP	235.652.806.089	188.707.143.719	46.945.662.370	24,88
015.05	DJBC	79.838.215.247	54.681.241.434	25.156.973.813	46,01
015.06	DJPK	2.097.599.377	155.430.000	1.942.169.377	1.249,55
015.07	DJPU	7.825.404.405	7.159.518.315	665.886.090	9,30
015.08	DJPB	17.449.000.108	8.112.685.830	9.336.314.278	115,08
015.09	DJKN	15.284.332.726	14.520.832.726	763.500.000	5,26
015.10	BAPEPAM LK	16.414.368.825	6.115.169.010	10.299.199.815	168,42
015.11	BPPK	7.764.132.822	8.116.425.122	(352.292.300)	(4,34)
015.12	BKF	4.104.650.132	4.029.650.132	75.000.000	1,86

Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Tabel 130 berikut.

Tabel 130
Mutasi/Perubahan Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

SALDO AWAL	360.495.002.682
Mutasi Tambah	116.557.193.202
Penambahan Saldo Awal	177.980.000
Pembelian	40.240.953.892
Transfer Masuk	554.770.150
Hibah (Masuk)	6.195.000
Penyelesaian Pembangunan	24.677.465.504
Reklasifikasi Masuk	44.632.939.456
Penyelesaian Pembangunan Langsung	603.100.000
Pengembangan Nilai Aset	5.663.789.200
Mutasi Kurang	(2.158.220.488)
Penghapusan	(155.650.000)
Transfer Keluar	(1.207.800)
Reklasifikasi Keluar	(660.467.688)
Koreksi Pencatatan	(1.470.000)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(74.025.000)
Reklas dari Aset Tak Berwujud	(1.265.400.000)
SALDO AKHIR	474.893.975.396

C.2.4.3 Aset Tak Berwujud BLU

Aset Tak Berwujud
BLU
Rp2.898.446.790,00

Nilai Aset Tak Berwujud BLU per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp2.898.446.790,00 dan Rp808.658.790,00. Aset Tak Berwujud BLU tersebut merupakan Aset Tak Berwujud Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Rincian Aset Tak Berwujud BLU dapat dilihat pada Tabel 131 berikut.

Tabel 131
Aset Tak Berwujud BLU per Unit Eselon I
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	892.533.790	808.658.790	83.875.000	10,37
015.11	BPPK	2.005.913.000	0	2.005.913.000	0,00
Jumlah		2.898.446.790	808.658.790	2.089.788.000	258,43

Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud BLU dapat dilihat pada Tabel 132 berikut.

Tabel 132
Mutasi/Perubahan Aset Tak Berwujud BLU

(dalam rupiah)

SALDO AWAL	808.658.790
Mutasi Tambah	2.089.788.000
Pembelian	707.663.000
Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud	1.265.400.000
Pengembangan Nilai Aset	83.875.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	32.850.000
Grand Total	2.898.446.790

Aset Tak Berwujud PIP per 31 Desember 2011 sebesar **Rp892.533.790,00** berupa perangkat sistem informasi manajemen PIP; aplikasi *cash management* dan investasi jangka pendek PIP; *website* dan *webmail* PIP serta sistem pengelolaan kinerja (pendekatan *balanced scorecard*) dan kompetensi berbasis *web*.

Rincian Aset Tak Berwujud – BLU dapat dilihat pada Tabel 133 berikut.

Tabel 133
Aset Tak Berwujud BLU Per Jenis

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Software - Badan Layanan Umum	2.731.371.790
Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum	167.075.000
Jumlah	2.898.446.790

C.2.4.4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain
Rp248.393.281.860,00

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar **Rp248.393.281.860,00** dan **Rp548.617.378.647,00**.

Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada Tabel 134 berikut.

Tabel 134
Aset Lain-lain per Unit Eselon I
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	5.897.161.885	5.987.531.387	(90.369.502)	(1,51)
015.02	ITJEN	1.455.032.139	2.910.697.898	(1.455.665.759)	(50,01)
015.03	DJA	2.121.043.217	-	2.121.043.217	-
015.04	DJP	111.775.086.480	99.136.744.568	12.638.341.912	12,75
015.05	DJBC	59.603.901.693	347.513.329.197	(287.909.427.504)	(82,85)
015.06	DJPK	153.297.279	153.297.279	0	-
015.08	DJPB	48.120.869.752	44.302.826.574	3.818.043.178	8,62
015.09	DJKN	9.969.842.186	7.316.517.079	2.653.325.107	36,26
015.10	BAPEPAM LK	859.816.400	35.945.249.907	(35.085.433.507)	(97,61)
015.11	BPPK	8.437.230.829	5.351.184.758	3.086.046.071	57,67
Jumlah		248.393.281.860	548.617.378.647	(300.224.096.787)	(54,72)

Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2010, Aset Lain-lain mengalami penurunan sebesar **Rp300.224.096.787,00** atau **54,72** persen. Penurunan ini disebabkan TGR dan Piutang Bukan Pajak yang dilimpahkan ke DJKN yang pada tahun sebelumnya disajikan di Aset Lain-lain, direklasifikasi kembali ke Bagian Lancar TGR dan Piutang Bukan Pajak pada Aset Lancar. Reklasifikasi ini dilakukan sehubungan dengan ditambahkannya akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di neraca, sehingga TGR dan Piutang Bukan Pajak yang sebelumnya direklasifikasi ke Aset Lain-lain karena sudah dilimpahkan ke DJKN, dikembalikan ke akun bagian lancar TGR dan Piutang Bukan Pajak di Aset Lancar.

Aset Lain-lain sebesar **Rp248.393.281.860,00** merupakan akun Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan (154112).

Terdapat perbedaan saldo akhir akun Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan (154112) pada Neraca SAK dengan Laporan Posisi BMN di Neraca pada SIMAK-BMN sebesar **Rp1.498.666.745,00** dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 135 berikut.

Tabel 135
Perbedaan Saldo Akhir Akun Aset Tetap yang Tidak Digunakan
dalam Operasi Pemerintahan pada Neraca SAK
dengan Laporan Posisi BMN di Neraca

(dalam rupiah)

Eselon I	SAK	SIMAK-BMN	Selisih
SETJEN	5.897.161.885	5.975.684.180	(78.522.295)
ITJEN	1.455.032.139	1.473.461.139	(18.429.000)
DJA	2.121.043.217	2.121.043.217	0
DJP	111.775.086.480	111.794.046.480	(18.960.000)
DJBC	59.603.901.693	60.247.649.693	(643.748.000)
DJPK	153.297.279	281.096.279	(127.799.000)
DJPB	48.120.869.752	48.557.395.202	(436.525.450)
DJKN	9.969.842.186	9.969.842.186	0
BAPEPAM LK	859.816.400	859.816.400	0
BPPK	8.437.230.829	8.611.913.829	(174.683.000)
Jumlah	248.393.281.860	249.891.948.605	(1.498.666.745)

- Selisih kurang sebesar **Rp78.522.295,00** merupakan *write-off* nilai aset rusak berat yang hilang pada GKN Denpasar I, GKN Denpasar II, dan Kantor Pusat Setjen sebesar Rp47.393.295,00, dan aset BLU pada Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp31.129.000,00 yang direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya;
- Selisih kurang sebesar **Rp18.429.000,00** merupakan *write-off* 1 unit sepeda motor hilang yang belum diterbitkan SK penghapusan pada Inspektorat Jenderal;
- Selisih kurang sebesar **Rp18.960.000,00** merupakan *write-off* 2 unit sepeda motor di Kanwil DJP Sumatera Utara I dan Kanwil DJP Jakarta Timur yang hilang dan belum dihapuskan dari Laporan BMN masing-masing senilai **Rp11.200.000,00** dan **Rp7.760.000,00**;
- Selisih kurang sebesar **Rp643.748.000,00** merupakan *write-off* 5 unit mobil hilang pada KPPBC Bogor sebesar **Rp147.680.000,00**, KPPBC Merak sebesar **Rp147.966.000,00**, KPPBC Tangerang sebesar **Rp138.380.000,00**, Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai sebesar **Rp39.860.000,00**, dan KPPBC Purwakarta sebesar **Rp147.833.000,00**, senjata api yang hilang pada KPPBC Merauke sebesar **Rp559.000,00**, aset hilang pada KPPBC Manado sebesar **Rp11.270.000,00**, dan aset hilang pada Kanwil DJBC Sumbagsel sebesar **Rp10.200.000,00**;
- Selisih kurang sebesar **Rp127.799.000,00** merupakan *write-off* 1 unit mobil Xenia dengan nomor polisi B 2703 UQ yang hilang sebesar **Rp114.654.000,00** dan 1 unit laptop merk Toshiba sebesar **Rp13.145.000,00**;
- Selisih kurang sebesar **Rp436.525.450,00** merupakan *write-off* 1 unit kendaraan dinas hilang pada Kantor Pusat DJPB sebesar **Rp231.400.200,00**, 1 unit sepeda motor hilang pada Kanwil VI DJPB Palembang sebesar **Rp19.165.250,00**, dan *compact disc* yang hilang pada Kanwil DJPB Papua sebesar **Rp185.960.000,00**;
- Selisih kurang sebesar **Rp174.683.000,00** merupakan reklasifikasi ke Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan BLU Sebesar **Rp158.083.000,00** dan *write-off* aset hilang pada BPPK sebesar **Rp16.600.000,00** namun belum terbit SK penghapusannya.

C.2.4.5. Aset Lain-lain BLU

Aset Lain-lain BLU
Rp75.164.492.014,00

Nilai Aset Lain-lain BLU per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp75.164.492.014,00 dan Rp70.416.164.384,00.

Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada Tabel 136 berikut.

Tabel 136
Aset Lain-lain BLU per Unit Eselon I
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	75.156.978.014	70.416.164.384	4.740.813.630	6.73
015.11	BPPK	7.514.000	0	7.514.000	0.00
Jumlah		75.164.492.014	70.416.164.384	4.748.327.630	6.74

Aset Lain-lain BLU sebesar Rp75.164.492.014,00 terdiri dari akun Aset Lain-lain BLU (154411) berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp7.514.000,00 dan akun Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya (154413) sebesar Rp75.156.978.014,00.

Aset Lain-lain BLU pada Setjen sebesar Rp75.156.978.014,00 merupakan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan dinyatakan bahwa Pusat Investasi Pemerintah melaksanakan pengelolaan *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan sampai dengan BLU yang bersangkutan terbentuk. Pencairan *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan sebesar Rp1 triliun telah dilaksanakan per 30 Desember 2010. Dana tersebut ditransfer ke Rekening Pokok Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) di Bank BRI Nomor 0329-01-002840-30-0 dan langsung disimpan dalam bentuk deposito pada Bank Rakyat Indonesia dengan bunga dimuka sebesar Rp70 miliar. Bunga yang telah diterima disimpan kembali dalam bentuk deposito dengan bunga dan jasa giro sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp5.156.978.015,00 yang ditampung dalam Rekening Giro Pendapatan DPPN pada Bank BRI Nomor Rekening 0329-01-002840-30-1. Terdapat selisih sebesar Rp388.356.153,00 antara pendapatan DPPN dengan Rekening Giro Pendapatan DPPN karena terjadi kesalahan transfer pendapatan DPPN periode Desember 2011 ke Rekening Pendapatan PIP pada bank BRI Nomor Rekening 0329.01.002911.30.6. Transfer sebesar Rp1.000.000,00 dari Rekening Pendapatan DPPN ke Rekening Pokok DPPN dilakukan untuk memelihara rekening tersebut.

Rincian Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dapat dilihat pada Tabel berikut.

Nomor	Nama Bank	Jumlah Rupiah
1	2	3
1	Deposito Bank BRI	Rp 70.000.000.000
2	Giro Bank BRI	Rp 5.156.978.014
	- Bunga Deposito	Rp 5.002.602.858
	- Jasa Giro	Rp 154.375.156
JUMLAH		Rp 75.156.978.014

Aset Lain-lain BLU pada BPPK sebesar **Rp7.514.000,00** merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

Rincian mutasi/perubahan Aset Lain-lain BLU STAN (pada Unit Eselon I BPPK) dapat dilihat pada Tabel 137 berikut.

Tabel 137
Mutasi/Perubahan Aset Lain-lain BLU STAN

(dalam rupiah)	
Saldo Per 31 Desember 2010	0
Mutasi Tambah	158.083.000
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	158.083.000
Mutasi Kurang	150.569.000
Write-off Aset hilang	150.569.000
Saldo Per 31 Desember 2011	7.514.000

C.2.5 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek
Rp806.982.593.139,00

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar **Rp806.982.593.139,00** dan **Rp611.878.292.975,00**. Kewajiban Jangka Pendek ini terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka, Uang Muka dari KPPN, dan Pendapatan yang Ditangguhkan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek dapat dilihat pada Tabel 138 berikut.

Tabel 138
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)				
Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	17.174.929.541	202.520.284.203	(185.345.354.662)	(91,52)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	704.320.653.776	329.105.858.431	375.214.795.345	114,01
Pendapatan Diterima di Muka	1.583.445.635	1.657.970.182	(74.524.547)	(4,49)
Uang Muka	4.155.000	4.155.000	0	0,00
Uang Muka dari KPPN	1.435.505.756	2.249.602.563	(814.096.807)	(36,19)
Pendapatan yang Ditangguhkan	82.463.903.431	76.340.422.596	6.123.480.835	8,02
Jumlah	806.982.593.139	611.878.292.975	195.104.300.164	31,89

C.2.5.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga
Rp17.174.929.541,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar **Rp17.174.929.541,00** dan **Rp202.520.284.203,00**.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Unit Eselon I dapat dilihat pada Tabel 139 berikut.

Tabel 139
Utang Kepada Pihak Ketiga per Unit Eselon I
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	2.697.798.197	159.434.829.627	(156.737.031.430)	(98,31)
015.02	ITJEN	0	35.349.074	(35.349.074)	(100,00)
015.03	DJA	870.463.992	36.196.821	834.267.171	2.304,81
015.04	DJP	7.659.369.008	34.057.833.871	(26.398.464.863)	(77,51)
015.05	DJBC	2.435.789.853	3.109.969.638	(674.179.785)	(21,68)
015.06	DJPK	66.927.191	102.286.592	(35.359.401)	(34,57)
015.07	DJPU	49.682.201	11.559.295	38.122.906	329,80
015.08	DJPB	1.767.754.047	3.035.759.160	(1.268.005.113)	(41,77)
015.09	DJKN	315.178.998	1.023.935.877	(708.756.879)	(69,22)
015.10	BAPEPAM LK	20.417.059	237.860.256	(217.443.197)	(91,42)
015.11	BPPK	1.102.054.949	1.432.120.903	(330.065.954)	(23,05)
015.12	BKF	189.494.046	2.583.089	186.910.957	7.235,95
Jumlah		17.174.929.541	202.520.284.203	(185.345.354.662)	(91,52)

Dibandingkan dengan periode 31 Desember 2010, Utang Kepada Pihak Ketiga mengalami penurunan sebesar **Rp185.345.354.662,00** atau **91,52** persen. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pembayaran utang untuk pembelian tanah PT Taspen oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Akun dapat dilihat pada Tabel 140 berikut.

Tabel 140
Utang Kepada Pihak Ketiga per Akun
per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian Akun	31 Desember 2011
211211	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	3.203.291.894
211212	Belanja barang yang masih harus dibayar	6.826.565.975
211231	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	106.793.233
211291	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	7.038.278.439
Jumlah		17.174.929.541

C.2.5.2 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp704.320.653.776,00

Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar **Rp704.320.653.776,00** dan **Rp329.105.858.431,00**. Nilai tersebut merupakan SPMKP per 31 Desember 2011 yang belum diterbitkan SP2D-nya di DJP dan pengembalian pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir di DJBC.

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Unit Eselon I dapat dilihat pada Tabel 141 berikut.

Tabel 141
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Unit Eselon I
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
015.04	DJP	702.376.172.734	325.301.427.558	377.074.745.176	115,92
015.05	DJBC	1.944.481.042	3.804.430.873	(1.859.949.831)	(48,89)
Jumlah		704.320.653.776	329.105.858.431	375.214.795.345	114,01

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per Akun dapat dilihat pada Tabel 142 berikut.

Tabel 142
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per Akun
per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian Akun	31 Desember 2011
211311	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	59.486.148.551
211312	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	640.096.075.919
211314	Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	2.470.957
211317	Utang Kelebihan Bayar Bea Keluar	1.944.481.042
211323	Utang Kelebihan bayar Pendapatan Non Pajak Lainnya	2.791.477.307
Jumlah		704.320.653.776

C.2.5.3 Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp1.583.445.635,00*

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar **Rp1.583.445.635,00** dan **Rp1.657.970.182,00**.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada Tabel 143 berikut.

Tabel 143
Pendapatan Diterima Dimuka per Unit Eselon I
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	682.709.621	428.080.583	254.629.038	59,48
015.04	DJP	0	11.500.000	(11.500.000)	(100,00)
015.05	DJBC	218.189.167	24.168.333	194.020.834	802,79
015.08	DJPB	20.828.097	158.766	20.669.331	13.018,74
015.11	BPPK	661.718.750	1.194.062.500	(532.343.750)	(44,58)
Jumlah		1.583.445.635	1.657.970.182	(74.524.547)	(4,49)

1. Pendapatan Diterima Dimuka Setjen sebesar **Rp682.709.621,00** terdiri dari Pendapatan Sewa Diterima Dimuka sebesar **Rp473.181.843,00** pada GKN Yogyakarta, GKN Surabaya I, GKN Surabaya II, GKN Medan, GKN Palembang, GKN Makassar, dan PNPB Lainnya Diterima Dimuka sebesar **Rp209.527.778,00** pada PIP;
2. Pendapatan Diterima Dimuka Ditjen Bea dan Cukai sebesar **Rp218.189.167,00**

merupakan pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Kantor Pusat, Kanwil DJBC Banten, KPPBC Bandung, dan KPPBC Juanda;

3. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka DJPB sebesar **Rp20.828.097,00** merupakan sewa kantin pada Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta sebesar **Rp578.097,00**, dan sewa ruangan mesin ATM pada KPPN Cirebon sebesar **Rp20.250.000,00**;
4. PNPB Lainnya Diterima Dimuka pada BLU STAN BPPK sebesar **Rp661.718.750,00** merupakan pendapatan dari kerja sama pendidikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam penyelenggaraan program DIII Akuntansi Pemerintah.

C.2.5.4 Uang Muka

Uang Muka
Rp4.155.000,00

Nilai Uang Muka per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar **Rp4.155.000,00** dan **Rp4.155.000,00**. Nilai tersebut merupakan uang muka yang berasal dari penarikan kembali kelebihan setoran sisa UP TA 2008 pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan pada TA 2010.

Rincian Uang Muka dapat dilihat pada Tabel 144 berikut.

Tabel 144
Uang Muka per Unit Eselon I
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
015.08	DJPB	4.155.000	4.155.000	0	0,00

C.2.5.5 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp1.435.505.756,00

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar **Rp1.435.505.756,00** dan **Rp2.249.602.563,00**. Nilai tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Rincian Uang Muka dari KPPN dapat dilihat pada Tabel 145 berikut.

Tabel 145
Uang Muka dari KPPN per Unit Eselon I
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	(1.279.591.407)	44.294.149	(1.323.885.556)	(2.988,85)
015.04	DJP	1.325.869.577	1.277.176.465	48.693.112	3,81
015.05	DJBC	991.716.122	413.703.068	578.013.054	139,72
015.08	DJPB	206.792.593	207.216.045	(423.452)	(0,20)
015.09	DJKN	190.631.871	262.704.258	(72.072.387)	(27,43)
015.11	BPPK	87.000	44.508.578	(44.421.578)	(99,80)
Jumlah		1.435.505.756	2.249.602.563	(814.096.807)	(36,19)

C.2.5.6 Pendapatan Yang Ditangguhkan

*Pendapatan
Ditangguhkan
Rp82.463.903.431,00*

Nilai Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar **Rp82.463.903.431,00** dan **Rp76.340.422.596,00**. Nilai tersebut merupakan PNPB yang belum disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan dan pendapatan BLU yang dibatasi penggunaannya yang belum disahkan per 31 Desember 2011. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan dapat dilihat pada Tabel 146 berikut.

Tabel 146
Pendapatan yang Ditangguhkan per Unit Eselon I
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	76.913.137.633	70.416.164.384	6.496.973.249	9,23
015.02	ITJEN	4.537.500	316.795.001	(312.257.501)	(98,57)
015.03	DJA	0	933.012.949	(933.012.949)	(100,00)
015.04	DJP	27.735.915	12.649.358	15.086.557	119,27
015.05	DJBC	910.473.709	315.301.741	595.171.968	188,76
015.08	DJPB	138.689.827	124.562.722	14.127.105	11,34
015.09	DJKN	4.151.689.346	3.741.743.312	409.946.034	10,96
015.10	BAPEPAM LK	315.151.750	418.436.050	(103.284.300)	(24,68)
015.11	BPPK	2.487.751	61.727.779	(59.240.028)	(95,97)
015.12	BKF	0	29.300	(29.300)	(100,00)
Jumlah		82.463.903.431	76.340.422.596	6.123.480.835	8,02

C.2.6 Kewajiban Jangka Panjang

*Kewajiban Jangka
Panjang RpNihil*

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar **RpNihil** dan **Rp149.937.775.000,00**. Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2010 merupakan Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya.

C.2.6.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

*Utang Jangka
Panjang Dalam
Negeri Lainnya
RpNihil*

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya dapat dilihat pada Tabel 147 berikut.

Tabel 147
Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Kode	Eselon I	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
015.01	SETJEN	0	149.937.775.000	(149.937.775.000)	(100,00)

Penurunan ini disebabkan adanya pelunasan pembayaran tahap III (2012) atas pembelian tanah pada PT Taspen untuk pembangunan gedung oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal yang dilakukan pada TA 2011.

C.2.7 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar
Rp62.084.362.174.070
,00

Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:

Tabel 148
Rincian Ekuitas Dana Lancar
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Cadangan Piutang	60.326.557.849.853	71.010.875.515.466	(10.684.317.665.613)	(15,05)
Cadangan Persediaan	283.838.540.126	252.720.931.926	31.117.608.200	12,31
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(717.825.069.672)	(531.332.342.563)	(186.492.727.109)	35,10
Dana Lancar BLU	2.168.961.124.597	1.085.722.227.076	1.083.238.897.521	99,77
Barang/Jasa yang Harus Diterima	24.214.537.744	30.201.365.732	(5.986.827.988)	(19,82)
Barang/Jasa yang Harus Diserahkan	(1.384.808.578)	(1.657.970.182)	273.161.604	(16,48)
Jumlah	62.084.362.174.070	71.846.529.727.455	(9.762.167.553.385)	(13,59)

C.2.7.1 Cadangan Piutang

Cadangan Piutang
Rp60.326.557.849.853,
00

Cadangan Piutang sebesar **Rp60.326.557.849.853,00** merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang dan Uang Muka Belanja yang terdiri dari:

Tabel 149
Rincian Cadangan Piutang
per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2011
1	Piutang Pajak	108.063.462.383.641
2	Piutang Bukan Pajak	85.849.145.052
3	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	9.874.029.786
4	Uang muka belanja	2.712.310.758
5	Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	14.938.119.944
6	Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	22.027.746.408
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak	(47.817.309.090.339)
8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(44.869.379.520)
9	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(9.478.786.128)
10	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Keg Operasional BLU	(95.448.100)
11	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Keg Non Operasional BLU	(553.181.649)
	Jumlah	60.326.557.849.853

C.2.7.2 Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan
Rp283.838.540.126,00

Cadangan Persediaan sebesar **Rp283.838.540.126,00** merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan. Jumlah tersebut terdiri dari :

- Persediaan Rp 282.731.013.941,00
- Persediaan BLU Rp 1.107.526.185,00

C.2.7.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek (Rp 717.825.069.672,00)

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek sebesar **(Rp717.825.069.672,00)**. Nilai tersebut terdiri dari:

Tabel 150
Rincian Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek
per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian Akun	31 Desember 2011
211211	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(3.203.291.894)
211212	Belanja barang yang masih harus dibayar	(6.826.565.975)
211231	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	(106.793.233)
211291	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(3.015.230.351)
211311	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	(59.486.148.551)
211312	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	(640.096.075.919)
211314	Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	(2.470.957)
211317	Utang Kelebihan Bayar Bea Keluar	(1.944.481.042)
211323	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya	(2.791.477.307)
211811	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0
211819	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima di Muka	(198.637.057)
212411	Pendapatan yang Ditangguhkan	(153.897.386)
	Jumlah	(717.825.069.672)

C.2.7.4 Dana Lancar BLU

Dana Lancar BLU
Rp2.168.961.124.597,
00

Dana Lancar BLU sebesar **Rp2.168.961.124.597,00** merupakan akun penyeimbang dari akun Kas pada BLU.

C.2.7.5 Barang/Jasa Yang Harus Diterima

Barang/Jasa yang
Harus Diterima
Rp24.214.537.744,00

Barang/Jasa yang Harus Diterima sebesar **Rp24.214.537.744,00** merupakan akun penyeimbang dari akun Uang Muka Belanja.

C.2.7.6 Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang
Harus Diserahkan
(Rp1.384.808.578,00)

Barang/Jasa yang Harus Diserahkan sebesar **(Rp1.384.808.578,00)** merupakan akun penyeimbang dari akun Pendapatan Diterima Dimuka.

C.2.8 Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana
Investasi
Rp38.458.064.530.396,
00

Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2011 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2011	31 Desember 2010	Kenaikan (Penurunan)	%
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	37.731.845.000.870	36.058.407.872.153	1.673.437.128.717	4,64
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	726.219.529.526	915.323.045.495	(189.103.515.969)	(20,66)
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran utang Jangka Panjang	0	(149.937.775.000)	149.937.775.000	(100,00)
	38.458.064.530.396	36.823.793.142.648	1.634.271.387.748	4,44

C.2.8.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Diinvestasikan Dalam
Aset Tetap
Rp37.731.845.000.870
,00

Diinvestasikan dalam Aset Tetap sebesar **Rp37.731.845.000.870,00** merupakan akun penyeimbang Aset Tetap.

C.2.8.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan Dalam
Aset Lainnya
Rp726.219.529.526,00

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar **Rp726.219.529.526,00** merupakan akun penyeimbang Aset Lainnya.

C.2.8.3 Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana yang Harus
Disediakan Untuk
Pembayaran Utang
Jangka Panjang
RpNihil

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang sebesar **RpNihil** merupakan akun penyeimbang Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya.

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan Penting
Lainnya

1. Penatausahaan Barang Milik Negara

a. Aset Rumah Negara

Dari 3.022 unit Bangunan Tempat Tinggal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat 378 unit yang dihuni oleh orang yang tidak berhak. Sehubungan dengan hal tersebut, DJP telah melakukan upaya-upaya pengamanan baik secara administratif maupun secara hukum. Upaya tersebut antara lain:

1. Upaya Administratif, yaitu:

- 1) Penerbitan surat-surat kepada penghuni yang tidak berhak;
- 2) Penerbitan surat-surat dalam rangka pengamanan aset tanah, yaitu surat dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- 3) Telah diusulkan Penetapan Status Golongan Rumah Negara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk Rumah Negara yang terdapat di Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Timur I dan Kanwil DJP Kalimantan Timur sebagai Rumah Negara Golongan I;
- 4) Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-83/PJ./2009 tanggal 14 Juli 2009 dimana seluruh Kabag Umum Kanwil DJP terlibat dalam Tim Satuan Tugas tersebut; dan
- 5) Pembentukan Tim Penertiban Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Nomor: 534/KM.1/2009 tanggal 5 Des 2009.

2. Upaya Hukum, yaitu:

dengan melaporkan 119 orang pensiunan penghuni rumah negara kepada Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak (Pasal 167 KUHP).

b. Revaluasi Aset

Aset pada DJP yang belum di-IP sesuai temuan pemeriksaan BPK RI adalah sebesar Rp195.330.450.986,00. Tanggapan DJP adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah dilakukan verifikasi diketahui bahwa terhadap aset dimaksud, saat ini

jumlah yang belum dinilai kembali adalah sebesar Rp13.084.481.413,00;

- 2) Terhadap aset-aset yang belum dinilai telah disampaikan permohonan kepada KPKNL terkait untuk segera dilakukan penilaian kembali.

c. Sertifikasi Tanah

Luas tanah di lingkungan DJP sebanyak 3.346.404 m². Terdapat sebanyak 406 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut, DJP telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukan koordinasi dengan DJKN dalam rangka sertifikasi tanah.
- 2) Telah dilakukan koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta termasuk didalamnya 5 Kantor Pertanahan di wilayah DKI Jakarta.
- 3) KPDJP telah memerintahkan seluruh Kanwil DJP untuk berkoordinasi dengan Kanwil DJKN dan Kanwil BPN di wilayah masing-masing dalam rangka melakukan sertifikasi tanah.

d. Serah Terima Aset BA 999.08 ke BA 015 Unit Eselon I DJP

Penyerahan Aset Tetap BA 999.08 ke BA 015 telah dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-25/AG/2011 tanggal 7 November 2011 (terlampir).

2. PINTAR dan CTF-7

DJP dalam TA 2011 melaksanakan reformasi perpajakan tahap ketiga yang juga disebut sebagai PINTAR (*Project for Indonesian Tax Administration Reform*). Dalam hal pendanaan, estimasi total pendanaan PINTAR adalah sebesar kurang lebih USD 146 juta, dimana sekitar 75% atau sebesar USD 110 juta dibiayai oleh pinjaman dari *World Bank*, sedangkan 25% atau USD 36 juta dibiayai oleh APBN. PINTAR merupakan proyek berskala besar yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun sehingga merupakan proyek yang bersifat *multi years*. *Loan agreement* PINTAR ditandatangani pada 9 Februari 2009 dan berlaku efektif (*loan effectiveness*) pada bulan Agustus 2009. *Closing date* dari *loan agreement* PINTAR adalah pada 31 Desember 2015. Memperhatikan *progress* persiapan dan dinamika yang berkembang, DJP mengusulkan perpanjangan *closing date* menjadi 30 Juni 2017 dan Bappenas telah menyetujui usulan tersebut. Sesuai kewenangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan mengirimkan permohonan perpanjangan *closing date* kepada *World Bank*, namun sampai dengan saat ini *World Bank* belum memberikan respon.

Selain itu, dapat diinformasikan bahwa pengadaan PINTAR dibagi menjadi 3 paket pengadaan yaitu:

1. Paket *Core Tax* dengan nilai sebesar US\$115,368,000, proses pengadaan telah mencapai tahapan permintaan *No Objection Letter* (NOL) atas *Bid Evaluation Report* (BER) kepada *World Bank*.
2. Paket *Human Resources Management Information System* (HRMIS) dengan nilai sebesar US\$6,900,000 telah mencapai tahapan persiapan dokumen pengadaan dan dokumen *functional baseline* PINTAR khusus Komponen HRMIS.
3. Paket *Owner's Agent* dengan nilai sebesar US\$8,664,000, proses pengadaan telah mencapai tahapan permintaan *No Objection Letter* (NOL) dari *World Bank* atas

Technical Evaluation Report (TER).

Selain itu, DJP juga mendapatkan program bantuan dari *World Bank* untuk mendukung tujuan reformasi administrasi perpajakan berupa *Indonesia: Technical Assistance to Indonesia Tax administration Reform under the Support to Public Financial Management and Revenue Administration Multi Donor Trust Fund Grant No. 093998*. Proyek yang didanai dari hibah ini ditujukan untuk penyempurnaan sistem administrasi perpajakan guna mendukung PINTAR, peningkatan kapasitas manajemen proyek dan implementasi manajemen perubahan, pengembangan kapasitas intelijen dan penyidikan pajak, serta *knowledge management*.

Nilai Dana Hibah ini sebesar US\$1,643,200, *Grant Agreement* ditandatangani dan mulai berlaku efektif tanggal 22 April 2009. *Closing Date* dari *Trust Fund Grant No. 093998* adalah 31 Oktober 2012.

Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. *Consultancy Services for The Development of Knowledge Management Strategy, Analysis, and Implementation Roadmap for DGT;*

Kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan *blueprint* strategi penerapan *Knowledge Management* di DJP. Kegiatan ini telah diselesaikan pada tanggal 12 Desember 2011 dan telah terjadi *disbursement* berupa pembayaran jasa konsultan sebesar Rp777.928.893,00. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen sebagai berikut ini:

- a. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage I – Book 1: KM Startegic Intent Report;*
- b. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage I – Book 2: KM Readiness Assessment;*
- c. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage I – Book 3: DG Tax Knowledge Assets Report;*
- d. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage I – Book 4: KM Technology Landscape Report;*
- e. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage I – Executive Summary;*
- f. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage II – Envisioning and Strategy Discussion Report;*
- g. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage II – Executive Summary;*
- h. *KM Blueprint and Implementation Roadmap Development Stage III – Blueprint and Implementation Roadmap Details;*

2. *Consultancy Services for Independent Bid Evaluation (IBE)*

Independent Bid Evaluation (IBE) Report untuk paket *Core Tax* telah diselesaikan oleh konsultan kepada PIU pada tanggal 8 Agustus 2011 dan telah dibayarkan *disbursement* sebesar US\$37,455 berupa pembayaran jasa konsultan dalam menyusun *IBE Report* untuk paket *Core Tax*. *IBE Report* tersebut selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan pada tanggal

11 Agustus 2011. Saat ini, sedang dilaksanakan IBE untuk paket *Owner's Agent*. IBE untuk paket HRMIS belum dilaksanakan mengingat pengadaan Paket HRMIS belum dimulai.

3. *Change Management Consultancy Services to Support PINTAR*

Proses pengadaan sudah mencapai tahapan negosiasi kontrak.

4. *Consultancy Services for Criminal Investigation*

Proses pengadaan sudah mencapai tahapan permintaan NOL kepada *World Bank* atas *Technical Evaluation Report (TER)*.

5. *Procurement Assistance Services*

Kegiatan ini bertujuan membantu PIU, Panitia Pengadaan, dan *Technical Team* selama tahap persiapan kontrak sampai dengan penandatanganan kontrak. Konsultan *Procurement Assistance Services* telah menyelesaikan 3 (tiga) dari 4 (empat) *deliverables* yaitu:

- a. *Presentation for Pre-Bid Conference*;
- b. *Technical Report Template*;
- c. *Technical Evaluation Worksheet*.

Pada tahun 2011 telah terjadi *disbursement* sebesar US\$49,368, sebagai pembayaran 3 (tiga) *deliverables* tersebut.

6. *Executive Program on Comparative Tax Policy and Administration*

Pada tahun 2011 telah dilaksanakan di John F. Kennedy School of Government, Harvard University (Harvard Kennedy School) pada tanggal 20 Juni – 1 Juli 2011 melalui Program *Comparative Tax Policy and Administration (Comtax)*. Kegiatan ini diikuti oleh 3 peserta lain dari Eselon II DJP selaku delegasi Indonesia. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan memperdalam pemahaman mengenai desain dan implementasi sistem perpajakan dalam tataran internasional. *Disbursement* yang terjadi pada tahun 2011 sehubungan dengan kegiatan adalah sebesar US\$37,157.23.

3. Piutang Pajak pada DJP

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) maupun Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan *marketing fee* PT Pertamina (Persero) adalah sejumlah Rp28.075.790.794.612,00 yang terdapat di KPP BUMN dan diterbitkan pada tahun 2010 dan 2011. SKPKB/SKPKBT PPN BBM bersubsidi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

No	Nomor Kohir	Tgl Terbit	Jatuh Tempo	Th Pajak	Nilai Kohir	Pengurangan Sanksi	Nilai Piutang - Net
Tahun Penerbitan 2010							
1	00134/207/05/051/10	28/10/2010	27/11/2010	2005	15.920.189.782.668	5.163.607.986.243	10.756.581.796.425
2	00155/207/04/051/10	28/10/2010	27/11/2010	2004	11.647.582.317.340	3.783.527.438.291	7.864.054.879.049
3	00165/207/03/051/10	28/10/2010	27/11/2010	2003	1.903.109.208.000	617.224.608.000	1.285.884.600.000

	Subtotal				29.470.881.308.008	9.564.360.032.534	19.906.521.275.474
Tahun Penerbitan 2011							
1	00002/307/02/051/11	27/05/2011	26/06/2011	2002	3.128.923.819.000	-	3.128.923.819.000
2	00004/307/01/051/11	28/04/2011	27/05/2011	2001	5.040.345.700.138	-	5.040.345.700.138
	Subtotal				8.169.269.519.138	-	8.169.269.519.138
	Total				37.640.150.827.146	9.564.360.032.534	28.075.790.794.612

SKPKB PPN atas BBM bersubsidi yang diterbitkan pada tahun 2010 sebesar Rp19.906.521.275.474,00 sebagaimana tersebut di atas telah dilunasi melalui mekanisme Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan SP2D Nomor 341266R/019/019 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp22.987.224.193.111,00.

Atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK-RI Tahun 2010 pada Laporan Keuangan DJP dan Laporan Keuangan BUN diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK/KM.3/2011 tentang Pembatalan Pembayaran Subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebesar Rp21.459.321.275.474,00 dari total nilai SPM Nomor 00088 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp22.987.224.193.111,00 sehingga mengakibatkan SKPKB PPN atas BBM bersubsidi yang diterbitkan pada tahun 2010 sebesar Rp19.906.521.275.474,00 menjadi piutang pajak kembali.

Sebagai tindak lanjut temuan BPK RI dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2010, maka SKPKBT PPN atas BBM bersubsidi yang diterbitkan pada tahun 2011 sebesar Rp8.169.269.519.138,00 tidak jadi dilunasi melalui mekanisme DTP sehingga tetap menjadi piutang pajak.

Sebagai tindak lanjut temuan BPK-RI dalam Laporan Keuangan DJP Tahun 2010 maka dalam penyajian piutang pajak di neraca sebesar Rp86.801.366.456.347,00 telah termasuk piutang pajak dari SKPKB/SKPKBT PPN atas BBM bersubsidi senilai Rp28.075.790.794.612,00 sebagaimana tersebut di atas dan telah digolongkan ke dalam kualitas tunggakan dengan kriteria diragukan per tanggal 31 Desember 2011, karena piutang pajak tersebut sudah tidak dapat ditagih lagi dan memenuhi syarat untuk dihapuskan tetapi belum diusulkan untuk dihapuskan, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

Dengan adanya *subsequent event* yaitu pengusulan penghapusan piutang PPN atas BBM bersubsidi tersebut di atas pada tanggal 13 April 2012 serta agar piutang pajak yang disajikan lebih mencerminkan nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka kualitas piutang PPN atas BBM bersubsidi tersebut di atas direvisi menjadi kualitas macet dengan penyisihan sebesar 100 persen.

4. Sengketa Pajak

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Disamping itu, undang-undang perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan

Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh UU Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

- a) Keberatan terdiri dari:
 - 1) Keberatan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
 - 2) Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB).
 - b) Non Keberatan terdiri dari:
 - 1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
 - 2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
 - 3) Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
 - 4) Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
 - 5) Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
 - 6) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU PBB; dan
 - 7) Pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam UU PBB;
 - c) Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 - d) Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu ketetapan pajak yang meliputi:
- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

- 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- 4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- 5) Surat Tagihan Pajak (STP); dan
- 6) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan, upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlah ketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan, dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2011 adalah 33.518 ketetapan/keputusan/putusan dengan nominal sebesar [Rp58.968.954.552.851,00](#).

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Jenis Ketetapan	Jumlah Ketetapan/Keputusan/Putusan	Nominal Ketetapan/Keputusan/Putusan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
SKPKB/SKPKBT/STP/SPT/Keputusan/Putusan Kurang Bayar	30.671	39.722.052.480.324,00	411.561.842,77	43.454.095.270.562,00
SKPLB/Keputusan/Putusan Lebih Bayar	1.634	12.927.510.419.815,00	285.327.399,92	15.514.859.282.287,00
SKPN/Keputusan/Putusan Nihil	1.213	-	-	-
Jumlah	33.518	52.649.562.900.139,00	696.889.242,69	58.968.954.552.849,00

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Jenis Sengketa Pajak	Jumlah Ketetapan/Keputusan/Putusan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Non Keberatan	15.613	2.192.208.805.310,00	94.890.502,06	3.052.675.877.990,00
Keberatan	9.387	13.420.196.091.846,00	203.759.956,54	15.267.891.377.750,00
Banding/Gugatan	5.903	28.954.868.123.069,00	327.475.922,15	31.924.419.785.124,00
Peninjauan Kembali	2.615	8.082.289.879.913,00	70.762.861,94	8.723.967.511.985,00
Jumlah	33.518	52.649.562.900.138,00	696.889.242,69	58.968.954.552.849,00

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2011 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Jumlah Sengketa Pajak			
		Jumlah Ketetapan/Keputusan an/Putusan	Nilai Dalam Rp	Nilai Dalam USD	Total Dalam Rp
1	PPh Pasal 25 OP	586	187.726.220.492	-	187.726.220.492
2	PPh Pasal 25 Badan	3.277	19.549.580.655.472	653.531.308,12	25.475.802.557.541
3	PPh Pasal 21	1.188	704.491.282.105	-	704.491.282.105
4	PPh Pasal 22	111	38.475.800.761	-	38.475.800.761
5	PPh Pasal 23	1.652	1.588.450.743.325	38.746.438,90	1.939.803.451.270
6	PPh Pasal 26	794	5.126.201.832.590	2.881.318,40	5.152.329.627.841
7	PPh Final (Pasal 4(2), Pasal 15, Pasal 19, dsb)	885	746.047.029.124	-	746.047.029.124
8	PPN	13.771	23.972.579.329.579	-	23.972.579.329.579
9	PPn BM	85	208.427.425.515	-	208.427.425.515
10	Bunga Penagihan	331	128.039.294.089	141.704,21	129.324.271.095
11	PKK	-	-	-	-
12	PBB Sektor Perdesaan	2.326	1.799.024.842	-	1.799.024.842
13	PBB Sektor Perkotaan	8.268	59.328.583.086	-	59.328.583.086
14	PBB Sektor Perkebunan	147	66.197.217.428	-	66.197.217.428
15	PBB Sektor Perhutanan	44	32.528.061.542	-	32.528.061.542
16	PBB Sektor Pertambangan Non Migas	39	184.956.695.236	1.588.472,70	199.360.965.679
17	PBB Sektor Pertambangan Migas	1	482.302.932	-	482.302.932
18	BPHTB	13	54.251.402.017	-	54.251.402.017
	Jumlah	33.518	52.649.562.900.135	696.889.242,33	58.968.954.552.849

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan kantor wilayah per 31 Desember 2011 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

No	Kanwil	Jumlah Ketetapan/Keputusan /Putusan	Total Dalam Rp
1	ACEH	237	165.261.365.269,00
2	SUMATERA UTARA I	343	365.659.433.965,00
3	SUMATERA UTARA II	343	115.434.625.904,00
4	RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	657	776.643.110.080,00
5	SUMATERA BARAT DAN JAMBI	377	71.747.368.819,00

6	SUMSEL DAN KEP. BABEL	1.050	528.912.916.551,00
7	BENGKULU DAN LAMPUNG	238	115.252.988.892,00
8	JAKARTA PUSAT	1.311	2.057.972.732.826,00
9	JAKARTA BARAT	568	588.882.065.264,00
10	JAKARTA SELATAN	1.131	3.088.994.087.324,00
11	JAKARTA TIMUR	860	450.832.049.088,00
12	JAKARTA UTARA	262	401.598.737.174,00
13	JAKARTA KHUSUS	4.259	13.494.872.121.641,00
14	BANTEN	1.679	347.753.992.595,00
15	JAWA BARAT I	5.248	570.225.912.888,00
16	JAWA BARAT II	1.110	602.934.642.983,00
17	JAWA TENGAH I	1.699	316.912.186.004,00
18	JAWA TENGAH II	760	199.411.193.805,00
19	DIY	411	94.956.198.519,00
20	JAWA TIMUR I	1.142	240.305.237.227,00
21	JAWA TIMUR II	1.602	385.258.478.344,00
22	JAWA TIMUR III	1.305	109.623.822.985,00
23	KALIMANTAN BARAT	249	242.851.383.411,00
24	KALSEL DAN KALTENG	1.316	701.036.900.847,00
25	KALIMANTAN TIMUR	532	826.422.811.027,00
26	SULSELBARTENG	901	215.675.914.618,00
27	SULUTTENG & MALUT	184	25.715.683.884,00
28	BALI	689	253.721.570.021,00
29	NUSA TENGGARA	695	24.090.631.249,00
30	PAPUA DAN MALUKU	141	320.353.918.922,00
31	WAJIB PAJAK BESAR	2.219	31.269.640.470.723,00
	JUMLAH	33.518	58.968.854.552.849,00

Atas sengketa pajak berupa keberatan dan non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangi, menghapuskan, dan membatalkan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat menerbitkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan membatalkan. Adapun pengajuan peninjauan kembali (PK) ke

Mahkamah Agung baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan amar putusan menerima atau menolak permohonan pemohon PK.

5. Pengalihan BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan

Hal-hal penting terkait pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), adalah sebagai berikut:

- PBB-P2 dan BPHTB merupakan 2 (dua) jenis Pajak Pusat yang dialihkan ke kabupaten/kota dan menjadi bagian dari 11 (sebelas) jenis Pajak kabupaten/kota yang diamanatkan UU PDRD;
- DJP masih tetap mengelola PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2013 sepanjang belum terbitnya Peraturan Daerah;
- DJP masih tetap mengelola BPHTB untuk tahun 2010, sejak tahun 2011 BPHTB menjadi Pajak Kabupaten/Kota;
- Tahapan pengalihan PBB PBB-P2 serta BPHTB diatur bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri; dan
- Secara umum pengaturan PBB-P2 serta BPHTB dalam UU PDRD adalah sama dengan yang diatur dalam UU PBB dan UU BPHTB, kecuali yang terkait dengan tarif pajak, NJOPTKP dan NPOPTKP.

Perbandingan antara UU PBB dengan UU PDRD adalah sebagai berikut.

No	Uraian	UU PBB	UU PDRD
		UU No. 12 Tahun 1985 stdtd UU No. 12 Tahun 1994	UU No. 28 Tahun 2009
1	Cakupan Sektor	Tidak dikenal sektoral (meliputi sektor Perdesaan, Perkotaan, Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan)	Sektor perdesaan dan perkotaan saja
2	Tarif	0,5% (<i>fixed</i>)	1. Paling tinggi 0,3% 2. Ditetapkan dengan Perda
3	Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Menteri Keuangan	Kepala Daerah
4	Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	20% s.d. 100% (PP No.25 tahun 2002 NJKP 20% dan 40%)	Tidak ada
5	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJKP)	1. Setinggi-tingginya Rp12.000.000,00 2. Diatur oleh Menteri Keuangan	1. Paling rendah Rp10.000.000,00 2. Ditetapkan dengan Perda
6	Penghitungan PBB	0,5% x (20% atau 40%) x (NJOP - NJOPTKP)	0,3% (maksimal) x (NJOP - NJOPTKP)

Perbandingan UU BPHTB dengan UU PDRD adalah sebagai berikut:

No	Uraian	UU BPHTB	UU PDRD
		UU No. 21 Tahun 1997 stdtd UU No. 20 Tahun 2000	UU No. 28 Tahun 2009
1	Tarif	5% (<i>fixed</i>)	1. Paling tinggi 5% 2. Ditetapkan dengan Perda
2	Dasar Pengenaan	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

3	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	1. Paling banyak Rp300.000.000,00 untuk waris dan hibah wasiat	1. Paling rendah Rp300.000.000 untuk waris dan hibah wasiat
		2. Paling banyak Rp60.000.000 untuk selain waris dan hibah wasiat	2. Paling rendah Rp60.000.000 untuk selain waris dan hibah wasiat
		3. Ditetapkan Menteri Keuangan	3. Ditetapkan dengan Perda
4	Penghitungan BPHTB	5% dari (NPOP - NPOPTKP)	5% (maksimal) dari (NPOP - NPOPTKP)
5	Penggunaan NJOP	Dalam hal NPOP tidak diketahui atau nilainya lebih rendah daripada NJOP maka NJOP digunakan sebagai NPOP	Dalam hal NPOP tidak diketahui atau nilainya lebih rendah daripada NJOP maka NJOP digunakan sebagai NPOP

Sehubungan dengan tahapan pengalihan PBB-P2, telah disusun Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama tersebut, DJP telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Sesuai PER-61/PJ/2010 tersebut, maka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 hanya dapat dilakukan pada 1 Januari Tahun Pengalihan bagi Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bersama.

Sehubungan dengan tahapan pengalihan BPHTB, telah disusun Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Bersama tersebut, DJP telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah.

Sesuai PER-47/PJ/2010 tersebut kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011 dengan persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

Sehubungan dengan kegiatan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB, Kementerian Keuangan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 telah melakukan Diseminasi dan Asistensi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Sebagai Pajak Daerah yang bertempat di Surabaya.

Untuk tahun 2011, baru Pemerintah Kota Surabaya yang akan melakukan pemungutan PBB-P2 maupun BPHTB sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat nomor S-642/MK.07/2010 tanggal 19 November 2010, yang memberikan persetujuan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 mulai tahun 2011 sekaligus ditunjuk sebagai *Pilot Project* Pemungutan PBB-P2.

Mengenai kesiapan Peraturan Daerah (Perda), sesuai data Per 31 Desember 2010 daerah yang telah mempersiapkan Perda BPHTB adalah sekitar 268 daerah atau 54,5% dari jumlah total 492 Kabupaten/Kota.

Disain pengalihan PBB-P2 dan BPHTB secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Pengalihan pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan serta BPHTB ke kabupaten/kota dapat dilakukan setelah:

- 1) Perda tentang Pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB dari suatu kabupaten/kota telah

disetujui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan;

- 2) Pemerintah kabupaten/kota memberitahukan persetujuan Perda tersebut 4 bulan sebelum awal tahun pajak.
- b. Proses pengalihan PBB-P2 adalah dengan penyerahan aset DJP yang meliputi *copy* aplikasi SISMIOP (*source code* dan dokumen teknis), *copy* basis data SISMIOP tahun terakhir (data OP, WP, dan NJOP), *copy* peta-peta (peta blok dan ZNT), dan data tunggakan selambat-lambatnya 4 bulan sebelum tahun pajak dimulai kepada kabupaten/kota dengan suatu berita acara oleh Kepala KPP Pratama setempat;
- c. Proses pengalihan BPHTB adalah dengan penyerahan data tunggakan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun pajak dimulai kepada kabupaten/kota dengan suatu berita acara oleh Kepala KPP Pratama setempat;
- d. Setelah penyerahan aset dan *copy* data ke kabupaten/kota, maka DJP tidak lagi bertanggung jawab atas penggunaan data tersebut oleh kabupaten/kota dan khusus untuk basis data PBB, DJP tetap berhak memanfaatkan data tersebut guna kepentingan perpajakan.

Dalam rangka menjalankan desain dimaksud diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Masa persiapan (tahun 2010)

- 1) Melakukan sosialisasi ke seluruh Wajib Pajak dan *stakeholder* lainnya seperti Pemda, PPAT, Bank, KPPN, dan lain-lain;
- 2) Menyampaikan peraturan, SOP, dan bagan organisasi terkait pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB oleh DJP kepada kabupaten/kota guna dijadikan rujukan/model;
- 3) Membentuk Tim IT dan Basis Data yang bertugas menyiapkan aplikasi dan basis data SISMIOP yang akan diserahkan *copy*-nya ke Pemda meliputi:
 - a) Menyiapkan Aplikasi SISMIOP serta kelengkapannya (*source code* SISMIOP, dokumentasi sistem SISMIOP, dan *user manual* SISMIOP);
 - b) Menyiapkan basis data SISMIOP meliputi:
 - i. Data obyek pajak termasuk NJOP kondisi terakhir;
 - ii. Data subyek pajak kondisi terakhir.
- 4) Menyiapkan Data dokumen Peta Desa, Peta Blok, dan Peta ZNT per kabupaten/kota yang terbaru baik berbentuk *hardcopy* maupun *softcopy* untuk siap diserahkan *copy*-nya ke kabupaten/kota guna mendukung basis data SISMIOP;
- 5) Menyampaikan konsep Surat Edaran Dirjen Pajak tentang:
 - a) Materi dan tata cara sosialisasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;
 - b) Tata cara pelayanan, batas waktu penyampaian permohonan, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan PBB-P2, dan BPHTB pada masa transisi;
 - c) Langkah-langkah pemeliharaan basis data PBB-P2 kepada KPP Pratama antara lain: kelengkapan dokumentasi, kelengkapan kertas kerja penentuan NJOP, pemutakhiran data, dan lain-lain yang diawasi dan dikoordinir oleh Kepala Kanwil setempat;

- d) Kebijakan stabilitas NJOP dalam rangka mengantisipasi pengalihan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota;
 - e) Pengaturan penyelesaian berkas pengurangan, keberatan, dan banding pada masa transisi dan pada masa setelah PBB-P2 dan BPHTB dialihkan ke kabupaten/kota;
 - f) Evaluasi dan penegasan pelaksanaan SE-84/PJ/2008 tentang Pemutakhiran Data Pembayaran PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
 - g) Tata cara penyampaian usulan penghapusan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB;
 - h) Tata cara dan SOP penyampaian basis data, aplikasi SISMIOP, dan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB ke kabupaten/kota.
- 6) Menginventarisasi tunggakan PBB-P2 dan BPHTB untuk siap dialihkan ke kabupaten/kota dengan berita acara;
 - 7) Menginventarisasi infrastruktur yang dapat dialihkan secara hibah;
 - 8) Membuat analisis sebaran SDM di DJP untuk mengelola PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan yang masih dikelola oleh DJP;
 - 9) Membuat analisis penyesuaian unit organisasi DJP pada tingkat kanwil yang akan melaksanakan fungsi pengelolaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan.

b. Masa pengalihan

- 1) Kanwil DJP dan KPP berkoordinasi dengan kabupaten/kota;
- 2) Pelaksanaan Berita Acara Penyerahan Basis Data, Peta, Aplikasi SISMIOP, dan Tunggakan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- 3) Serah terima selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun pajak dimulai.

c. Masa pasca pengalihan

DJP selama satu tahun dapat memberikan asistensi kepada kabupaten/kota terkait pelaksanaan PBB-P2 dan BPHTB apabila diminta oleh kabupaten/kota.

d. Pengalihan Piutang Pajak PBB dan BPHTB

1) Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2011. Sebagai bagian persiapan pengalihan tersebut, telah diterbitkan serangkaian ketentuan sebagai berikut:

- a) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan 53 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
- b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;

- c) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 108/PJ/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Tindak Lanjut Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB yang telah dilaksanakan yaitu:
 - 1) Sosialisasi dan ToT Persiapan Pengalihan BPHTB;
 - 2) Koordinasi dengan Kanwil dan KPP seluruh Indonesia;
 - 3) Monitoring dan Evaluasi pada Kanwil dan KPP seluruh Indonesia;
 - 4) Pembuatan Aplikasi Pengunduh dan Pembaca Data NJOP Tahun 2011; dan
 - 5) Penyerahan data/berkas BPHTB ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b) Pelaksanaan Pengalihan BPHTB tahun 2011 yaitu:
 - 1) Sosialisasi dan ToT Persiapan Pengalihan BPHTB;
 - 2) Koordinasi dengan Kanwil dan KPP seluruh Indonesia; dan
 - 3) Monitoring dan Evaluasi pada Kanwil dan KPP seluruh Indonesia.

2) Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, kewenangan pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2013.

Sebagai bagian persiapan pengalihan tersebut, telah diterbitkan serangkaian ketentuan sebagai berikut:

- a) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan 58 Tahun 2010 tanggal 30 November 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
- b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, piutang PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Per 31 Desember 2011 tetap dilaporkan di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan akan menjadi piutang pajak di Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani antara KPP Pratama dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Progress Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

- a) Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan:
 - 1) Koordinasi dengan Kanwil DJP dan KPP yang wilayah kerjanya akan dialihkan;

- 2) Monitoring dan Evaluasi pada Kanwil DJP dan KPP yang wilayah kerjanya akan dialihkan;
 - 3) Workshop Informasi dan Teknologi (IT);
 - 4) Cleansing dan pemecahan *database* SISMIOP; dan
 - 5) Penyerahan data/berkas PBB-P2 ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b) Pelaksanaan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan:
- 1) Serah terima pada 17 Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan paling lambat 5 Januari 2012;
 - 2) Data Piutang PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2011 akan diserahkan paling lambat 31 Desember 2012;
 - 3) Permohonan pelayanan PBB-P2 sampai dengan 31 Desember 2011 belum dapat diselesaikan DJP, tindak lanjut penyelesaiannya menunggu revisi Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
 - 4) Jumlah Kabupaten/Kota yang berencana melaksanakan pemungutan PBB-P2 yaitu sebagai berikut:
 - i. Tahun 2011: 1 Kota (Surabaya);
 - ii. Tahun 2012: 17 Kabupaten/Kota (Tabel berikut)
 - iii. Tahun 2013: 60 Kabupaten/Kota (Perkiraan berdasarkan kesiapan Perda)
 - iv. Tahun 2014: 419 Kabupaten/Kota (Perkiraan)

Daftar Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

NO	Kabupaten/Kota	KPP
1	Kota Bandar Lampung	KPP Pratama Tanjung Karang, KPP Pratama Kedaton, dan KPP Pratama Teluk Betung
2	Kota Palu	KPP Pratama Palu
3	Kabupaten Sidoarjo	KPP Pratama Sidoarjo Barat, KPP Pratama Sidoarjo Utara, dan KPP Pratama Sidoarjo Selatan
4	Kabupaten Gresik	KPP Pratama Gresik Utara dan KPP Pratama Gresik Utara
NO	Kabupaten/Kota	KPP
5	Kota Balikpapan	KPP Pratama Balikpapan
6	Kota Samarinda	KPP Pratama Samarinda
7	Kota Medan	KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Medan Belawan, KPP Pratama Medan Timur, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Pratama Medan Kota, dan KPP Pratama Medan Petisah
8	Kabupaten Deli Serdang	KPP Pratama Lubuk Pakam
9	Kota Yogyakarta	KPP Pratama Yogyakarta

10	Kabupaten Sukoharjo	KPP Pratama Sukoharjo
11	Kota Semarang	KPP Pratama Semarang Barat, KPP Pratama Semarang Timur, KPP Pratama Semarang Selatan, KPP Pratama Semarang Tengah Satu, KPP Pratama Semarang Tengah Dua, KPP Pratama Semarang Candisari, dan KPP Pratama Semarang Gayamsari
12	Kota Depok	KPP Pratama Depok
13	Kabupaten Bogor	KPP Pratama Cibinong, KPP Pratama Cileungsi, dan KPP Pratama Ciawi
14	Kota Pekanbaru	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, KPP Pratama Pekanbaru Tampan
15	Kota Pontianak	KPP Pratama Pontianak
16	Kota Gorontalo	KPP Pratama Gorontalo
17	Kota Palembang	KPP Pratama Palembang Ilir Timur, KPP Pratama Palembang Ilir Barat, dan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

e. Informasi Tunggalan Sengketa Pajak atas PBB dan BPHTB

1) Informasi Sengketa Pajak atas BPHTB

Berkaitan dengan pengalihan BPHTB yang mulai berlaku 1 Januari 2011, dapat diinformasikan bahwa tunggalan atas sengketa pajak yang berkaitan dengan BPHTB yang belum mendapatkan keputusan atau putusan Per 31 Desember 2010 sebagai berikut:

Jenis Sengketa Pajak	Jumlah Ketetapan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Keberatan	44	17.100.436.572	-	17.100.436.572
Non Keberatan	117	4.809.793.028	-	4.809.793.028
Banding/Gugatan	17	42.162.076.522	-	42.162.076.522
Peninjauan Kembali	7	24.740.884.362	-	24.740.884.362
Jumlah	185	88.813.190.484	-	88.813.190.484

Tunggalan atas keberatan dan non keberatan atas BPHTB Per 31 Desember 2010 yang masih tersisa sebanyak 161 berkas dengan nilai Rp21.910.229.600,00 merupakan tunggalan yang pada awalnya menjadi wewenang penyelesaian Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah DJP.

Tunggalan Banding/Gugatan merupakan surat permohonan banding atau gugatan atas BPHTB oleh Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak yang telah dikirimkan pemberituannya melalui permintaan Surat Uraian Banding (SUB) oleh Pengadilan Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak Terbanding/Tergugat dan belum diterima putusannya Per 31 Desember 2010. Selama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait

dengan BPHTB, Direktorat Keberatan dan Banding mewakili Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadiri sidang banding atau gugatan.

Tunggakan Peninjauan Kembali adalah surat memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas BPHTB yang telah diajukan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak dan belum diterima putusannya Per 31 Desember 2010. Sesuai peraturan yang berlaku, proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung tidak memerlukan kehadiran sidang baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak.

2) Informasi Sengketa Pajak atas PBB

Berkenaan dengan pengalihan PBB, diinformasikan bahwa terdapat satu pemerintah daerah yang sudah siap melakukan pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan mulai 1 Januari 2011 yaitu Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya. Tunggakan sengketa pajak yang berkaitan dengan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan untuk Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya sebagai berikut:

Jenis Sengketa Pajak	Jumlah Ketetapan	Nominal Ketetapan		
		Dalam Rp	Dalam USD	Total Rp
Keberatan			-	-
Non Keberatan	84	231.717.941		231.717.941
Banding/Gugatan	1	847.597.490	-	847.597.490
Peninjauan Kembali				
Jumlah	85	1.079.315.431	-	1.079.315.431

6. PBB Pertambangan Migas

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemungutan PBB terutang kepada Wajib Pajak didahului dengan penerbitan SPPT kepada Wajib Pajak, selanjutnya Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang yang tercantum dalam SPPT tersebut. Khusus terhadap Wajib Pajak KKKS atau PBB Pertambangan Migas, mekanisme pemungutan dan penagihannya dilaksanakan secara berbeda dari Wajib Pajak pada umumnya, karena Wajib Pajak terikat pada kontrak dengan pemerintah sehingga diberlakukan *lex specialist*.

Dalam pemungutan PBB Wajib Pajak KKKS terdapat beberapa institusi yang terkait dalam pelaporan, penagihan, dan pelunasan PBB terutang kepada Wajib Pajak KKKS, yaitu DJP, BP Migas, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Secara garis besar mekanisme pemungutan PBB Migas dapat disampaikan sebagai berikut:

- Wajib Pajak KKKS yang sudah berproduksi wajib menyetorkan persentase tertentu sesuai kontrak karya dari *net operating income* (NOI) ke pemerintah;
- Bagian pemerintah tersebut akan dikurangi dengan unsur-unsur pajak yaitu PPN *reimbursement*, Pajak Bumi dan Bangunan, dan PDRD;
- PBB tersebut dibayarkan ke daerah melalui mekanisme pemindahbukuan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;

- d. Setiap awal tahun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menetapkan ketetapan sementara besarnya pajak terutang terhadap obyek pajak pertambangan migas dan pada akhir tahun membuat ketetapan rampung;
- e. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan permintaan pemindahbukuan ke Direktur Jenderal Anggaran;
- f. Direktur Jenderal Anggaran membuat surat permintaan pemindahbukuan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan dan ke Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
- g. Direktur Jenderal Perbendaharaan membuat permintaan pemindahbukuan dari Bank Indonesia ke Bank Mitra KPPN Jakarta II;
- h. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengeluarkan surat perintah membayar (SPM) dari Bank Mitra KPPN Jakarta II ke rekening kas daerah maupun pusat.

Pengungkapan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010, telah ditindaklanjuti sebagaimana di bawah ini.
 - a) Penyusunan bersama dengan DJPK, DJA, dan DJPB dengan supervisi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RPMK mengenai Penatausahaan dan Pemindahbukuan PBB Migas dan PBB Panas Bumi;
 - b) Telah dilaksanakannya perhitungan kelebihan dan kekurangan ketetapan PBB Migas di 31 Kabupaten/Kota yang akan diperhitungkan dalam alokasi kurang bayar PBB Migas tahun 2008 – 2010.
- 2) Ketetapan PBB Migas tahun 2011 adalah sebesar Rp20.463.861.212.044,00 sebagaimana surat Direktorat Jenderal Pajak kepada Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-143/PJ/2011 tanggal 21 Juli 2011 hal Permintaan Pemindahbukuan Pembayaran PBB Migas Tahun 2011, dengan dilampiri SPPT PBB Migas tahun 2011.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Anggaran kepada Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-2112/AG/2011 tanggal 24 Agustus 2011 hal Pemberitahuan Pembayaran PBB Migas Triwulan I dan II Tahun 2011 untuk 497 Kabupaten/Kota, ketetapan PBB Migas dari KKKS *Coalbed Methane* (CBM) sebesar Rp186.989.438.000,00 ditunda pembayarannya.

7. Pungutan Ekspor/Bea Keluar

Pungutan Ekspor (PE) adalah pungutan yang dikenakan atas barang ekspor tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 159/PMK.011/2008 dan PMK Nomor 95/PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif Pungutan Ekspor Atas Batubara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 131/PMK.010/2005, **yang urusan pemungutannya belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008** oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Pelimpahan pengelolaan PE dari DJA kepada DJBC pada awal tahun 2009 dilakukan melalui:

- a. Transfer saldo Laporan Keuangan (Neraca) BA 15 Pungutan Ekspor TA 2008 (audited) Ditjen Anggaran ke saldo neraca DJBC semester I TA 2009;
- b. Penyerahan berkas urusan PE dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai Berita Acara Nomor 01/AG/2009 tanggal 20 Februari 2009.

Atas saldo PE tersebut telah dilakukan klarifikasi antara DJBC dan DJA sehingga pada neraca audited 2010 angka PE masing-masing terdiri dari aset lancar senilai Rp1.197.181.532,00, aset lain-lain senilai Rp123.645.628.334,00, dan utang pihak ketiga senilai Rp3.498.262.773,00.

Adapun mutasi akun pungutan ekspor selama Tahun 2011 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

AKUN	Saldo Awal 12/31/2010	Koreksi	Mutasi			Saldo Akhir 12/31/2010
			Penambahan	Reklasifikasi	Pembayaran (Realisasi Restitusi)	
ASET LANCAR						
Piutang PE	1.197.181.532	(12.212.697)		122.966.032.684	-	124.151.001.519
ASET LAIN-LAIN						
Piutang PE (DJKN)	123.645.628.334	(679.595.650)	-	(122.966.032.684)		-
KEWAJIBAN						
UTANG PIHAK KETIGA (EKSPORTIR)	3.498.262.773	-	-		1.553.781.831	1.944.480.942

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-18/BC/2011 tentang Pelaksanaan Penyisihan Piutang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kualitas piutang PE per 31 Desember 2011 yaitu:

I. Kualitas Lancar	
a. Saldo Akhir Umur s.d. 1 tahun	-
b. Penyisihan = $0,5\% \times (a)$	-
II. Kualitas Kurang Lancar	
a. Saldo Akhir Umur 1 tahun s.d. 2 tahun	-
b. Saldo Akhir Umur 1 tahun s.d. 2 tahun dengan Jaminan Tunai	-
c. Saldo Akhir Umur 1 tahun s.d. 2 tahun dengan Jaminan Bank	-
d. Penyisihan = $10\% \times (a - (b + c))$	-
III. Kualitas Diragukan	
a. Saldo Akhir Umur 2 tahun s.d. 3 tahun	-
b. Saldo Akhir Umur 2 tahun s.d. 3 tahun dengan Jaminan Tunai	-
c. Saldo Akhir Umur 2 tahun s.d. 3 tahun dengan Jaminan Bank	-
d. Penyisihan = $50\% \times (a - (b + c))$	-
IV. Kualitas Macet	
a. Saldo Akhir Umur diatas 3 tahun	124.151.001.519
b. Saldo Akhir Umur diatas 3 tahun dengan Jaminan Tunai	-
c. Saldo Akhir Umur diatas 3 tahun dengan Jaminan Bank	-
d. Dilimpahkan Ke KPKNL (BD.6) - 0 s.d. 3 tahun	-
e. WP tidak ditemukan (BD.7) - 0 s.d. 3 tahun	-
f. WP Pailit (BD.8) - 0 s.d. 3 tahun	-
g. Penyisihan = $100\% \times ((a - (b + c)) + (d + e + f))$	124.151.001.519

8. Pengelolaan Barang Hasil Tegahan, Sitaan/Rampasan, Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008, kriteria dari Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara adalah sebagai berikut.

Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai adalah:

- a. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
- b. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya;
- c. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau
- d. Barang yang dikirim melalui Pos:
 - 1) yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean;
 - 2) dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Pemberitahuan dari Kantor Pos.

Barang yang dikuasai Negara adalah:

- a. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean;
- b. Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
- c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.

Barang yang Menjadi Milik Negara adalah:

- a. Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;
- c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
- d. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean;

- e. Barang yang dikuasai Negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau
- f. Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.

Atas barang yang menjadi milik negara yang dinilai dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai persediaan adalah barang yang telah memiliki status akan dilelang dan sudah mendapat keputusan dari Menteri Keuangan. Sedangkan barang yang berstatus dihibahkan, dimusnahkan dan barang yang belum ada peruntukannya hanya diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai lampiran. Hal ini karena barang-barang tersebut berada dibawah pengawasan Kantor Bea dan Cukai, tetapi belum ada keputusan dari Menteri Keuangan tentang peruntukannya.

9. Hibah Barang dari Asian Development Bank (ADB)

Peralatan dan mesin Bapepam LK mengalami kenaikan sejumlah 11 unit barang berupa Note Book, Scanner, Printer, *Switch Hub*, Voice Recorder, *Copyboard* dan *Voice conference* dengan nilai sebesar Rp59.528.957,00. Kenaikan ini merupakan transaksi hibah dari PT Sarana Multigriya Financial yang merupakan kepanjangan tangan dari ADB. Hibah atas aset tersebut dituangkan dalam Berita Acara (*Certificate of Disposal/ Turnover Of TA Equipment*) TA 4715-INO : *Secondary Mortgage Facility* tanggal 2 November 2009.

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Daftar temuan dan tindak lanjut temuan BPK RI terlampir.

D.2. Rekening Pemerintah

Jumlah rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan yang terdata hingga 31 Desember 2011 adalah 6.404 rekening dengan rincian 6.394 rekening senilai Rp1.355.682.889.692,94 dan 10 rekening senilai US\$1.204.124,34. Perkembangan rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan dapat dilihat pada Tabel 151 berikut.

Tabel 151
Rekening Pemerintah Lingkup Kementerian Keuangan
per 31 Desember 2011 dan 2010

(dalam rupiah)

No.	Pengelompokan Rekening	per 30 Juni 2011				per 31 Desember 2011			
		Rek.	Rupiah	Rek.	Dolar	Rek.	Rupiah	Rek.	Dolar
I. Dipertahankan									
1.	Rek. Bend. Penerimaan	9	3.425.029.274,88	0	0,00	10	7.146.701.582,88	0	0,00
2.	Rek. Bend. Pengeluaran	1.267	159.128.661.440,52	0	0,00	1.138	3.768.524.541,50	0	0,00
3.	Rek. Penampungan Dana Dukungan Pelayanan Khusus yang Bersifat Permanen (Diusulkan menjadi BLU)	2	17.239.853.317,99	1	200.342,83	3	17.447.292.532,00	1	200.266,24
4.	Rek. Penampungan Dana Jaminan Pihak Ketiga	49	198.654.882.303,39	0	0,00	52	164.678.166.841,73	0	0,00
5.	Rek. Penampungan Dana Titipan	1	171.317.477,00	0	0,00	1	707.275.349,00	0	0,00
6.	Rek. Penampungan Hibah dan Kerjasama Terikat	0	0,00	2	5.197,66	0	0,00	2	0,00
7.	Rek. Penerimaan Non DIPA	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	Rek. Aktif Lainnya	2.106	759.553.782.157,40	4	1.114.359,28	2.590	718.376.790.669,38	5	1.003.858,10
Sub Total		3.434	1.138.173.525.971,18	7	1.319.899,77	3.794	912.124.751.516,49	8	1.204.124,34
II. Ditutup									
1.	Ditutup setor ke Kas Negara	1.750	391.755.207.308,13	2	0,00	1.914	391.755.263.543,13	2	0,00
2.	Ditutup setor ke Non Kas Negara	314	18.746.180.248,11	0	0,00	313	18.746.180.248,11	0	0,00
3.	Ditutup digabung ke rekening pemerintah lainnya	188	2.044.105.064,16	0	0,00	191	1.944.156.528,16	0	0,00
4.	Ditutup setor ke Kas Negara dan Non Kas Negara	4	2.190,29	0	0,00	4	2.190,29	0	0,00
Sub Total		2.256	412.545.494.810,69	2	0,00	2.422	412.445.602.509,69	2	0,00
1.	Penutupan yang belum/tidak dilaksanakan	206	38.158.167.536,95			178	31.112.535.666,76		
2.	Tidak jelas identitas pemilik rekening	0		0		0		0	
3.	Pembahasan deadlock (dokumen/informasi tidak lengkap)	0		0		0		0	
Sub Total		206	38.158.167.536,95			178	31.112.535.666,76		
Total		5.896	1.588.877.188.318,82	9	1.319.899,77	6.394	1.355.682.889.692,94	10	1.204.124,34

Rincian mutasi rekening Kementerian Keuangan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011.

Daftar rekening pemerintah lingkup Kementerian Keuangan terlampir.

D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrua tingkat pemerintah pusat merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahunan, secara berjenjang dari mulai UAKPA sampai dengan UAPA, dimulai dari Laporan Keuangan Tahunan TA 2009.

Transaksi pendapatan secara akrua terdiri dari:

1. Pendapatan yang masih harus diterima (disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang di neraca); dan/atau
2. Pendapatan diterima dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca).

Sedangkan transaksi belanja secara akrual meliputi:

1. Belanja yang masih harus dibayar (disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca); dan/atau
2. Belanja dibayar dimuka (disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca).

Pendapatan dan belanja secara akrual tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 152 berikut.

Tabel 152
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2011

(dalam Rupiah)

Pendapatan/Belanja	Realisasi Menurut Basis Kas	Penyesuaian Akrual		Realisasi Menurut Basis Akrual
		Tambah	Kurang	
A. Pendapatan Negara dan Hibah				
I. Penerimaan Perpajakan	873.721.483.886.873	21.595.428.686.465	6.151.907.768.863	889.165.004.804.475
1. Pajak Dalam Negeri	819.726.384.405.794	21.508.165.783.732	6.148.707.664.739	835.085.842.524.787
2. Pajak Perdagangan Internasional	53.995.099.481.079	87.262.902.733	3.200.104.124	54.079.162.279.688
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.769.339.408.565	23.633.072.724	24.087.863.788	1.768.884.617.501
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	0	0	0	0
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	0	0	0	0
3. Pendapatan PNB Lain-lain	647.774.605.376	19.937.344.946	23.424.345.038	644.287.605.284
4. Pendapatan Badan Layanan Umum	1.121.564.803.189	3.695.727.778	663.518.750	1.124.597.012.217
III. Penerimaan Hibah *)				
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	875.490.823.295.438	21.619.061.759.189	6.175.995.632.651	890.933.889.421.976
B. Belanja Negara				
I. Belanja Pemerintah Pusat	16.100.333.220.289	20.073.862.274	205.820.287.697	15.914.586.794.867
1. Belanja Pegawai	7.490.514.041.094	3.178.526.288	6.181.493.810	7.487.511.073.572
2. Belanja Barang	5.277.837.278.247	16.891.278.627	39.687.444.111	5.255.041.112.764
3. Belanja Modal	2.084.582.029.561	4.057.359	159.951.349.776	1.924.634.737.144
4. Pembayaran Bunga Utang	1.247.399.871.387	0	0	1.247.399.871.387
Jumlah Belanja Negara	16.100.333.220.289	20.073.862.274	205.820.287.697	15.914.586.794.867

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2011 menurut basis kas adalah sebesar **Rp875.490.823.295.438,00** terdapat penyesuaian akrual tambah sebesar **Rp21.619.061.759.189,00** dan penyesuaian akrual kurang sebesar **Rp6.175.995.632.651,00**. Berdasarkan mutasi penyesuaian tersebut maka realisasi pendapatan TA 2011 secara akrual adalah sebesar **Rp890.933.889.421.976,00**.
2. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2011 menurut basis kas adalah sebesar **Rp16.100.333.220.289,00** terdapat penyesuaian akrual tambah sebesar **Rp20.073.862.274,00** dan penyesuaian akrual kurang sebesar **Rp205.820.287.697,00**. Berdasarkan mutasi penyesuaian tersebut maka realisasi belanja TA 2011 secara akrual adalah sebesar **Rp15.914.586.794.867,00**.

Daftar Informasi pendapatan dan belanja secara akrual terlampir.

D.4. DAFTAR KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Daftar kontrak dengan pihak ketiga berdasarkan aplikasi SIMAK-BMN yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2011 dan realisasi pembayaran atas Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2011 lingkup Kementerian Keuangan terlampir.

D.5. ASET TETAP BERMASALAH

Daftar Aset Tetap bermasalah per 31 Desember 2011 lingkup Kementerian Keuangan terlampir.

D.6. BARANG TEGAHAN

Daftar Barang Tegahan DJBC lingkup Kementerian Keuangan terlampir.

D.7. BARANG SITAAN

Daftar Barang Sitaan DJP lingkup Kementerian Keuangan terlampir.